



*“On going transformation
for future sustainable growth.”*



*“On going transformation
for future sustainable growth.”*



DAFTAR ISI		Halaman
Bagian I	Ikhtisar Utama	5
	• Sekilas Bank Ina	6
	• Piagam dan Sertifikat	8
	• Kaleidoskop 2014	10
	• Kinerja dan Strategi 2014	12
	• Ikhtisar Data Keuangan Penting	14
	• Ikhtisar Saham	15
Bagian II	Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	17
	• Laporan Dewan Komisaris	18
	• Laporan Direksi	22
	• Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	25
Bagian III	Profil Perusahaan	27
	• Identitas Perusahaan	28
	• Bidang Usaha	29
	• Sejarah Perseroan	30
	• Struktur Organisasi	31
	• Visi, Misi dan Landasan Pencapaian	32
	• Struktur Kelompok Usaha	33
	• Profil Dewan Komisaris	34
	• Profil Direksi	36
	• Group Head	38
	• Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu	39
	• Kronologis Pencatatan Saham	40
	• Nama & Alamat Lembaga dan / Profesi Penunjang Pasar modal	42
	• Produk dan Jasa	43
	• Jaringan Kantor	46
	• Kebijakan Dividen	47
	• Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	48
Bagian IV	Analisa dan Pembahasan Manajemen	49
	• Perekonomian Indonesia 2014	50
	• Kinerja Perbankan Nasional 2014	52
	• Kinerja Bank 2014	53



Bagian V	Good Corporate Governance	59
	• Pendahuluan	61
	• Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	61
	• Prinsip GCG	65
	• Struktur GCG	66
	• Penerapan Customer Due Diligence	79
	• Sistem Pengendalian Intern	84
	• Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	85
	• Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	86
	• Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	87
	• Share Option	87
	• Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	88
	• Permasalahan Hukum	89
	• Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	89
	• Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank	90
	• Rencana Strategis Bank	90
	• Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial	93
	• Upaya Memperkuat GCG	93
	• Whistle Blowing System	94
	• Laporan Sistem Teknologi Informasi	94
	• Prospek dan Pengembangan Usaha 2015	95
Bagian VI	Manajemen Risiko	97
	• Pendahuluan	98
	• Penerapan Manajemen Risiko	98
	• Pengungkapan Permodalan dan Eksposur Risiko	106
Bagian VII	Sumber Daya Manusia	141
Bagian VIII	Corporate Social Responsibility	145



BANK INA



BAGIAN I IKHTISAR UTAMA

SEKILAS BANK INA
KALEIDOSKOP 2014
KINERJA DAN STRATEGI 2014
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IKHTISAR SAHAM

PT Bank Ina Perdana Tbk didirikan pada tanggal 9 Februari 1990, dan efektif beroperasi pada tanggal 3 Juli 1991. Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi Bank Ina Perdana dengan dilakukan perubahan status Bank menjadi “Tbk” (Perusahaan Terbuka) setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) pada tanggal 16 Januari 2014 serta pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode “BINA”.

Dalam perjalanannya, Bank Ina mampu mempertahankan keberadaannya di bisnis perbankan nasional. Hal ini terbukti pada kinerja keuangan tahun 1997/1998, Bank Ina mampu bertahan sebagai bank yang sehat dengan katagori A dan tidak memerlukan rekapitalisasi Pemerintah. Di tahun 2004 – 2008, Bank Ina mendapat predikat “**Sangat Bagus**” versi majalah infobank. Jumlah jaringan kantor saat itu adalah 14 kantor dan melayani ATM melalui kerjasama dengan penyedia ATM bersama. Selanjutnya pada tahun 2009 – 2010, Bank Ina terus menambah jaringan kantor untuk memperluas pelayanan di kota Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Lumajang, sehingga pada tahun 2011 jumlah jaringan bertambah menjadi 22 kantor.

Dengan komitmen yang kuat, manajemen Bank Ina senantiasa melakukan upaya dalam menjaga eksistensi serta peningkatan kinerja Bank, dan telah diperoleh beberapa penghargaan (*awards*) dari berbagai pihak independen, seperti : penghargaan “*Banking Efficiency Award*” dari harian Bisnis Indonesia pada tahun 2012, peringkat pertama untuk katagori *The Best Bank 2012 in “Compliance”*, peringkat tiga untuk katagori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* , peringkat 3 untuk katagori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* dari majalah **Business Review** dalam Anugrah Perbankan Indonesia 2012, dan “*The Best Improvement Bank of The Year*” dari Sembilan Bersama Media. Penghargaan yang telah diterima pada tahun 2013 meliputi *The Best*

Improvement Bank of The Year dan penghargaan peringkat dua *CEO in Leadership* kepada Edy Kuntardjo selaku Direktur Utama Bank Ina Perdana, dari *Economic Review* dalam Anugerah Perbankan 2013. Penghargaan terbaru adalah sebagai *The Best Performing Bank in Achieving Total Customer Satisfaction* pada *Indonesian Achieving & Best Performing Award 2014*, *The Best Choice in Banking & Loyalty Services of The Year* dan *Leading Corporate in Finance Service of The Year*.

Pada tahun 2014 juga ditandai adanya perubahan pemegang saham dimana pemegang saham lama PT Kharisma Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi telah melepaskan seluruh kepemilikannya. Saat ini pemegang saham pengendali baru adalah PT Philadel Terra Lestari yang masih dalam proses permohonan persetujuan OJK.

Untuk tumbuh lebih baik lagi di masa mendatang, maka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan akan terus dilakukan dari waktu ke waktu, dan Bank Ina Perdana akan terus berupaya dalam membangun pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan dan berkualitas. Kehadiran pemegang saham baru yang lebih kuat membawa tantangan baru bagi Bank Ina Perdana untuk membangun bank yang lebih kuat melalui proses transformasi sebagaimana tema Laporan Tahunan 2014 yaitu “*on going transformation for future sustainable growth*”.







PIAGAM DAN SERTIFIKAT



Predikat **SANGAT BAGUS** atas kinerja keuangan tahun 2004 - 2008 dari Majalah Infobank



Banking Efficiency Award dari Bisnis Indonesia pada tahun 2012



Peringkat 3 **The Best bank 2012** in **"Risk management"** dari Anugerah Perbankan Indonesia



Peringkat 3 **The Best bank 2012 in** **"Marketing"** dari Anugerah Perbankan Indonesia



Peringkat 1 **The Best bank 2012 in "Compliance"** dari Anugerah Perbankan Indonesia



Piala dan Piagam Penghargaan
The Best Improvement Bank of The Year
 dari Anugerah Citra Indonesia pada tahun 2013



Piagam Penghargaan
 peringkat 2 ***“CEO in Leadership”*** dari
 Anugerah Perbankan Indonesia pada tahun 2013



Piala dan Piagam Penghargaan
***The Best Performing Bank in Achieving Total
 Customer Satisfaction 2014*** dari *Indonesian
 Achievement & Best Performing Award*



***The Best Choice in Banking &
 Loyalty Service of The Year 2015***
 dari *Indonesian Creativity & Best Leader Award*



***Leading Corporate In Finance Service
 of The Year 2015*** dari
Indonesian Development Achievement Foundation





KALEIDOSKOP 2014



10 Januari 2014. Perseroan mengadakan perayaan Natal bersama 2013 dan Tahun Baru 2014, berlokasi di Gedung BSG Lantai 5, Jakarta.



16 Januari 2014. Perseroan mengadakan Pencatatan Perdana Saham Bank Ina (BINA), berlokasi di Gedung BEI, Jakarta.



22 Februari 2014. Perseroan mengadakan pelatihan Leadership untuk Para Pimpinan, berlokasi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.



22-23 Februari 2014. Perseroan mengadakan Rapat Kerja Pimpinan berlokasi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.



22 Maret, 29 Maret, 12 April. Perseroan mengadakan pelatihan Motivasi & Service Excellence, berlokasi di Training Center Kantor Pusat, Jakarta.



26 April 2014. Perseroan mengadakan pelatihan Leadership, berlokasi di Training Center Kantor Pusat, Jakarta.



5 Mei 2014. Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berlokasi di Gedung BEI, Jakarta.



7-8 Juni 2014. Perseroan mengadakan Pelatihan Team Building dan Employee Gathering yang diikuti oleh seluruh karyawan, yang dilaksanakan di Bali.



11 Juli 2014. Perseroan mengadakan Buka Puasa Bersama dengan seluruh karyawan Jakarta, berlokasi di *Training Center*, Jakarta.



4 September 2014. Perseroan ikut serta memperingati Hari Pelanggan Nasional dengan mengadakan *Customer Day* di seluruh kantor Bank Ina Perdana.



9 Oktober 2014. Perseroan menandatangani kerjasama dengan Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) untuk pemberian beasiswa dalam program "*Clement Suleeman Scholarship Fund*".



21 November 2014. Perseroan mengadakan *Public Expose*, berlokasi di BEI, Jakarta.



21 November 2014. Perseroan mengadakan *Pelatihan Risk Management*, berlokasi di Hotel Milenium, Jakarta.



21-22 November 2014. Perseroan mengadakan *Rapat Kerja Pimpinan dan Kick Off Business Plan 2015 – 2017*, berlokasi di Hotel Milenium, Jakarta.



3 Desember 2014. Perseroan mengadakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor



21-22 Desember 2014. Perseroan ikut berpartisipasi dalam *Pameran* pada acara *Pasar Keuangan Rakyat* yang diselenggarakan oleh OJK, berlokasi di Hall A & Hall D, *Jakarta International Expo Arena* PRJ Kemayoran Jakarta

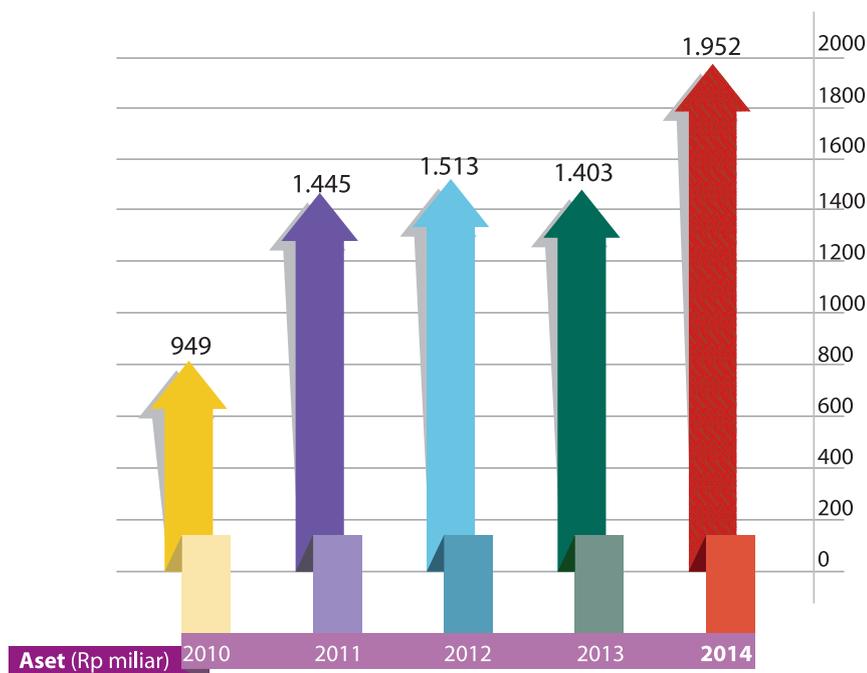
KINERJA BANK 2014

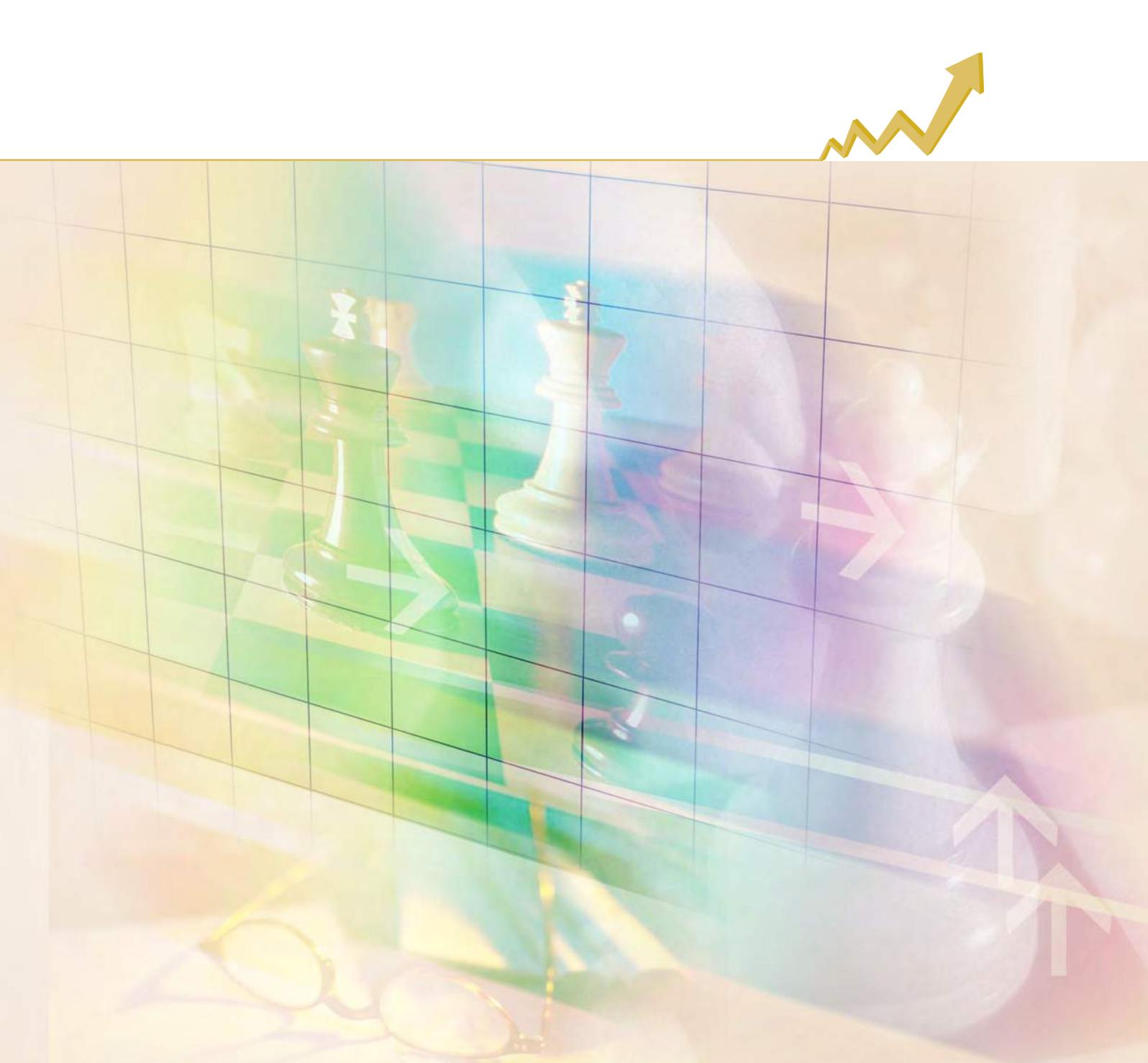
Persaingan suku bunga simpanan khususnya deposito dengan tingkat suku bunga tinggi di atas kewajaran mewarnai kinerja Bank 2014. Persaingan suku bunga dana yang tidak sehat tersebut mulai mereda pada periode triwulan IV/2014, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan membatasi suku bunga batas atas deposito nominal di atas Rp 2 miliar pada Bank Umum BUKU 3 dan BUKU 4 yang berlaku efektif 1 Oktober 2014. Bank BUKU 4 dengan suku bunga maksimal 200 bps di atas BI *rate* dan Bank BUKU 3 maksimal 225 bps di atas BI *rate*. Faktor utama lainnya yang mewarnai kinerja bank 2014 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang sudah dirasakan pada sektor riil yang merupakan debitur bank dimana telah mempengaruhi arus kas debitur sehingga pemenuhan kewajiban bank mulai terlambat serta menurunnya omzet penjualan karena lingkungan usaha mulai lesu.

Di tengah berbagai kendala dan tantangan tersebut, kinerja Bank Ina Perdana tahun 2014 yang bertemakan “Sustainable & Quality

Growth” masih menunjukkan tren meningkat baik aset, portofolio kredit, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga walaupun sedikit terjadi tren yang fluktuatif terhadap *Non Performing Loan (NPL)* sebagai suatu tantangan yang harus cepat diselesaikan, di samping meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit. Aspek likuiditas pada kondisi persaingan perhimpunan dana yang ketat, tetap mampu dikelola secara baik sepanjang tahun 2014 sehingga ketersediaan likuiditas bank mampu menopang penyaluran kredit sebagaimana tercermin pada tingkat LDR yang rendah pada akhir tahun 2014 sebesar 75,07%.

Indikasi rasio keuangan per posisi akhir Desember 2014 tetap mencerminkan pengelolaan sebagai bank sehat yaitu CAR 24,94%, ROE 5,46%, ROA 1,26%, NIM 4,71%, LDR 75,07%, NPL gross 0,80%, dan BOPO 90,08%





STRATEGI BISNIS 2014

Selama tahun 2014, Bank Ina Perdana melanjutkan strategi untuk memperkuat fondasi bisnis fungsi intermediasi dan berfokus pada pertumbuhan kredit komersial produktif (UMKM) dan segmen kemitraan strategis melalui pengembangan *wholesale banking* yaitu kegiatan dengan konsep B2B (*Business to Business*) dengan lembaga keuangan seperti multifinance, BPR, koperasi, perusahaan modal ventura, dan lembaga mikro lainnya.

Bank Ina Perdana dalam mengelola portofolio kredit senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan dalam rangka menekan tingkat kerugian, Penanganan kredit

macet dilakukan oleh unit kerja khusus yang bekerja secara fokus dan independen sehingga penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Dalam rangka penghimpunan dana masyarakat disamping pelayanan berkualitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Know Your Customer (KYC)* juga difokuskan pada pencapaian *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung pertumbuhan fungsi intermediasi Bank dan menghasilkan laba usaha yang memadai.

Bank Ina Perdana tetap berkomitmen dalam upaya mewujudkan kinerja sebagai Bank Sehat.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010
Laporan Posisi Keuangan					
Total Aset	1,951,587	1,402,171	1,512,206	1,444,742	948,787
Pinjaman yang Diberikan	1,252,750	1,052,068	1,083,551	1,127,012	598,397
Dana Pihak Ketiga :	1,626,441	1,183,101	1,327,812	1,281,927	811,444
Total Ekuitas	302,831	170,251	133,976	120,904	118,158
Laporan Laba Rugi					
Pendapatan Bunga	182,446	143,443	152,350	113,673	99,805
Pendapatan Bunga Bersih	71,939	56,853	55,839	42,948	48,549
Pendapatan Operasional Lainnya	5,647	4,536	15,533	5,306	6,150
Beban Operasional	56,944	50,369	53,460	43,695	42,181
Laba Sebelum Pajak	20,642	11,020	17,911	3,591	9,379
Laba Bersih	15,342	7,824	13,128	2,340	6,769
Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh)	7.14	5.28	10.26	1.83	53
Rasio Keuangan					
Return On Asset (ROA)	1.26%	0.80%	1.22%	0.32%	1.10%
Return On equity (ROE)	5.46%	5.35%	11.04%	1.99%	5.92%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum - Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	25.40%	17.10%	16.05%	15.20%	24.99%
Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	24.94%	16.71%	16.05%	15.05%	24.82%
Non Performing Loan (NPL) Gross	0.80%	0.39%	0.36%	1.10%	2.32%
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional	90.08%	92.46%	87.49%	98.91%	93.88%
Net Interest Margin (NIM)	4.71%	4.55%	4.07%	3.79%	6.22%
Rasio Kredit Terhadap Total Simpanan (LDR)	75.07%	87.17%	81.60%	87.92%	73.74%
Lain-Lain					
Jumlah Karyawan*	235	224	228	268	217
Jumlah Kantor*	22	22	22	22	23

*satuan sebenarnya



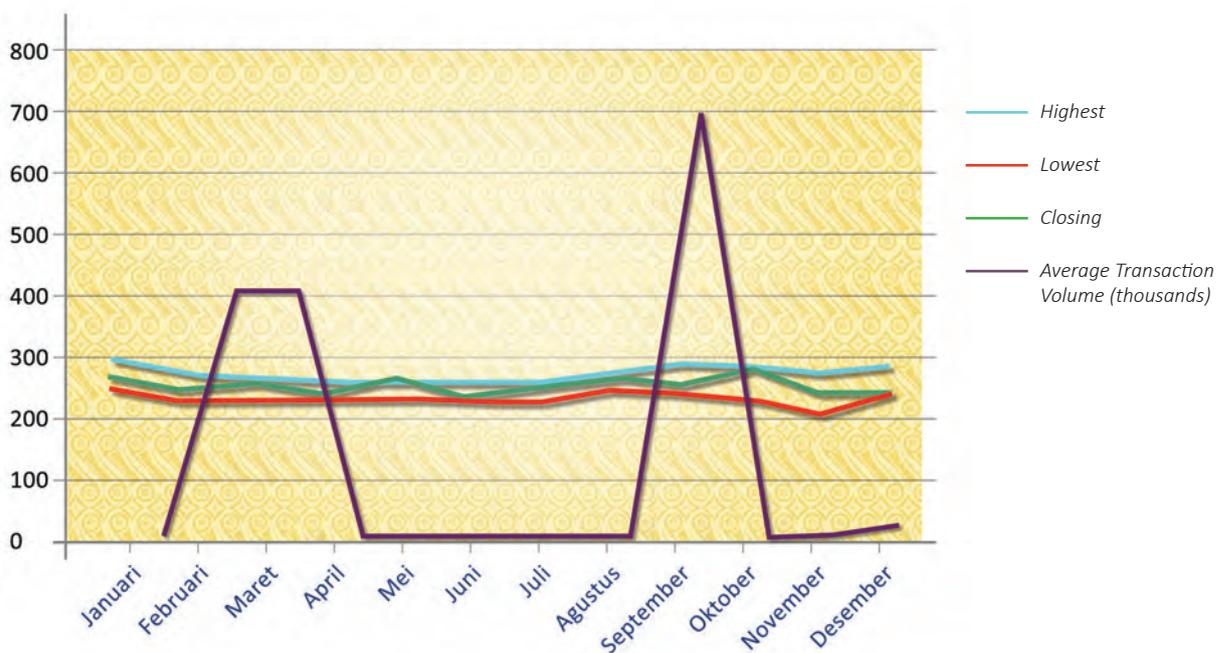
INFORMASI HARGA SAHAM

Informasi harga saham selama tahun 2014

No	Month	Quarter	Price			Average Transaction Volume (Rp)
			Highest (Rp)	Lowest (Rp)	Closing (Rp)	
1	Januari	I	290	253	268	1.697
2	Februari		273	240	251	400.192
3	Maret		268	240	260	393.465
4	April	II	265	237	250	385
5	Mei		265	241	265	3.178
6	Juni		263	239	240	244
7	Juli	III	258	235	255	40
8	Agustus		270	250	270	152
9	September		288	245	260	707.321
10	Oktober	IV	287	240	280	704
11	November		270	220	245	366
12	Desember		280	245	250	14.700
			290	220	250	1.522.444

Harga dan Volume Transaksi

Jumlah transaksi yang selama tahun 2014







BAGIAN II LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

LAPORAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



“Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan yang fokus pada penguatan penerapan Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance*, dan sistem pengendalian internal. Dewan Komisaris mendukung pengembangan bisnis yang *sustainable* dan persiapan transformasi untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan”.



Para Pemegang Saham yang terhormat,

Periode tahun 2014 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Proses pemilihan presiden secara damai dan demokrasi menyiratkan harapan baru penuh rasa optimisme menatap perekonomian di tahun-tahun mendatang, walaupun ditahun 2014 ditandai pertumbuhan ekonomi yang melambat ke tingkat 5,02% secara tahunan (*year on year*) yang merupakan pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bulan November 2014 sebesar Rp 2.000 per liter direspon oleh Bank Indonesia dengan kenaikan bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) per 19 November 2014 menjadi 7,75% yang berada di level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan BI Rate disebutkan untuk menjangkau ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi paska kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu $4 \pm 1\%$ pada tahun 2015. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan kemajuan dalam mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Bank Indonesia meyakini bahwa penguatan bauran kebijakan serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah mampu menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketahanan industri perbankan nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2014 disebutkan relatif kuat yang diindikasikan tingkat permodalan yang stabil dan relatif tinggi dikisaran 19,8%. Kinerja perbankan nasional juga masih baik, tercermin dari *Rasio Return on Asset* (ROA) mencapai 2,87%, *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,24%. Namun demikian perlu diwaspadai segi kualitas aset produktif sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik terhadap sektor riil yang dapat memicu kelesuan usaha yang akhirnya berakibat meningkatnya risiko gagal bayar

atau kredit macet. Perlambatan juga terjadi pada pertumbuhan kredit perbankan yang menurun, sebagaimana data tahun 2013 yaitu pertumbuhan kredit mencapai 21,94% secara *year on year* dengan pertumbuhan ekonomi tercatat 5,58%, sedangkan tahun 2014 menurun signifikan hanya tumbuh 11,4% dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%.

Di tengah berbagai tantangan eksternal tersebut, Dewan Komisaris mencatat upaya konsistensi pengelolaan bank berdasarkan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian, dan *Risk Management*. Kinerja tahun 2014 menunjukkan kinerja positif dan lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2013. Kredit tumbuh sebesar 19,08% mencapai Rp 1.253 miliar, dengan rasio NPL gross yang relatif rendah sebesar 0,80%. Di tengah sengitnya persaingan penghimpunan dana masyarakat, simpanan tumbuh 37,47% mencapai Rp 1.626 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.183 miliar. Rasio Pinjaman Atas Simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* pada level 75,07%, sedangkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 24,94% di akhir 2014. Untuk tahun buku 2014, Bank Ina Perdana meraih laba bersih sebesar Rp 15,34 miliar, meningkat signifikan sebesar 96,09% dibandingkan tahun 2013 yang mencatat laba bersih sebesar Rp 7,82 miliar.

Selama tahun 2014 yang penuh dengan dinamika tersebut, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik. Dewan Komisaris senantiasa memberikan perhatian pada penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik untuk dapat mewujudkan penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara berkala, Dewan Komisaris menilai kecukupan dan efektivitas dari fungsi pengendalian internal dan kerangka pengelolaan risiko agar tetap terkendali. Dewan Komisaris



mendukung pelaksanaan proses transformasi yang merefleksikan persiapan Bank Ina Perdana untuk memperkuat struktur organisasi serta memperluas layanan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

Kami melihat tahun 2015 kondisi perekonomian masih belum kondusif dan belum pulih kembali pada semester pertama tahun 2015. Diharapkan pada semester berikutnya pemulihan akan mulai membaik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja Bank Ina Perdana.

Sebagai penutup, mewakili jajaran Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi kepada Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan atas pencapaian kinerja yang baik sepanjang tahun 2014. Diharapkan seluruh insan Bank Ina Perdana untuk meningkatkan semangat, dedikasi, dan kerjasama tim di tahun 2015 untuk menghadapi berbagai tantangan dengan dinamika yang tinggi seiring dimulainya proses transformasi. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* dan nasabah atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan.

Jakarta, 20 April 2015

Birawa Natapradja

Komisaris Utama
(Independen)



DBX

657.08

-0.05%

-0.3

FINANCE

581.65

0.16%

0.92

 BANK INA

BINA

PT Bank Ina Perdana Tbk

260

8.33%

20



“Proses transformasi untuk meningkatkan daya saing bank di era layanan *digital banking* dengan mewujudkan organisasi yang kuat dan fondasi yang kokoh untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang *sustainable* dan berkelanjutan”.



“Di tahun 2014 yang penuh tantangan, kinerja Bank Ina Perdana meraih hasil yang baik dan merefleksikan sebagai bank sehat”

Para Pemegang saham yang terhormat,

Bank Ina Perdana pada tahun buku 2014 berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 15,34 miliar, meningkat tajam sebesar 96,09% dibandingkan dengan laba bersih tahun buku 2013 sebesar Rp 7,82 miliar.

Tahun 2014 menjadi tahun penuh tantangan dengan dinamika yang tinggi bagi perekonomian nasional dan industri perbankan yang diwarnai berbagai peristiwa penting seperti pemilihan presiden dengan persaingan yang sangat ketat, kenaikan BBM bersubsidi hingga 30% yang berdampak pada meningkatnya tingkat inflasi menjadi 8,36% (yoy), kenaikan bunga acuan BI pada level tertinggi mencapai 7,75%, dan volatilitas nilai tukar rupiah yang menyentuh mendekati Rp 12.244 per dollar AS pada akhir Desember 2014, atau secara rata-rata melemah sebesar 3,9% (qtq). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan mengakibatkan pertumbuhan nasional juga tumbuh melambat. Total Aset dan Kredit perbankan nasional tahun 2014 masing-masing meningkat sebesar 14,4% dan 11,9% menjadi sebesar Rp 5.511 triliun dan Rp 3.596 triliun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 13,8% dengan tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,7%.

Di sisi lain, era suku bunga tinggi di tahun 2014 tampaknya masih akan terus berlangsung pada tahun 2015 seiring sinyal Bank Indonesia yang tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat hingga tahun 2017, sehingga akan ada kecenderungan mempertahankan suku bunga acuan tinggi seperti yang berlaku saat ini dengan tujuan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan berada di level tidak sehat hingga tahun 2017. Terhadap tren perlemahan nilai tukar rupiah, otoritas moneter mengambil sikap lebih permisif terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan

demi mendukung reformasi struktural dan ekspansi belanja modal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga Bank Indonesia memperkirakan proyeksi 2015 sampai 2017, transaksi berjalan masih defisit dikisaran 3%. Pada tahun 2014, defisit transaksi berjalan pada level 2,95% atau setara nominal USD 26,28 miliar, menyempit dari tahun 2013 mencapai 3,18% atau defisit USD 29,11 miliar. Penyebab keterpurukan nilai tukar rupiah, per tanggal 27 Maret 2015 tercatat di pasar Rp 13.064 per dollar AS atau sejak awal tahun (*year to date*) rupiah sudah melemah 5,4% terhadap dollar AS, diidentifikasi oleh otoritas karena : (1) membaiknya perekonomian AS yang akan diikuti kenaikan suku bunga (*Fed Fund Rate*) mengakibatkan dollar AS menguat terhadap semua mata uang dunia; (2) kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang yang membuat mata uang mereka cenderung melemah terhadap dollar AS; (3) defisit transaksi berjalan dianggap rentan oleh investor asing karena masih pada kisaran 3%. *Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD), menyebutkan Indonesia rentan terhadap kenaikan suku bunga AS dan menganjurkan agar Bank Indonesia tetap mempertahankan moneter ketat karena Indonesia membutuhkan pendanaan eksternal (dana saing) yang mampu menggerakkan pasar finansial serta mengurangi defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu tingkat suku bunga acuan (BI Rate) yang telah diturunkan pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar 25 basis poin (BPS) menjadi 7,50% dipandang oleh pemerintah masih terlalu tinggi, masih menghambat ekspansi pelaku usaha karena bunga kredit perbankan tetap mahal dan dinilai tidak sejalan dengan cita-cita Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun bahkan target pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,7% akan sulit dicapai.



Memperhatikan berbagai kendala ketidakpastian ditahun 2014 tersebut, Bank Ina Perdana tetap fokus untuk mampu mempertahankan kinerja sebagai bank sehat melalui upaya-upaya mempertahankan kualitas aset, pertumbuhan kredit secara selektif sesuai prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, perolehan margin yang memadai, dan kecukupan likuiditas. Hasil kinerja Bank 2014 cukup mencerminkan suatu pertumbuhan positif dan profit yang meningkat tajam serta tetap dalam koridor prinsip kehati-hatian sebagaimana indikator rasio keuangan, yaitu ROA 1,26%, ROE 5,46%, NIM 4,71%, BOPO 90,08%, LDR 75,07% dan NPL Gross 0,80%. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan aset meningkat sebesar 39,18% dari Rp 1.402 miliar menjadi Rp 1.952 miliar, demikian juga dengan portofolio kredit yang meningkat sebesar 19,08% dari Rp 1.052 miliar menjadi Rp 1.253 miliar dan ditunjang peningkatan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 37,47% dari Rp 1.183 miliar menjadi Rp 1.626 miliar.

Sepanjang tahun 2014 kami telah berupaya dan mencatat banyak kemajuan dalam upaya membangun konsistensi sebagai bank yang sehat agar ke depan mampu berkelanjutan mencapai kinerja yang lebih baik lagi dan berkesinambungan. Kehadiran pemegang saham baru pasca IPO tentu membawa peluang dan perubahan lanskap yang memerlukan adanya inisiatif proses transformasi dengan tujuan akhir membangun budaya organisasi yang unggul dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Struktur organisasi yang baru nanti diharapkan mampu mewujudkan model operasi yang lebih dinamis serta dapat meningkatkan keselarasan dan kejelasan strategi yang diprioritaskan. Proses transformasi juga merumuskan visi yang baru yang dapat menggambarkan sasaran dan ambisi Bank Ina Perdana kedepan.

Kami meyakini bahwa segala upaya perubahan yang pelaksanaannya berdasarkan tata kelola perusahaan akan dapat mempertahankan keunggulan dan perkembangan Bank Ina Perdana secara sehat dan berkesinambungan serta memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan senantiasa merujuk pada praktek-praktek terbaik dan di evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang diberlakukan guna memastikan bahwa rangkaian proses setiap kebijakan bank, pengelolaan fungsi pengawasan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian.

Pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham lama yaitu PT Kharisma Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya. Kami juga menyambut kehadiran PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali baru yang saat ini masih dalam proses permohonan persetujuan OJK.

Akhirnya, atas nama manajemen Bank Ina Perdana, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan oleh *Stakeholder*, yaitu para Pemegang Saham, nasabah, karyawan, mitra usaha maupun masyarakat luas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan nasehat yang diberikan. Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat berarti bagi kami, melalui peluang sinergi yang dimiliki kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholder*.

Jakarta, 20 April 2015

Edy Kuntardjo
Direktur Utama



**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014
PT BANK INA PERDANA Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua Informasi dan Laporan Tahunan PT Bank Ina Perdana Tbk tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2015

Dewan Komisaris,

Birawa Natapradja
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris
Independen

Hari Sugiharto
Komisaris Independen

Winadewi Hanantha
Komisaris

Direksi,

Edy Kuntardjo
Direktur Utama

Kiung Hui Ngo
Direktur Operasional

Wardoyo
Direktur Kepatuhan





BAGIAN III PROFIL PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN
BIDANG USAHA
SEJARAH PERSEROAN
STRUKTUR ORGANISASI
VISI, MISI DAN LANDASAN PENCAPAIAN
STRUKTUR KELOMPOK USAHA
PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFIL DIREKSI
GROUP HEAD
PIMPINAN CABANG DAN CABANG PEMBANTU
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
NAMA & ALAMAT LEMBAGA DAN / PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PRODUK DAN JASA
JARINGAN KANTOR
KEBIJAKAN DIVIDEN
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

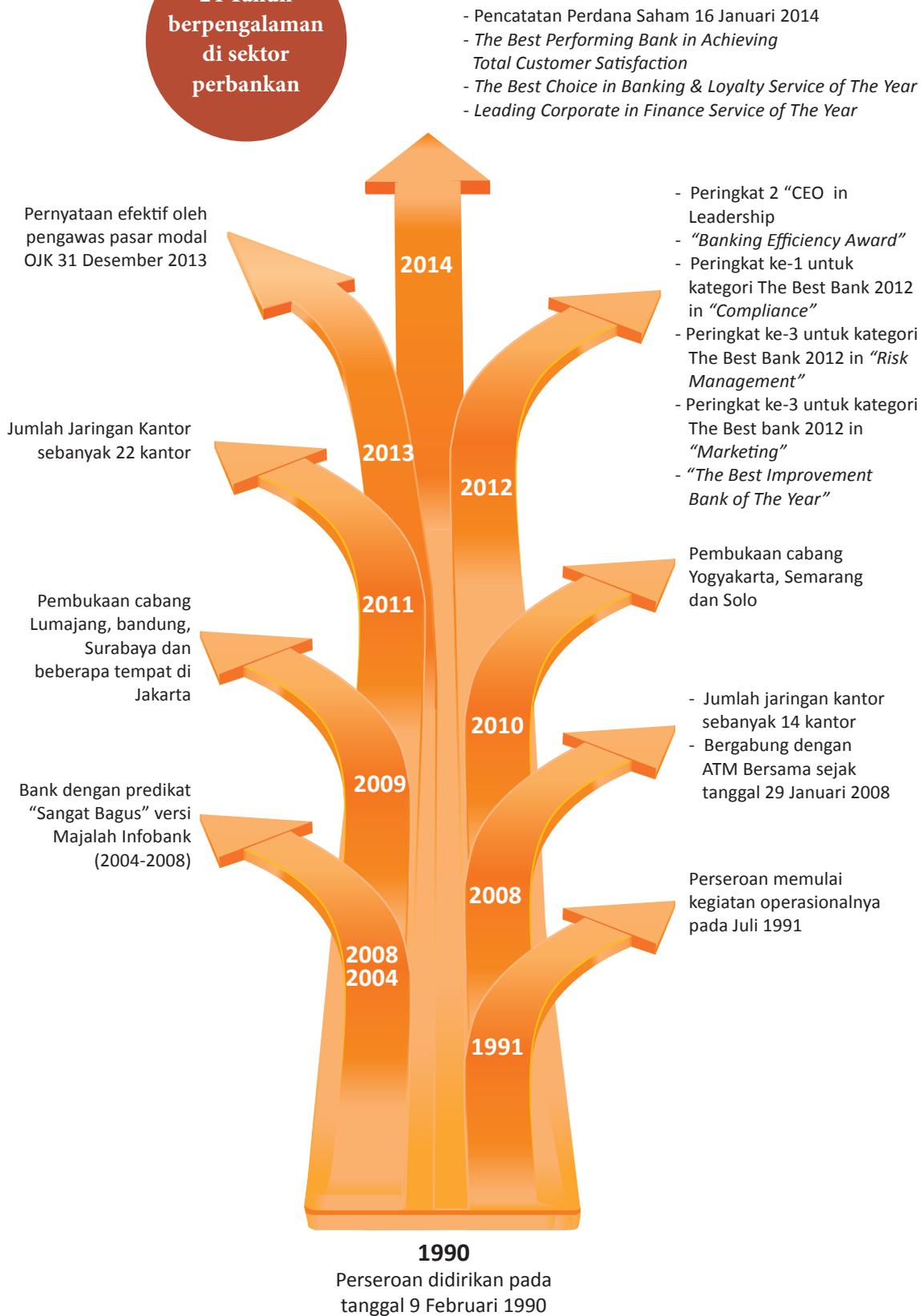
Nama Perusahaan	: PT Bank Ina Perdana Tbk
Kantor Pusat	: Wisma BSG Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160.
Akta/Tanggal Pendirian Perusahaan	: Akta No. 32 tanggal 9 Februari 1990 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3639 HT.01.01.Th. 90 tanggal 23 Juni 1990 Tanggal Februari 1990.
Nomor Surat Ijin Sebagai Bank Umum	: Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 524/kmk013/1991 tanggal 03 Juni 1991.
Perubahan Terakhir dari Anggaran Dasar	: Akta No. 31 Tanggal 09 September 2013 Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, SH., Mkn. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49437. AH. 01.02.Tahun 2013 Tanggal 23 September 2013.
Modal Dasar	: Rp 632.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp 210.000.000.000
Nomor dan Tanggal Pernyataan efektif oleh Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan	: No. S-484/D.04/2013 Tanggal 31 Desember 2013.
Pencatatan di Bursa Saham	: Saham Perusahaan Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Pada Tanggal 16 Januari 2014.
Kode Saham	: BINA
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Transferindo (sejak 1 Januari 2015 berubah nama menjadi PT Adimitra Jasa Korpora). Plaza Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13120.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Anggota Moore Stephens International Limited) Initiland Tower, 7th floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 32 Jakarta 10220.
Corporate Secretary	: Wardoyo
Telephone	: +6221 3859050
Faksimili	: +6221 3859041
Website	: www.bankina.co.id
Email	: corp_sec@bankina.co.id



Sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perseroan adalah menjadikan usaha di bidang perbankan (Bank Umum) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya dimaksud, maka Bank Ina Perdana sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya.
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan negara.
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - v. Obligasi
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan / atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

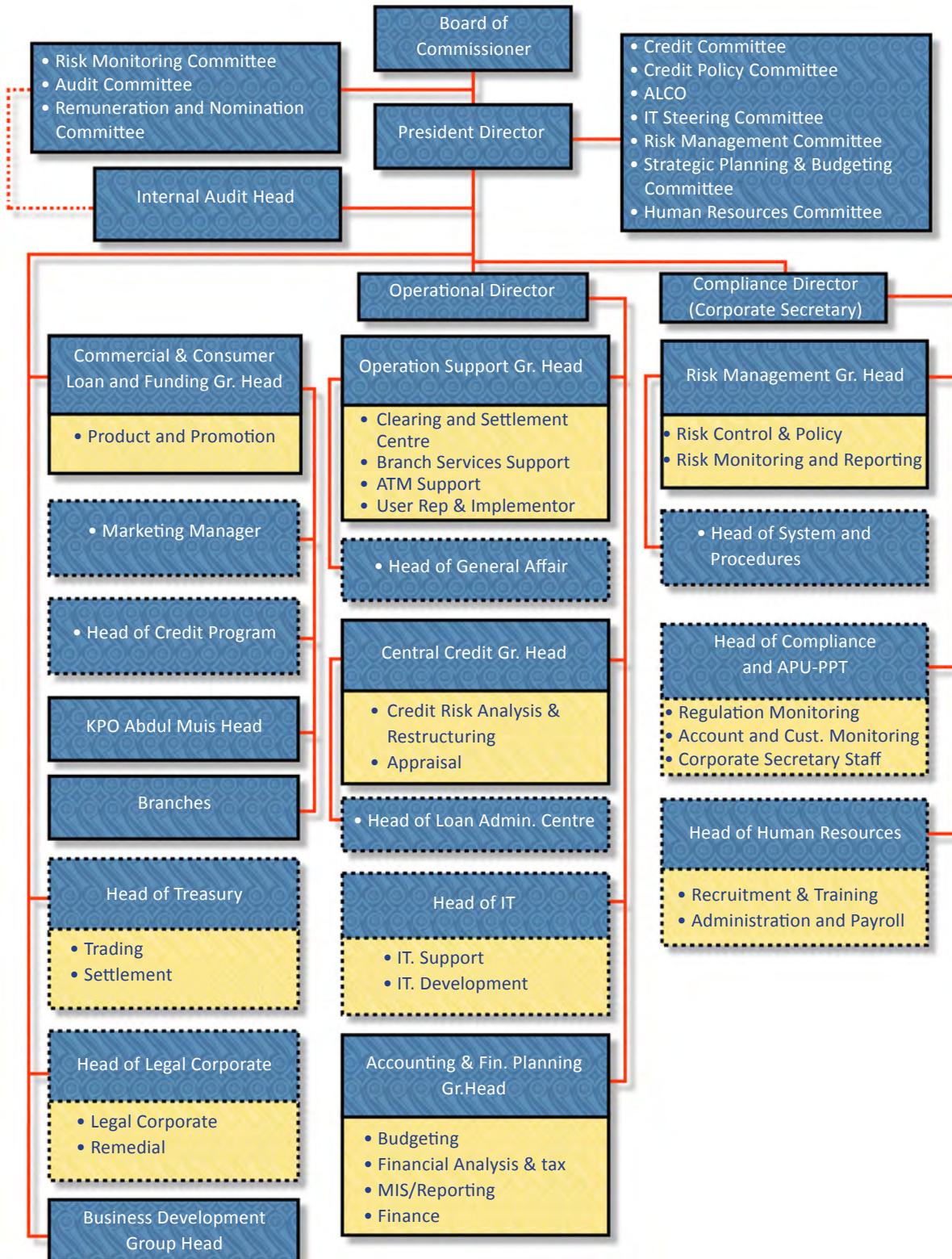
**24 Tahun
berpengalaman
di sektor
perbankan**



STRUKTUR ORGANISASI



PT. BANK INA PERDANA Tbk





Landasan Pencapaian Visi dan Misi

Empathy

Bank Ina senantiasa berusaha untuk memperhatikan kebutuhan *stakeholders* terutama nasabah; dengan pikiran dan nurani.

Enterpreneurship

Bank Ina telah menetapkan komitmennya untuk senantiasa melakukan inovasi produk dan layanan perbankan yang memberikan nilai tambah.

Empowerment

Bank Ina senantiasa berusaha memberdayakan manajemen dan staf secara terorganisasi untuk memberikan respon yang cepat bagi *stakeholders*.

Teamwork

Bank Ina senantiasa mengkoordinasikan kemampuan manajemen dan staf dengan komunikasi dan bekerjasama dalam pencapaian visi serta pelaksanaan misi.

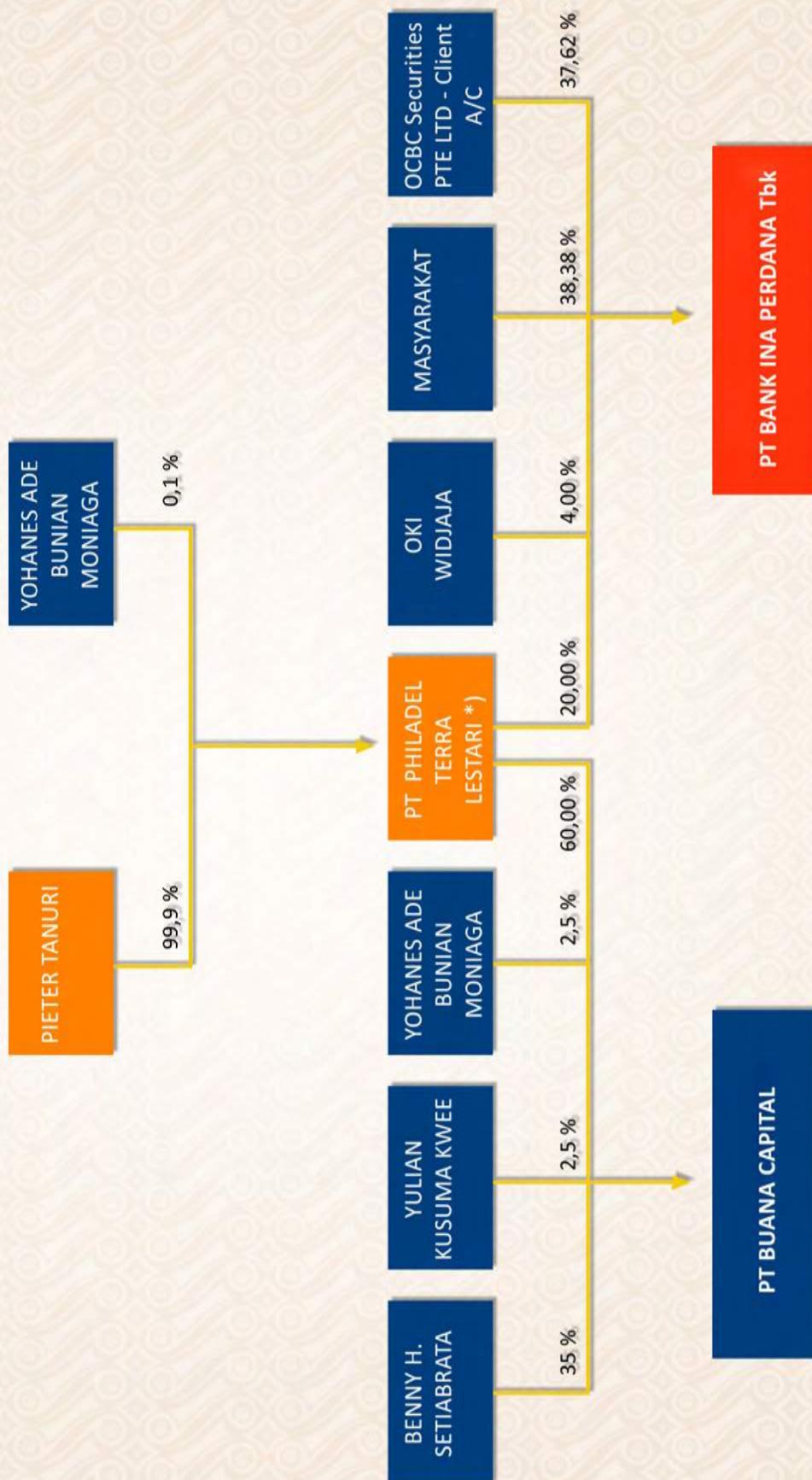
Trustworthiness

Bank Ina senantiasa membentuk karakter dan kompetensi untuk memupuk saling percaya.



STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK INA PERDANA Tbk PER 31 DESEMBER 2014

(*)Belum efektif menunggu persetujuan OJK)



Catatan : - PT. Philadel Terra Lestari dalam proses pengajuan permohonan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

- Kepemilikan OCBC Securities PTE LTD - Client A/C sebesar 37,62% adalah terdiri dari 8 nominies yang masing-masing memiliki saham < 5%.



PROFIL DEWAN KOMISARIS





Birawa Natapradja

Warga negara Indonesia. Lahir di Nganjuk, 17 September 1934. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung, pada 1965. Selain itu, berbagai kursus dan seminar mengenai perbankan telah diikuti, baik di dalam maupun luar negeri.

Mengawali karir di bidang perbankan pada 1969 bergabung dengan Bank Buana hingga 1971, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Pimpinan Cabang Surabaya. Selanjutnya, pada 1972 bergabung dengan Bank Panin sebagai Kepala Cabang Semarang hingga 1975. Kemudian bergabung dengan BCA pada 1975 hingga 1977 sebagai Kepala Cabang Semarang. Pada 1977 hingga 1986 sebagai Kepala Cabang Medan, dan pada 1986 hingga 2001 menjabat sebagai Kepala Wilayah V Sumatera Bagian

Utara. Berbagai penghargaan pernah diraih selama berkarir di BCA. Sejak 2002 sampai 2009, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Astral Permai. Pada tahun 2007 hingga 2009 beliau juga menjabat sebagai *Int'l Officer* Salim Group di Nigeria. Sejak 2010 bergabung dengan Bank Ina Perdana dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Independen.

Guna mengikuti perkembangan yang ada, berbagai pelatihan (*training*) telah diikuti. Adapun yang diikuti sepanjang tahun 2014 antara lain: Rekonstruksi Implementasi *Internal Audit* yang Sadar Risiko, *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.



Hari Sugiharto

Warga Negara Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 22 Maret 1945. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Satya Wacana pada 1971. Dari 1968 hingga 1973 tercatat sebagai Dosen di Universitas tersebut. Pada 1985-1987, melanjutkan studi di bidang perbankan di University of Wales, Inggris.

Mengawali karir di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia pada 1973. Setelah itu, sejak 1980 memegang berbagai jabatan dan bahkan beberapa masih aktif sampai sekarang adalah sebagai berikut : Sekretaris Dewan Pengawas Bank Tabungan Negara, Kepala Biro Moneter dan Jasa Keuangan Kantor Wakil Presiden RI, anggota Tim Nasional Perundingan Multilateral, anggota Tim Koordinasi

Bidang Jasa/TKBJ Departemen Keuangan RI, Anggota/Ketua Pelaksana Perundingan Bidang Jasa WTO, APEC, dan ASEAN, anggota Tim Pemantau Kebijakan Bidang Jasa pada Kantor Wakil Presiden RI, pengurus Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, pengurus Yayasan BPK Penabur, pengurus Yayasan UKRIDA, serta pengurus Dana Pensiun BPK Penabur dan Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Aktif sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Ina Perdana sejak 2001.

Guna mengikuti perkembangan yang ada, berbagai pelatihan (*training*) telah diikuti. Adapun yang diikuti sepanjang tahun 2014 antara lain: Tingkatkan LDR dan Profit Bank, *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.

Winadewi Hanantha

Warga Negara Indonesia. Lahir di Kudus, 6 Juli 1949. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan Bandung.

Memulai karirnya di bidang perbankan pada 1977 di bank Danamon, berbagai bidang pernah dijabat antara lain bidang *Accounting*, *Kredit*, *Marketing*, *Treasury* dan *Branch Banking* yang mensupervisi cabang-cabang di Indonesia. Beberapa posisi penting pernah dijabat, pada 2000 sampai dengan September 2004 sebagai Direktur Bank Hagakita, kemudian pada Oktober 2004 sampai dengan 2008 sebagai Direktur Bank Haga, selanjutnya pada 2009 bergabung dengan Bank Ina Perdana sebagai Direktur Bisnis dan saat ini dipercaya sebagai Komisaris Bank Ina Perdana.

Menyadari bahwa dunia perbankan terus berkembang secara dinamis, beberapa pelatihan terus diikuti sepanjang tahun 2014 antara lain: Kupas Tuntas Kertas Kerja atas 11 Factor *Self Assessment* GCG sebagai Elemen Penting dalam Penetapan Peringkat Komposit GCG, *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.







Edy Kuntardjo

Warga Negara Indonesia. Lahir di Banda Aceh, 22 September 1957. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan *Master of Magister Manajemen* dari STIE Perbanas, Jakarta.

Aktif mengikuti seminar dan pendidikan pada lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri, serta di berbagai organisasi, seperti Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) periode 2009-2012, serta Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Pusat sejak 2003 sampai dengan sekarang.

Mengawali karir di Bank Dagang Negara, dengan menempati berbagai posisi, seperti *Management Trainee* pada 1983-1984, *Account Officer*, serta kepala Seksi Impor/Ekspor dan Jasa Valuta Asing pada 1984 - 1989. Lalu,

bergabung dengan Bank Bintang Manunggal pada 1990 menduduki berbagai jabatan, antara lain Kepala Divisi Marketing dan Kepala *Audit Internal*, serta menjabat *Compliance Director* sejak tahun 2000. Pada akhir 2007 Bank Bintang Manunggal diakuisisi oleh Hana Bank Korea Selatan berubah nama menjadi Bank Hana dan masih menduduki jabatan sebagai *Compliance Director*. Pada 15 April 2010 beralih tugas menjadi Komisaris Independen Bank Hana. Selanjutnya, bergabung dengan Bank Ina Perdana tepatnya sejak 9 Agustus 2011 setelah lulus tes kelayakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Direktur Utama hingga saat ini.

Sepanjang Tahun 2014 telah mengikuti berbagai *training*. Adapun program *training* yang diikuti antara lain: *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.

Wardoyo

Warga Negara Indonesia. Lahir di Klaten, 17 Juli 1958. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang.

Saat ini telah memegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level V, dan aktif mengikuti berbagai seminar dan pendidikan perbankan. Selain itu, juga sempat menjadi dosen di AIP Perbanas Palembang dan Universitas Widya Gama Mahakam. Mengawali karir di perbankan pada 1982 di Bank Pacific dengan jabatan terakhir sebagai Pejabat Kepala Grup Marketing pada 1988. Kemudian pada 1991-1992 juga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai

Koordinator *Training*. Setelah itu, berkarir di PT Pandurata Bumiselaras pada 1995 sebagai *Finance Manager*, dan pada 1996-2012 di Bank Dipo Internasional dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan. Saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Ina Perdana.

Sepanjang Tahun 2014 telah mengikuti berbagai *training*. Adapun program *training* yang diikuti antara lain: *Workshop the role Corporate Secretary to Increase Company Performance*, Sosialisasi Peraturan Pencatatan dan Pelatihan IDXnet (*e-reporting*), *Workshop Great is you*, *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.



Kiung Hui Ngo

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pontianak, 30 Desember 1975. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Trisakti Jakarta dan Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, serta aktif mengikuti seminar dan pendidikan.

Mengawali karir di perbankan pada 2000 hingga 2009 sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan MIS di Bank BRI Syariah (d/h Bank Jasa Arta). Berkarir di Bank Ina Perdana sejak 2009 sebagai *System Information & Accounting*

Group Head, dan pada 2011 hingga 2013 menjadi *Accounting & Financial Planning Group Head*. Pada RUPS yang digelar pada tanggal 27 November 2013 dipercaya sebagai Direktur Operasional hingga saat ini.

Sepanjang Tahun 2014 telah mengikuti berbagai *training*. Adapun program *training* yang diikuti antara lain: Sosialisasi XBRL, *Leadership*, *Refreshment Training* Manajemen Risiko.



Aristianto Soekamto
Commercial & Consumer Loan and Funding Group Head

Meraih gelar Sarjana Keuangan dan Perbankan serta gelar Magister Bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan Indonesia (STEKPI). Mengawali karir diperbankan pada 1996 di Bank Dagang Industri, dan pernah menjadi Pemimpin Cabang di Bank Mega hingga 2007, dan Bank NISP pada 2008. Sebelum bergabung di Bank Ina Perdana pernah bekerja di perusahaan pembiayaan PT Tirtalarastama Dinamika Finance hingga 2012 sebagai Direktur. Sejak 5 Desember 2012 dipercaya sebagai *Commercial & Consumer Loan and Funding Group Head* Bank Ina Perdana.



Polmatua Sinaga
Operation Support Group Head

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Mengawali karir di perbankan pada 1991 di Bank Susila Bakti (Sekarang PT Bank Syariah Mandiri). Mulai berkarir di Bank Ina Perdana sejak 1997 di Satuan Kerja Audit Internal. Selanjutnya, pada 2000 diangkat menjadi wakil Pimpinan Cabang, lalu pada 2004 menjadi kepala Unit Loan & Deposito, dan Kepala Bagian CBO Sundries pada 2005. Setelah itu, pada 2009 dipercaya menjadi *Head of Central Operation* Jakarta. Sejak 2011 dipromosikan menjadi *Operation Support Group Head*.



Rony Hermawan
Internal Audit Head

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YKPN, Yogyakarta. Mengawali karir perbankan pada tahun 1995 di Bank Utama sebagai *Internal Auditor*. Pada 1999 bekerja di perusahaan sekuritas PT Jasabanda sebagai *Accounting Head*, pernah bekerja sebagai Pemeriksa Bank (non-organik) di Bank Indonesia dari 2001-2004. Selain itu, juga pernah berkarir sebagai *Internal Audit Head* di Bank Hana. Bergabung dengan Bank Ina Perdana pada Juni 2012 dan dipercaya sebagai *Internal Audit Head*.



Harli Gentania
Central Credit Group Head

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Memulai karir di PT Angsa Mas Perkasa sebagai *accounting staff*. Mengawali karir perbankan pada 1993 sebagai Kepala bagian Marketing di Bank Tamara. Pada 1997 ke Bank Danamon sebagai *Assistant Business Manager*, lalu sebagai Wakil Pimpinan Cabang Koordinator Bidang Marketing, dan juga sebagai *Business Manager*. Setelah itu, pada 2004 menjadi *Senior Credit Officer* pada *Regional Credit Consumer* wilayah Jakarta dan 2006 menjadi *Regional Credit Acceptance Head*- Wilayah Jakarta. Memulai karir di Bank Ina Perdana sejak 2011 sebagai *Central Credit Group Head*.



Chudori
Risk Management Group Head

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mengawali karir di PT. Asuransi Dayin Mitra sebagai *Underwriting Staff* pada tahun 1993. Karir perbankan dimulai pada tahun 1995 sebagai *Internal Audit Staff* di PT. Bank Nusa Internasional. Pada tahun 2001 hingga 2004 berkarir di Bank Indonesia sebagai Pemeriksa Bank (Non organik). Pernah menjadi Kepala Sub Inspeksi SKAI pada tahun 2005 dan Kepala SKAI Kantor Pusat mulai tahun 2006 hingga 2012 di PT. Bank Dipo Internasional yang kemudian menjadi PT. Bank Sahabat Sampoerna. Pada tahun 2012 bergabung dengan PT. Bank Ekonomi Raharja sebagai *Senior Manager Auditor Head Office* dan pada tahun 2013 hingga 01 Mei 2014 sebagai *Internal Audit Head* di PT. Bank Mayora. Sejak 05 Mei 2014 dipercaya sebagai *Risk Management Group Head* Bank Ina Perdana.



Josavia Rachman Ichwan
Business Development Group Head

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Mengawali karir perbankan di PT. Bank Arta Pusara sebagai *Account Officer* pada tahun 1989. Pada tahun 1990 melanjutkan karir di PT. Bank Dagang Nasional Indonesia hingga tahun 1998 dengan jabatan terakhir sebagai *Branch Manager* Kantor Cabang Mangga Dua. Pernah menjabat sebagai *President Direktur* PT. Multi Valas Utama pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT. Bank Ganesha sebagai *Branch Manager* Cabang Kelapa Gading, lalu pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dan menjabat sebagai *Branch Manager* Kertajaya Surabaya pada tahun 2012 hingga tahun 2013. Pada tahun 2014 bergabung dengan Bank Ina Perdana. dan dipercaya sebagai *Business Development Group Head*.

PIMPINAN CABANG DAN CABANG PEMBANTU



AGUSTINUS LISTYA
KC Abdul Muis



AGUS PRAKOSO
KC Pasar Minggu



HANA PRANATA
KC Bandung



LINDAWATI HADINATA
KC Solo



ROSDIANA
KC Yogyakarta



YOHANES HARJANTO
KC Semarang



TONNY HARSONO
KC Surabaya – Kertajaya



KRISTANTO
KC Lumajang



ANTONIUS
ANTON
KCP Jatinegara



FARIDA
HAERANI
KCP Galaxi



FRANS
LIBRAZAR
KCP Kelapa
Gading



HUSEIN
WIDJAJA
KCP Hayam Wuruk



LIDYANAWATI
LUGITO
KCP Kampus
Ukrida 2



M. Th. YULIANA
KURNIAWATI
KCP Gading Serpong
Boulevard



Mengawali Tahun Baru 2014 dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi Bank Ina Perdana (Perseroan), karena Perseroan telah mencatatkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Januari 2014. Pelaksanaan proses IPO (*Initial Public Offering*) melalui beberapa tahapan kegiatan yang cukup mengurus tenaga dan pikiran, namun dengan kerja keras dan dukungan seluruh karyawan yang mendambakan prospek kedepan yang lebih baik, seluruh tahapan kegiatan akhirnya bisa dilalui dengan baik sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Rencana pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) tersebut telah dimulai dengan mencantumkan rencana tersebut dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2015. Salah satu tahapan penting yang dilakukan dalam pelaksanaan IPO adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 9 September 2013 yang antara lain menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Menyetujui rencana penawaran saham kepada publik sebanyak-banyaknya 790 juta lembar saham.
- Menyetujui peningkatan modal Perseroan.
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham

Selain itu dalam RUPSLB juga telah diputuskan pemberian kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.

Tahap Pelaksanaan

- *Due Diligence Meeting & Public Expose Public Expose* diselenggarakan pada

tanggal 27 November 2013 di JW Marriot Hotel Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 200 tamu undangan sebagai calon investor.

- **Penawaran Saham**

Berdasarkan pernyataan efektif dari Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2013 No. S-484/D.04/2013, maka dilanjutkan proses penawaran umum saham yang dilakukan tanggal 3-9 Januari 2014 bertempat di Gedung Jasa Property, Jln. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok VIII No. 1, Jakarta Timur.

- **Penjatahan**

Dari total permintaan sebanyak 63.514.100 lembar saham adalah merupakan permintaan atas porsi pooling yang mencerminkan kelebihan permintaan 5,1 kali dari jatah pooling tersebut. Berdasarkan sistem penjatahan saham, 98% dialokasikan sebagai penjatahan pasti dan 2% dialokasikan sebagai penjatahan terpusat (pooling).

- **Refund dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia**

Jumlah *refund* (pengembalian dana pemesanan saham) sebesar Rp 12.747.384.000 sedangkan jumlah saham Bank Ina Perdana dengan kode saham BINA yang efektif dicatatkan di BEI pada tanggal 16 Januari 2014 adalah sebanyak 2.079.000.000 (dua miliar tujuh puluh sembilan juta) saham dan hingga akhir tahun buku 2014 tidak mengalami perubahan.

- Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan Keberhasilan perseroan dalam melakukan penawaran umum sebanyak 520.000.000 (lima ratus duapuluh juta) saham senilai nominal Rp 52.000.000.000 (lima puluh



dua miliar rupiah) atau 24,76% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, maka modal disetor Perseroan setelah IPO meningkat menjadi Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah). Jumlah dana yang diperoleh dari penawaran umum dengan harga penawaran Rp 240 per lembar saham atau 240% dari nilai nominal saham sebesar Rp 100 per lembar saham adalah sebesar Rp 124.800.000.000 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dari jumlah tersebut setelah dikurangi biaya penawaran umum diperoleh hasil realisasi bersih sebesar Rp 117.492.210.501.

Pelaksanaan penawaran umum saham kepada masyarakat tersebut memiliki implikasi positif terhadap penguatan permodalan yang diunjukkan oleh angka rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) meningkat sebesar 11,6% yaitu dari 16,71% pada Desember 2013 menjadi 28,31% setelah pelaksanaan penawaran saham. Terkait dengan penambahan modal tersebut, Perseroan telah melaporkan kepada regulator dengan surat No. OJK/DIR/015/0214 tertanggal 4 Februari 2014.



1. Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny,
Intiland Tower, 7th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav.32, Jakarta 10220

2. Konsultan Hukum DNC Advocates at Work
Permata Kuningan, Penthouse Floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta 12980

3. Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H, M. Kn.
Jl. Kopi No.15 Jakarta 11230

4. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo
Plaza Property Lt 2, Jl. Perintis Kemerdekaan
Komp. Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No 1, Jakarta 13120

5. *Underwriter* : PT. Buana Capital.
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 26th floor,
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190.





Penghimpunan Dana

Produk dan jasa layanan disesuaikan dengan kegiatan dan kelompok usaha Bank dengan memperhatikan segmentasi pasar serta kebutuhan nasabah. Selain itu Program promosi terus dilakukan secara inovatif dan intensif dengan memberikan suku bunga dan hadiah yang menarik yang disesuaikan dengan *event-event* yang tepat sebagai salah satu strategi pencapaian target penghimpunan dana.

Produk-produk yang dimiliki :

- A. **Tabina Perdana**, tabungan dengan tingkat suku bunga menarik ditambah dengan pilihan hadiah sesuai *point reward* yang dikumpulkan.
- B. **Tabina Eksekutif**, tabungan yang memberikan keuntungan dengan suku bunga mendekati suku bunga deposito.
- C. **Tabina Sempel**, tabungan yang dirancang untuk pelajar dan mahasiswa melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan /perguruan tinggi.
- D. **Tabungan Pinter**, tabungan yang dibuat untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, yang ditujukan untuk investasi dengan target dana, jangka waktu yang dapat dipilih secara fleksibel, ditambah dengan pemberian hadiah langsung yang menarik saat pembukaan.
- E. **TabunganKu**, tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung.
- F. **Deposito**, simpanan berjangka yang memberikan keamanan dan kenyamanan dengan tingkat suku bunga yang lebih menarik.
- G. **Rekening Giro**, rekening dengan jasa giro yang menarik serta memberikan keamanan dalam bertransaksi bisnis sehari-hari dengan menggunakan cek/ bilyet giro.



Penyaluran Dana

Penyaluran kredit yang dilakukan tetap berprinsip pada prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.

Fasilitas kredit yang ditawarkan :

1. TUNAI

- A. Kredit Investasi UKM, kredit untuk membiayai investasi di sektor usaha kecil dan menengah.
- B. Kredit Modal kerja, kredit untuk mendukung perputaran modal kerja usaha produktif
- C. Kredit Konsumsi, membiayai pembelian property, kendaraan bermotor, barang elektronik & barang konsumsi lainnya.
- D. Kredit Tanpa Agunan (KTA), memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan

dana tunai dengan suku bunga kompetitif.

- E. Kredit program (*Wholesale Banking*), penyaluran pembiayaan melalui kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan lain, seperti perusahaan pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, dan Modal Ventura.

2. NON TUNAI

Bank Garansi, untuk mendukung kelancaran usaha dengan bentuk, *Performance Bond*, *Tender Bond*, *Advance Payment Bond* dan *Bid Bond*.

Jasa Layanan Perbankan lainnya

Jasa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, optimalisasi jaringan kantor dan kemitraan dengan instansi lainnya.

- A. ATM INA, memberikan kemudahan untuk bertransaksi tunai di lebih dari 77.000 jaringan ATM Bersama maupun transfer antar bank di seluruh Indonesia. Kini ATM INA sudah dapat melayani pembelian pulsa *Hand Phone*, serta pembayaran kartu kredit.
- B. Pembayaran Tagihan PLN dan TELKOM *online* disemua kantor cabang Bank Ina Perdana.

C. Layanan *Payroll* yang memudahkan bagi perusahaan dalam administrasi pembayaran gaji.

D. Pelayanan pembayaran uang sekolah atau uang pendidikan dengan pola kerjasama dengan pihak institusi pendidikan.

E. Layanan pengambilan uang kepada institusi atau instansi tertentu.

F. *Money Changer*, layanan penukaran valuta asing untuk mata uang US Dollar, Singapore Dollar, Australian Dollar, Hongkong Dollar, Euro, dan Yen.

Kantor Pusat

- KP Abdul Muis
Wisma BSG Jl. Abdul Muis No 40
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3859050
Fax : (021) 3859041

Kantor Cabang JABODETABEK

- KC Abdul Muis
Wisma BSG Jl. Abdul Muis No 40
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3859050
Fax : (021) 3859041
- KC Pasar Minggu
Jl. Raya Pasar Minggu No 16A
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7972525
Fax : (021) 7990142
- KCP Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 2314409
Fax : (021) 2314404
- KCP Galaxi
Pertokoan Taman Galaxi Indah
Jl. Boulevard Blok G No 16
Bekasi
Telepon : (021) 8225225
Fax : (021) 82420033
- KCP Gading Serpong Boulevard
Jl. Boulevard Raya
Ruko Financial Center
Blok BA2/003 Summarecon
Serpong, Tangerang
Telepon : (021) 54210220
Fax : (021) 54210218
- KCP Kelapa Gading
Jl. Boulevard Raya Blok TN2
No 21, Jakarta Utara
Telepon : (021) 45878071
Fax : (021) 45851577
- KCP Mangga Dua
KM/23 B.O. Lantai Dasar Mall
Mangga Dua
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6120120
Fax : (021) 6120121

- KCP Jatinegara
Jl. Raya Jatinegara Timur No 68B
Jakarta Timur
Telepon : (021) 85910691
Fax : (021) 8502759
- KCP Kampus Ukrida 2
Jl. Arjuna Utara No 6
Jakarta Barat
Telepon : (021) 56972983
Fax : (021) 56972986
- KCP Komplek Suara Pembaruan
Jl. Dewi Sartika No 136D
Jakarta Timur
Telepon : (021) 80884060
Fax : (021) 80884059
- KK Kampus Ukrida 1
Jl. Tanjung Duren Raya No 4
Jakarta Barat
Telepon : (021) 5689476
Fax : (021) 5674834
- KK Kampus UKI
Jl. Mayjend Sutuyo No. 1
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8090714
Fax : (021) 8090831
- KK RS PGI Cikini
Jl. Raden Saleh No 40
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 38997782
Fax : (021) 3907302
- KK Sekolah BPK Penabur
Gading Serpong
Jl. Raya Kelapa Gading Barat,
Serpong
Telepon : (021) 54205138
Fax : (021) 54205138
- KK Sekolah Bethel Petamburan
Jl. Petamburan IV No 4
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 53679442
Fax : (021) 53670502

JAWA BARAT

- KC Bandung
Jl. Gatot Subroto No 47B
Bandung
Telepon : (022) 87340234
Fax : (022) 7320976

DIY

- KC Yogyakarta
Jl. P. Diponegoro No. 42
Yogyakarta
Telepon : (0274) 544996-8
Fax : (0274) 518375

JAWA TENGAH

- KC Semarang
Pertokoan DP Mall /
Pemuda Mas Blok A3
Jl. Pemuda No 150, Semarang
Telepon : (024) 3520868
Fax : (024) 3561739
- KC Solo
Jl. Slamet Riyadi 141-143, Solo
Telepon : (0271) 662599
Fax : (0271) 656855

JAWA TIMUR

- KC Surabaya – Kertajaya
Jl. Kertajaya No 224, Surabaya
Telepon : (031) 5055939
Fax : (031) 5020445
- KCP Surabaya - Kembang Jepun
Jl. Kembang Jepun No 96
Surabaya
Telepon : (031) 3575972
Fax : (031) 3525248
- KC Lumajang
Jl. Gatot Subroto (d/h Jl. Pelita)
No. 179, Lumajang *
Telepon : (0334) 888776
Fax : (0334) 885868

* Per tanggal 16 Februari 2015, alamat berubah menjadi Jl. PB. Sudirman No. 11A, Lumajang



Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 5 Mei 2014, dimana salah satu agendanya telah memutuskan bahwa “tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013” dimana sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib yaitu sebesar Rp 6.259.000.000 dipergunakan sebagai laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, maka sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor : Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003, Perseroan telah menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam secara triwulan sebagai berikut :

(Angka dalam jutaan rupiah)

Tanggal Laporan	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Realisasi Bersih	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	yatu
16-Apr-14 (koreksi)	IPO Saham	16 Jan'14	124.800	7.308	117.492	117.492	48.846	68.646
14-Jul-14	IPO Saham	16 Jan'14	124.800	7.308	117.492	117.492	117.696	(204)*

catatan : * Kelebihan realisasi penggunaan dana (Rp 204 juta) bersumber dari dana Perseroan.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tersebut telah sesuai dengan rencana penggunaan dana menurut Prospektus dan sesuai dengan point 6, Peraturan Nomor X.K.4 bahwa realisasi penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014.



BAGIAN IV ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

PEREKONOMIAN INDONESIA 2014
KINERJA PERBANKAN NASIONAL 2014
KINERJA BANK 2014



Perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejala eksternal karena akumulasi modal domestik kurang memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi stabilitas keuangan tidak terlepas dari pengaruh dinamika eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, sistem keuangan dihadapkan pada tantangan resiko yang berasal dari ketidakpastian pemulihan ekonomi global, rencana normalisasi kebijakan suku bunga *The Fed*, dan ketidakseimbangan sektor keuangan dengan sektor ekonomi global yang berpotensi mendorong terjadinya pembalikan arus modal asing secara tiba – tiba juga turut mempengaruhi kondisi keuangan Indonesia. Sedangkan sisi domestik, tantangan sistem keuangan terutama berasal dari perlambatan pertumbuhan domestik, peningkatan utang luar negeri, dan peningkatan risiko kredit.

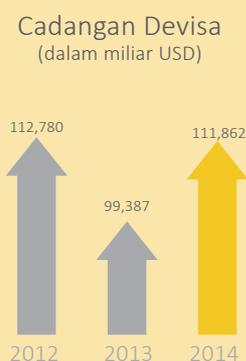
Pertumbuhan ekonomi domestik sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perlambatan sejak triwulan II/2011 secara terus menerus dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit perbankan. Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 6,17% dan kredit tumbuh 22,55%. Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,03% dan pertumbuhan kredit juga menurun menjadi 22,96%. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,58% dengan pertumbuhan kredit yang melambat sebesar 21,94%. Puncak perlambatan terjadi pada tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02% dan pertumbuhan kredit turun drastis menjadi 11,4%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berdampak pada sektor riil yaitu terganggunya arus kas perusahaan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Dampak lanjutan adalah kelesuan usaha di sektor riil yang dapat memicu pada meningkatnya risiko gagal bayar atau kredit macet.

Sesuai data Bank Indonesia, Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV/2014 membaik dibanding triwulan sebelumnya terutama didukung oleh defisit Transaksi Berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan pada triwulan IV/2014 mencapai 6,2 miliar dolar AS (2,81% dari PDB) menurun dari defisit pada triwulan III/2014 sebesar 7 miliar dolar AS (2,99% dari PDB). Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa Indonesia pada bulan Januari 2015 meningkat menjadi 114,2 miliar dolar AS, setara 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai tukar rupiah melemah seiring dengan apresiasi dolar AS yang terjadi secara luas karena semakin



solidnya perekonomian AS mendorong penguatan dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia. Pada triwulan IV/2014, Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 3,9% (*qta*) ke level Rp 12.244 per dolar AS. Bank Indonesia memandang bahwa pergerakan nilai tukar rupiah mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan, baik melalui penurunan impor khususnya barang konsumsi maupun meningkatkan daya saing ekspor khususnya manufaktur ke depan. Sedangkan tingkat inflansi tahun 2014 tercatat 8,36% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,38% dan berada di atas sasaran inflansi $4,5 \pm 1$ %. Tidak tercapainya sasaran inflansi terutama disebabkan pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014.

Ke depan, Bank Indonesia sebagai otoritas dibidang moneter tetap mengedepankan kebijakan yang difokuskan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan di bidang moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflansi menuju sasaran dan defisit transaksi berjalan ketingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di bidang makro prudensial relaksasi ketentuan makro prudensial akan dilakukan secara selektif guna memperluas sumber – sumber pendanaan perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien.





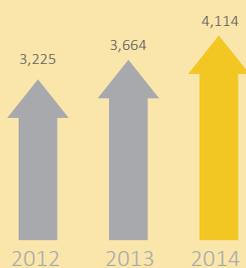
Total Aset Perbankan Nasional (dalam triliun rupiah)



Total Kredit Perbankan Nasional (dalam triliun rupiah)



Total DPK Perbankan Nasional (dalam triliun rupiah)



Kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2014 disebutkan mempunyai ketahanan yang tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) masih tinggi sebesar 19,40%, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,0%. Di sisi fungsi intermediasi pertumbuhan kredit melambat menjadi 11,4% (yoy) turun signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun 2013 sebesar 21,94%. Secara umum kinerja perbankan tetap prospektif sesuai indikator pencapaian ROA sebesar 2,87% dan NIM 4,24%. NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan *peer countries* di kawasan ASEAN.

Industri perbankan nasional ke depan menuju era layanan bank tanpa kantor atau *branchless banking* (BB) yang mempunyai potensi pasar yang besar dan jangkauan yang luas khususnya penetrasi ke daerah terpencil serta ongkos yang minim. Bank cukup menggandeng agen – agen sebagai kepanjangan tangan dalam melayani transaksi bank dari tabungan hingga kredit mikro, pembelian asuransi mikro hingga pembayaran. Program dari OJK ini juga disebut “Laku Pandai” dalam rangka akselerasi program inklusi keuangan yaitu penyediaan layanan perbankan atau keuangan melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) yang didukung penggunaan teknologi informasi. Produk tabungan berbasis *Basic Saving Account* (BSA) yang tidak mensyaratkan batas minimum, baik saldo maupun transaksi setoran tunai. Namun saldo dan transaksi tarik tunai dibatasi sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp 20 juta untuk saldo dan Rp 5 juta tarikan tunai per bulan. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya pembukaan, penutupan rekening serta transaksi. Transaksi tidak perlu datang ke kantor melainkan melalui telepon seluler dan *real time* sehingga masyarakat bisa menghemat waktu. Oleh karena itu, persaingan perbankan ke depan ditentukan segi layanan berbasis pada teknologi informasi dan lebih efisien namun diperlukan dukungan permodalan yang kuat.



LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2014 berjumlah Rp 71.939 juta, mengalami peningkatan sebesar 26,54% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 56.853 juta.

Bank Ina berhasil membukukan pendapatan bunga pada tahun 2014 sebesar Rp 182.446 juta, meningkat sebesar 27,19% dari pencapaian tahun 2013 sebesar Rp 143.443 juta. Aktivitas pemberian kredit memberikan kontribusi sebesar 88,97% dari total pendapatan bunga, sedangkan penempatan dalam surat berharga serta penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain masing-masing memberikan kontribusi sebesar 5,04% dan 5,99% dari total pendapatan bunga Bank.

Dari sisi beban bunga, peningkatan jumlah simpanan yang dikelola Bank dan tingginya suku bunga acuan BI mengakibatkan naiknya beban bunga pada tahun 2014 sebesar 27,62%, dari Rp 86.590 juta di tahun 2013 menjadi Rp 110.507 juta.

Pendapatan Operasional dan Beban Operasional Lainnya

Bank mencatatkan kenaikan sebesar 24,49% pada pendapatan operasional lainnya, dari Rp 4.536 juta di tahun 2013 menjadi Rp 5.647 juta di tahun 2014.

Untuk beban operasional lainnya, beban umum dan administrasi serta beban karyawan di tahun 2014 mengalami peningkatan 3,88% dan 13,30% menjadi Rp 28.247 juta dan Rp 25.241 juta. Selain itu, di tahun 2014 terdapat pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan sebesar Rp 3.165 juta, yang mengakibatkan biaya operasional lainnya di tahun 2014 meningkat 13,05% menjadi Rp 56.944 juta.

Laba per Saham

Laba bersih setelah pajak tumbuh 96,09% menjadi Rp 15.342 juta, dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 7.824 juta sehingga laba bersih per saham juga mengalami peningkatan dari Rp 5,28 per lembar saham di tahun 2013 menjadi Rp 7,14 per lembar saham di tahun 2014.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Total Aset

Total aset Bank Ina per 31 Desember 2014 mencapai 1.951.587 juta, meningkat sebesar 39,18% dari Rp 1.402.171 juta di tahun 2013. Hampir seluruh aktiva produktif di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Bunga Bersih

(dalam miliar rupiah)



Laba Bersih

(dalam miliar rupiah)



Laba per Saham

(Rp)





Total Aset

(dalam miliar rupiah)



Total Kredit

(dalam miliar rupiah)



Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Komposisi terbesar total aset Bank Ina pada tahun 2014 adalah kredit yang diberikan, sebesar Rp 1.252.750 juta, atau 64,19% dari total aset. Untuk menjaga likuiditasnya, Bank Ina juga melakukan penempatan pada surat berharga, penempatan pada Bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia sebagai secondary reserves. Pada tahun 2014, penempatan dana terbesar tercatat di penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 331.147 juta, meningkat 168,83% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 123.180 juta. Sedangkan investasi pada efek-efek mencatat peningkatan sebesar 98,83%, dari Rp 108.019 juta di tahun 2013 menjadi Rp 214.775 juta di tahun 2014.

Penyaluran Kredit

Secara keseluruhan, kredit Bank Ina pada tahun 2014 tumbuh 19,08% menjadi Rp 1.252.750 juta, yang terdiri dari pihak ketiga sebesar Rp 1.201.361 juta dan pihak berelasi sebesar Rp 51.389 juta. Peningkatan volume bisnis sepanjang tahun 2014 membuat porsi pemberian kredit untuk pihak ketiga menjadi 95,90%. Walaupun pertumbuhan kredit cukup besar di tahun 2014, namun penyaluran kredit tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana sepanjang tahun 2014 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit. Strategi Bank untuk mengembangkan segmen komersial produktif khususnya UMKM dan kemitraan strategis terbukti efektif untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga bersih. Kemitraan strategis dilakukan melalui kerja sama dengan konsep B2B (Business to Business) dengan Multifinance, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, Perusahaan Ventura dan Lembaga Mikro Lainnya.

Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit didominasi oleh kredit modal kerja, yaitu sebesar Rp 631.243 juta, meningkat 33,81% dari tahun 2013 sebesar Rp 471.756 juta. Sementara itu, kredit investasi meningkat dari Rp 135.094 juta di tahun 2013 menjadi Rp 323.718 juta di tahun 2014. Kredit konsumsi menurun 33,11% menjadi Rp 297.789 di tahun 2014. Sepanjang tahun 2014, Bank telah menyalurkan kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebesar Rp 486.499 juta atau mencapai 38,83% dari total kredit yang diberikan.



Kredit berdasarkan jenis penggunaan (Dalam jutaan Rupiah)	2013	2014	Pertumbuhan
Modal Kerja	471.756	631.243	33,81%
Investasi	135.094	323.718	139,62%
Konsumsi	445.218	297.789	(33,11%)
Total	1.052.068	1.252.750	19,08%

Liabilitas

Liabilitas total Bank juga mengalami kenaikan 33,84% dari Rp 1.231.920 juta di tahun 2013 menjadi Rp 1.648.756 juta di tahun 2014. Kontribusi terbesar terhadap total liabilitas Bank adalah Dana Pihak Ketiga yang meningkat cukup signifikan, dari Rp 1.183.101 juta di tahun 2013 menjadi Rp 1.626.441 juta di tahun 2014.

Komposisi simpanan nasabah terdiri dari 7,11% dalam bentuk Giro, 10,32% dalam bentuk Tabungan, dan 82,50% dalam bentuk Deposito.

Dana Pihak Ketiga (Dalam jutaan Rupiah)	2013	2014	Pertumbuhan
Giro	63.806	115.562	81,11%
Tabungan	134.337	167.941	25,01%
Deposito	984.958	1.342.938	36,34%
Total	1.183.101	1.626.441	37,47%

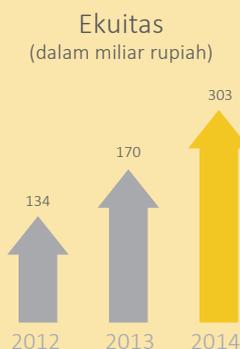
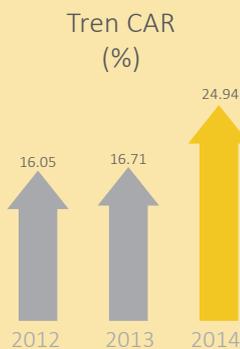
Giro mengalami peningkatan 81,11%, dari Rp 63.806 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 115.562 juta di tahun 2014. Tabungan tumbuh 25,01% dari Rp 134.337 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 167.941 juta di tahun 2014. Sementara itu, Deposito juga mengalami peningkatan 36,34%, dari Rp 984.958 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 1.342.938 juta di tahun 2014.

Penempatan dana pihak ketiga dari pihak berelasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 185.107 juta, meningkat Rp 116.709 juta dibandingkan tahun sebelumnya, terdiri dari simpanan Giro sebesar Rp 4.838 juta, Tabungan sebesar Rp 15.957 juta dan Deposito sebesar Rp 164.312.

Ekuitas

Pada tahun 2014, jumlah ekuitas Bank tercatat meningkat sebesar Rp 132.580 juta, menjadi Rp 302.831 juta dari Rp 170.251 juta di tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari dana IPO (*Initial Public Offering*) sebesar Rp 117.492





juta dan perolehan laba tahun berjalan. Proses IPO telah diselesaikan di akhir tahun 2013, namun saham Bank Ina sendiri baru dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 2014. Per akhir Desember 2014, jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh di Bank Ina adalah 2.100.000.000 lembar saham atau senilai Rp 210.000 juta, dan 1.580.000.000 lembar saham di akhir Desember 2013 dengan total nilai Rp 158.000 juta.

Arus Kas

Jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun 2014 mencapai Rp 469.594 juta, meningkat dari Rp 226.522 juta di tahun 2013. Bank Ina mengalami kenaikan arus kas bersih sebesar Rp 243.072 juta pada tahun 2014 dibandingkan penurunan arus kas bersih sebesar Rp 120.583 juta di tahun 2013, terutama disebabkan karena arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 123.579 juta dan peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 117.492 juta.

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM Bank Ina mengalami peningkatan sebesar 49,25% menjadi 24,94% pada Desember 2014 dari kisaran 16,71% pada Desember 2013, sedangkan rasio modal inti meningkat dari 15,71% pada Desember 2013 menjadi 23,96% pada Desember 2014. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya dana IPO sebesar Rp 117.492 juta yang meningkatkan jumlah modal inti. Rasio modal dan modal inti Bank Ina masih berada jauh di atas persyaratan Basel 3 yaitu KPMM minimum 8% + 2,5% (capital conservation buffer) serta modal inti minimum sebesar 6,0%.

Tabel Permodalan 2013-2014

Dalam jutaan rupiah

	2013	2014	Δ(%)
Komponen modal :			
- Modal inti	155.725	283.950	82,34
- Modal pelengkap	9.906	11.634	17,44
Jumlah modal	165.631	295.584	78,46
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) :			
- Risiko kredit	864.838	1.054.693	21,95
- Risiko pasar	22.802	21.074	7,58
- Risiko operasional	103.736	109.200	5,27
Jumlah ATMR risiko kredit, pasar dan operasional	991.376	1.184.967	19,53



Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar (%)	16,71	24,94	49,25
Rasio modal inti terhadap ATMR (%)	15,71	23,96	52,51

Imbal Hasil atas Aset & Ekuitas

Pencapaian laba bersih pada tahun 2014 membuat imbal hasil atas aset (ROA) Bank Ina pada tahun 2014 berada di level 1,26%, meningkat dibandingkan posisi tahun 2013 yang sebesar 0,80%. Demikian juga dengan imbal hasil atas ekuitas (ROE) yang meningkat sebesar 2,06% menjadi 5,46% pada tahun 2014, dibandingkan posisi tahun 2013 sebesar 5,35%.

Beban Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional Bank Ina untuk tahun 2014 adalah 90,08%, menurun bila dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar 92,46%. Pertumbuhan usaha yang meningkat cukup signifikan di tahun 2014 dan peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasional sangat mendukung perbaikan rasio BOPO di tahun 2014.

Rasio Pinjaman terhadap Simpanan

Pada 31 Desember 2014 rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) tercatat sebesar 75,07%. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,88% dibandingkan pencapaian pada akhir tahun 2013 sebesar 87,17%. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Ina yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit menyebabkan penurunan rasio ini.

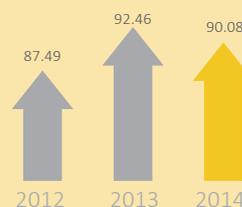
Kredit Bermasalah

Rasio kredit bermasalah – bruto pada akhir 2014 adalah 0,80%, naik dibandingkan pencapaian per akhir 2013 sebesar 0,38%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah – neto pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,61% dan 0,29%. Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai per akhir 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp 3.582 juta dan Rp 1.001 juta.

Tren ROE (%)



Bopo (%)



LDR (%)







BAGIAN V

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PENDAHULUAN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PRINSIP GCG
STRUKTUR GCG
PENERAPAN CUSTOMER DUE DILIGENCE
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
SHARE OPTION
PENYIMPANGAN INTERNAL
PERMASALAHAN HUKUM
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK
RENCANA STRATEGIS BANK
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL
UPAYA MEMPERKUAT GCG
WHISTLE BLOWING SYSTEM
LAPORAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA 2015



“Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diyakini mampu memperkuat dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, serta mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan sehingga menjamin pengelolaan Bank Ina Perdana tumbuh secara berkelanjutan”.



PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai suatu struktur dan proses sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga keseimbangan kepentingan internal dan eksternal guna mewujudkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memerlukan proses panjang yang dilaksanakan secara konsisten agar diperoleh suatu nilai yang *sustainable*. Oleh karenanya, Bank Ina Perdana terus berupaya optimal untuk melakukan implementasi prinsip-prinsip GCG ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, *prudential banking*, dan *risk management*.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan

efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT Bank Ina Perdana Tbk dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bank Ina Perdana dalam melaksanakan GCG senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam *up dating* Pedoman GCG yaitu Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum melalui penerbitan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

Adapun addendum yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Setiap penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi sebagaimana berjalan saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Sehubungan hal tersebut maka proses tersebut ditetapkan sebagai prosedur baku addendum ini.
- Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut wajib disampaikan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Sistem dan prosedur pemilihan, pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum menyebutkan bahwa



pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. rencana strategis Bank.

Bank Ina Perdana secara berkala melakukan *Self Assesment* (Penilaian Sendiri) pelaksanaan GCG dimana hasil *self assesment* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. Hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.

2. Pembentukan keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia/ OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat.
5. Pada akhir tahun 2014 Bank mampu mencatat Laba sebesar Rp 15,34 Miliar (audited). Meskipun pencapaian Laba yang ditetapkan dalam RBB tercapai 98,33% (RBB: Laba Rp 16,3 Miliar) dapat dikatakan bahwa pencapaian Laba Tahun 2014 cukup baik dimana pencapaian Laba tahun 2014 hampir 2 (dua) kali lipat dari Laba tahun sebelumnya (Laba 2013 (*Audited*) sebesar Rp 7,83 Miliar). Kebersamaan yang dibangun diantaranya melalui aktivitas *gathering* memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam pencapaian kinerja Bank hingga akhir Desember 2014.
6. Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Ina Perdana Tbk merupakan Bank dalam kategori BUKU 1, namun demikian Bank Ina mampu menunjukkan prestasi di dunia Perbankan Nasional. Di bawah kepemimpinan Bp. Edy Kuntardjo serta jajaran Pengurus lainnya, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak melakukan pembenahan mencakup banyak aspek kegiatan. Nama Bank Ina semakin menegakkan eksistensinya di dunia perbankan nasional di samping telah menjadi perusahaan "*Go Public*" pada tahun 2014, juga ditandai dengan beberapa penghargaan yang diperoleh, antara lain :
 - a. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.
 - b. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
 - 1) Peringkat 1 Kategori ***The Best Bank 2012 in "Compliance"*** Bank Umum Aset < Rp. 1 T.



- 2) Peringkat 3 Kategori ***The Best Bank 2012 in "Risk Management"*** Bank Umum Aset < Rp. 1 T.
- 3) Peringkat 3 Kategori ***The Best Bank 2012 in "Marketing"*** Bank Umum Aset < Rp. 1 T.
- c. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai ***The Best Improvement Bank of The Year 2013***.
- d. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa "Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 ***CEO in Leadership***".
- e. Pada bulan April 2014, menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category " The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014"*.
- f. Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 16 Januari 2015, Bank Ina menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader Award 2015 For Category "The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year"*.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Definisi Peringkat

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan yang ada dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Hal tersebut dipertegas surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.

2. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *Fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, dapat dilihat dengan adanya :
 - a Bank menyelenggarakan Pelatihan Strategi *Anti Fraud*, dan sebagai bentuk komitmen dari setiap peserta/karyawan maka dalam kesempatan tersebut peserta atas kesadarannya menandatangani "Deklarasi *Anti Fraud* dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan" .
 - b Dalam upaya mencegah/meminimalkan terjadinya *Fraud*, Direksi secara tertulis meminta dan memberitahukan kepada seluruh karyawan agar tidak melakukan kecurangan (*fraud*) dan konsekwensinya bila karyawan terlibat dalam *fraud*. Untuk itu di tahun 2014, Direksi menerbitkan :



1) Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Dalam Surat Keputusan Perihal Penyesuaian Gaji Tahun 2014 yang diterbitkan, semua karyawan diminta agar “ Terus meningkatkan motivasi kerja yang berintegritas dan tidak melakukan kecurangan (*fraud*)”.

2) Melalui Memorandum No. MEMO/DIR/003/0514 tertanggal 20 Mei 2014 Perihal Modus Penipuan, Direksi menyampaikan : “Setiap pembocoran atau pemberian data nasabah kepada pihak yang tidak berhak sebagai perbuatan kriminal. Disamping itu setiap karyawan dilarang meminta dalam bentuk apapun kepada nasabah/rekanan (uang, benda) yang digolongkan sebagai gratifikasi dengan sanksi pemecatan”.

3) Melalui Memorandum No. MEMO/DIR/004/0614 tertanggal 3 Juni 2014 Perihal Insentif atas pencapaian kinerja 2013, Direksi menyebut : “Diminta seluruh karyawan dapat terus meningkatkan etos kerja disertai komitmen, integritas yang tinggi dan menghindari *fraud* dalam bentuk apapun”.

4) Melalui Memorandum No. MEMO/HRS/183/0614 tertanggal 9 Juni 2014 Perihal Mencegah & Menghindari Tindakan *Fraud*, Direksi menyebut “Diminta kepada seluruh karyawan, khususnya kepala unit kerja untuk meningkatkan supervisi pada masing-masing unit kerjanya sehingga *fraud* internal dapat dihindari”.

3. Pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 bertempat di Gedung BEJ, Bank telah menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan dengan Tema “Mempertahankan Kinerja Bank Sehat Di Tengah Perlambatan Ekonomi Nasional”. *Public Expose* Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi kinerja Perusahaan Tercatat kepada masyarakat.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2014, bertempat di Hotel Millennium, Jakarta telah diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, *Core Business* Baru, Harapan Baru”. Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menyampaikan beberapa arahan penting, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengajak seluruh peserta rapat untuk secara bersama-sama mendukung kebijakan pemegang saham baru;
- 2) Mempersiapkan diri menerima perubahan dan tantangan baru dan tetap dapat menjaga semangat dalam mengelola perusahaan;
- 3) Oleh karena itu Dirut berpesan agar ego sektoral harus dihilangkan;
- 4) Direksi berkomitmen untuk membuka diri dalam membahas dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bp. Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama, juga menyampaikan arahan dan mengharapkan agar seluruh karyawan dapat bekerja lebih baik dan efisien sehingga dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Untuk itu setiap karyawan perlu membekali diri dengan semangat bekerja keras mengikuti budaya kerja investor baru

5. Sepanjang periode Laporan Bank senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

Ditengah-tengah pencapaian kinerja Bank yang terus semakin membaik, ada beberapa kejadian internal yang kurang baik. Namun patut disyukuri bahwa kejadian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang *significant* bagi Bank, yaitu :

1. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal

Dalam pelaksanaan GCG, Bank berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan kepada pihak otoritas.



Untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal secara akurat dan tepat waktu, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Keterlambatan dan/atau koreksi kembali tersebut mendapatkan perhatian dari otoritas melalui surat pembinaan dan pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda dengan total tahun 2014 sebesar Rp 41,1 juta. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2014 juga ada denda dikenakan oleh OJK sebesar Rp 5.200.000 namun hingga akhir tahun 2014 belum didebet oleh OJK.

Evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan telah dilaksanakan oleh Bank sehingga diharapkan tidak terulang kembali.

2. Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Prinsip *Know Your Employee (KYE)* yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya *fraud* telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. Dalam tahun 2014 terjadi Penyimpangan Internal namun nilainya tidak *significant* dan berkat deteksi dini yang telah dilakukan oleh Bank, penyimpangan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kerugian secara material dan kerugian yang terjadi dapat diperoleh kembali.

Fraud yang terjadi dilakukan oleh 2 (dua) orang staff karyawan, masing-masing dengan modus :

1. Kecurangan dalam aktivitas transaksi pembelian barang.
2. Penggunaan informasi palsu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman

PRINSIP GCG

Uraian singkat dari prinsip dalam pelaksanaan GCG pada PT Bank Ina Perdana Tbk, adalah sebagai berikut :

- **Keterbukaan** (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

- **Akuntabilitas** (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang

konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- **Tanggung Jawab** (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli



terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- **Independensi** (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- **Kewajaran** (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

seperti yang ditentukan oleh Otoritas sudah terpenuhi, dengan gambaran, sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. 67 % (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

- Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
- Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
- Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap

STRUKTUR GCG

DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas oleh Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Dewan Komisaris Bank Ina adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris



Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.

- Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	5	0	100
2	Hari Sugiharto	5	0	100
3	Winadewi Hanantha	5	0	100

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit



dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 - Pengaturan etika kerja;
 - Waktu kerja; dan
 - Pengaturan rapat.

Pedoman ini diaddendum dengan menerbitkan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

6. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I/2014 telah disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/002/0814 tanggal 28 Agustus 2014, sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2014 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0215 tanggal 27 Februari 2015.

Pengarahan Dewan Komisaris

Pada tanggal 22 November 2014 bertempat di Millenium Hotel, diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Thema “Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, *Core Business* Baru dan Harapan Baru” dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Dalam Acara Raker ini, Bp. Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama Independen (Komut) mewakili Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal, bahwa dengan adanya investor baru tentunya berimplikasi pada munculnya Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru dan adanya perubahan-perubahan dalam strategi dan kebijakan perusahaan. Komut berpesan bahwa untuk dapat menghadapi tantangan baru tersebut, maka setiap karyawan perlu membekali diri dengan semangat bekerja keras mengikuti budaya kerja investor baru. Diharapkan seluruh karyawan dapat bekerja lebih baik dan efisien sehingga dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Komut menekankan perlunya dibangun komunikasi yang lebih baik, keterbukaan dan kerjasama dalam bekerja.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

1. Memperhatikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 dan Peraturan No. IX.I.5 tanggal 7 Desember 2012, yang mengatur tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2014 diputuskan untuk merubah Susunan Keanggotaan Komite Audit. Perubahan tersebut dituangkan pada Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan “Komite Audit”,
2. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2014, dibahas mengenai Kinerja Bisnis Perseroan Triwulan I/2014.

Gambaran umum kinerja bisnis perseroan menunjukkan bahwa perseroan mampu mencapai target *budget* secara baik. Perseroan juga mengalami pertumbuhan bisnis yang cukup baik yang dibarengi dengan adanya perbaikan kualitas aktiva produktif. Untuk sejumlah pos tertentu terutama dana pihak ketiga perlu dilakukan upaya yang lebih optimal khususnya DPK di luar Group, disamping untuk perbaikan tingkat likuiditas yang lebih aman juga untuk lebih meningkatkan ruang yang lebih luas dalam upaya pemberian kredit yang lebih agresif dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Langkah yang dimaksud akan mendorong tingkat optimalisasi pencapaian profitabilitas yang merupakan salah satu pilar penting dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Manajemen perlu mencermati dan memperhatikan situasi kondisi market dana pihak ketiga yang masih ketat karena kondisi ekonomi makro yang belum kondusif, yang akan membawa kecenderungan Bank-bank untuk menaikkan suku bunga dana pihak ketiga yang tentunya akan berdampak pada kecenderungan Bank untuk menaikkan suku bunga kredit sehingga memiliki *impact* terhadap kecenderungan kenaikan NPL.



3. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Selasa 23 September 2014, Dewan Komisaris membicarakan tertundanya pembayaran salah satu Debitur inti yang dapat berpotensi meningkatkan rasio NPL Bank. Untuk itu Manajemen agar secepatnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah meningkatnya rasio NPL, sehingga tidak mempengaruhi pencapaian Laba dan Kinerja Bank.
4. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Selasa 3 November 2014, Dewan Komisaris meminta Manajemen untuk segera menyelesaikan penyusunan RBB 2015-2017 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. RBB harus disusun secara realistis dengan tingkat kemampuan pencapaian secara optimal juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro/nasional serta mengadopsi rencana-rencana yang bersifat strategis sesuai keinginan dan komitmen Pemegang Saham Baru, seperti rencana penambahan modal, relokasi kantor, perluasan target pasar dan rencana pengembangan infrastruktur lainnya. Sehubungan sedang berlangsungnya pemeriksaan oleh Pengawas OJK, dalam rapat tersebut diminta juga agar Manajemen senantiasa memberikan pelayanan dengan penyediaan secepatnya data yang diminta oleh Pengawas.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen dan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit" tertanggal 29 Juni 2012, dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.

Sehubungan Bank Ina telah menjadi perusahaan "Go Public" untuk itu wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, maka pada awal bulan Februari 2014 Bank menerbitkan Piagam Komite Audit yang menjabarkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit. Dalam piagam tersebut dituangkan pula berupa persyaratan untuk dapat menjadi Anggota Komite Audit. Terkait dengan ketentuan di atas, Keanggotaan Komite Audit harus disusun ulang yang tidak lagi melibatkan pihak/anggota non independen. Perubahan tersebut tertuang sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Komite Audit

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Dr. Timotius	Pihak Independen
	2. Edy Sukarno	Pihak Independen
	3. Hari Sugiharto	Komisaris Independen



Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2014 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	4	0	100
Dr. Timotius	4	0	100
Edy Sukarno	4	0	100
Hari Sugiharto	4	0	100

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara

berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 2) Pembahasan Hasil Audit KAP

Agenda rapat pada tanggal 3 Maret 2014 adalah pembahasan hasil audit oleh KAP Muli Amin, Sesi, Suryanto & Lianny untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Berdasarkan evaluasi dan penilaian atas pekerjaan KAP maka Komite menilai KAP cukup memiliki kompetensi dalam bidangnya.

- 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Dari hasil pembahasan atas pelaksanaan audit, Komite Audit membuat rekomendasi antara lain : *Auditee* diharuskan membuat laporan kepada SKAI atas setiap tindak lanjut yang telah dilakukan dengan ketentuan jangka waktu tindak lanjut maksimal 1 bulan; *Auditee* agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Kantor Pusat atas temuan yang terjadi di cabang; dan secara rutin Kantor cabang agar melakukan *review* CIF Ganda bekerja sama dengan bagian APU dan PPT Kantor Pusat.

- 4) Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode April – Juni 2014

Agar dipastikan tidak ada terjadi pelanggaran BMPK mengingat exposure kredit yang cukup tinggi di Kantor Cabang Solo; dan terhadap Rekening-rekening pasif di seluruh kantor harus dikontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan.

- 5) Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode Juli – September 2014

Saran Komite : Pengendalian intern perlu ditingkatkan; Perlu adanya pembinaan untuk seluruh kepala operasional untuk diberikan pengarahan dan peningkatan kepedulian atas tugas dan tanggung jawabnya; dan Pengaduan nasabah agar didokumentasikan dengan baik.

Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tentang



Penunjukan Keanggotaan "Komite Pemantau Risiko" tertanggal 29 Juni 2012 dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Dr. Timotius	Pihak Independen
	2. Edy Sukarno	Pihak Independen
	3. Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
	4. Winadewi Hanantha	Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh :

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	4	0	100
Dr. Timotius	4	0	100
Edy Sukarno	4	0	100
Birawa Natapradja	4	0	100
Winadewi Hanantha	4	1	75

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

1. Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

2. Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.

Profil risiko Komposit Bank dinilai dalam Peringkat 2 atau "Low to Moderate" dengan peringkat risiko *inheren* "Low to Moderate" dan peringkat kualitas manajemen risiko "Satisfactory". Risiko-risiko yang menjadi fokus perhatian yaitu :

- Risiko kredit masih terkendali dengan NPL yang rendah dan selama tahun 2014 tidak terjadi pengambilalihan AYDA namun perlu perbaikan dan prosedur kerja aktivitas kredit sehingga tidak menimbulkan risiko lain seperti risiko operasional dan risiko hukum.
- Risiko strategis membaik dengan keberhasilan Bank melaksanakan IPO sehingga menguatkan struktur permodalan Bank.
- Risiko likuiditas sampai saat ini masih terkendali seiring dengan meningkatnya reputasi Bank yang ditunjukkan dengan



meningkatnya reputasi bank yang ditunjukkan dengan stabilnya harga saham Bank di pasar modal.

- Komite telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi *anti fraud*. Terkait dengan hal ini Komite merekomendasikan agar efektivitas kontrol di seluruh kantor harus ditingkatkan dan supervisor harus memastikan validitas dan kebenaran suatu transaksi.
- Komite merekomendasikan perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelaksanaan training mengenai pemahaman SOP Operasional Bank, APU&PPT dan ketentuan yang berlaku lainnya.
- Komite juga merekomendasikan agar SKMR dan SKAI meningkatkan perannya sehingga pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh cabang dan unit-unit kerja kantor pusat dapat berjalan dengan baik.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/012/0612 tertanggal 29 Juni 2012 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Remunerasi dan Nominasi".

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman yaitu Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum melalui penerbitan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang perwakilan pegawai, yang diwakili oleh *Head of Human Resources* dan merupakan Pejabat Eksekutif Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
	2. Winadewi Hanantha	Komisaris
	3. Wenijati	Kepala Unit Kerja HRD

Sepanjang tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali diikuti oleh :



Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	7	0	100
Birawa Natapradja	7	0	100
Winadewi Hanantha	7	2	71
Wenijati	7	0	100

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya

1. Komite mengusulkan penetapan kebijakan remunerasi yang lebih baik dan berlaku untuk jangka waktu panjang (pembakuan), dengan pokok bahasan :
 - Sistim dan Komponen *Take Home Pay*.
 - Fasilitas Penunjang.
 - Pemberian penghargaan/ apresiasi/ bonus berkaitan dengan kinerja perseroan.
 - Pemberian imbal jasa purna tugas.
2. Penyesuaian gaji karyawan 2014
Komite mengusulkan Rumusan Penyesuaian gaji dengan memperhitungkan upah sundulan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR); Hasil penilaian kinerja/*Performance Appraisal* (PA); dan Standar Upah Bank Sekelas.
3. Komite menetapkan pemberian insentif kepada karyawan antara lain berdasarkan *Performance Appraisal* tahun 2013 disamping pertimbangan lainnya yaitu prestas-prestasi khusus yang telah dicapai.
4. Pemberian gaji ke-14 (tunjangan akhir tahun) bagi karyawan dan *management*, ditetapkan diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Natal dengan pertimbangan Tunjangan Hari Raya yang diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada RUPS dalam menetapkan gaji atau tunjangan kepada Anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan kepada Anggota Komisaris Perseroan.

6. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
7. Sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

DIREKSI

Susunan Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Susunan Direksi Bank Ina adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama	Jabatan
Edy Kuntardjo	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).



- Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat Bank Indonesia No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat Bank Indonesia No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas,

Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :

- Pengaturan etika kerja;
- Waktu kerja; dan
- Pengaturan rapat.

Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum dengan menerbitkan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.



Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi atas tahun buku 2013 dilakukan pada saat RUPS tanggal 5 Mei 2014 serta dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang diterbitkan oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain (Reff MEMO/DIR/003/0413 tertanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit). Dalam acara Raker tanggal 22 November 2014 Dirut meminta agar seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :
 - Dalam setiap acara Pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan oleh internal Bank, Direktur Kepatuhan senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada acara tersebut. Direktur Kepatuhan memberi arahan dan motivasi kepada karyawan baru, agar bekerja dengan baik, senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri dan selalu menjunjung kode etik dan kejujuran.

- Pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 bertempat di Mercure Hotel, Ancol – Jakarta diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema “*Commit To Sustaining & Strong Growth*” dihadiri oleh seluruh Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM khususnya bagi Pejabat Bank, maka dalam acara Raker ini diselenggarakan juga training “*Leadership Philosophy*”.

Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menyampaikan beberapa arahan penting dalam Raker tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a) Seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat, antara lain : kemampuan intelektual; determinasi; integritas; kejujuran dan inisiatif.
 - b) Setiap insan organisasi yang ada pada Bank Ina harus memiliki semangat dan pandangan yang sama bahwa “Tidak ada kepentingan pribadi (*Conflict of Interest*), semua untuk kepentingan organisasi”.
 - c) Para Pimpinan Cabang/Capem harus menjadi pimpinan yang baik, dapat memberi arahan dan pembinaan kepada bawahan. Pimpinan harus bisa menjadi contoh yang baik (*role method*) dan harus punya kualitas memimpin. Pimpinan Cabang harus menjaga kualitas pelayanan dan keamanan kantor masing-masing.
- Perayaan ulang tahun Bank Ina yang ke 23 dilaksanakan di Pulau Bali dikemas dalam bentuk acara *gathering*. Acara ini berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Juni 2014 diikuti sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) karyawan dari seluruh kantor Bank, berkumpul di satu tempat dan dapat bertatap muka secara langsung sehingga kebersamaan/ kekompakan seluruh karyawan serta rasa saling memiliki (*sense of belonging*) terhadap Bank semakin meningkat, mendorong terwujudnya sikap saling menjaga dan memelihara semua asset Bank baik yang bernilai material maupun non material (Reputasi, *Good Will*).



- Pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 bertempat di Gedung BEJ, Bank menyelenggarakan *Public Expose* dengan Tema "Memertahankan Kinerja Bank Sehat Di Tengah Perlambatan Ekonomi Nasional". Agenda Presentasi dalam *Public Expose* :

a) Sekilas Tinjauan Makro Ekonomi:

- 1) Ketidakpastian Perekonomian
- 2) Kinerja Perbankan Nasional

b) Profile Perusahaan

- 1) Visi & Misi Perseroan
- 2) Sejarah Perseroan
- 3) Dewan Komisari dan Direksi
- 4) Penghargaan Yang diterima
- 5) Jaringan Usaha
- 6) Kegiatan Usaha
- 7) *Sustainable & Quality Growth*
- 8) Strategi Pengembangan Bisnis

c) Kinerja Keuangan Bank Ina Perdana Per 30 September 2014

- 1) Fokus Memelihara Kualitas Kredit
- 2) Kualitas Portfolio Kredit
- 3) Pendanaan Berbasis Kepercayaan Dan Loyalitas

- Selanjutnya pada hari yang sama Bank menyelenggarakan juga "*Risk Management Certification Refreshment Program*" yang diikuti oleh Komisaris, Direksi, seluruh Group Head dan Kepala Unit Kerja, dilaksanakan di Hotel Millenium, Jl KH Wahid Hasyim Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang – Jakarta Pusat. Adapun acara ini merupakan Pelatihan/*Refreshment Risk Management* yang diselenggarakan oleh Bank Ina bekerjasama dengan LSPP.

- Pada tanggal 22 November 2014 bertempat di Millenium Hotel, diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tema "Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, *Core Business* Baru dan Harapan Baru". dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Dalam Acara Raker ini, Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut)

memberi pengarahan kepada Peserta Raker untuk secara bersama-sama mendukung kebijakan pemegang saham baru, mempersiapkan diri menerima perubahan dan tantangan baru dan tetap dapat menjaga semangat dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu Dirut berpesan agar ego sektoral harus dihilangkan. Dalam kesempatan ini Dirut meminta agar kedepannya pelaksanaan monitoring kredit lebih ditingkatkan; untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*, untuk itu maka aspek *internal control* dalam setiap transaksi agar ditingkatkan; penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditingkatkan mengingat bahwa sebagai Perusahaan Publik harus lebih transparan dalam melaporkan pengelolaan perusahaan; serta seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal.

6. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko; Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko. Selain Satuan Kerja dan Komite Manajemen Risiko disebut di atas, Direksi juga telah membentuk :

- Komite Kredit;
- Komite Kebijakan Kredit;
- ALCO;
- Komite *IT Steering*;
- Komite Strategi *Planning & Budgeting*;
- Komite Sumber Daya Manusia.

Selama periode laporan tahun 2014 telah diadakan 14 (empat belas) kali rapat Dewan Direksi, yang diikuti oleh :



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	7	0	100
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	7	0	100
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	7	2	71

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil SKAI ada sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Staff. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI berupa *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala SKAI dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa.

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal

telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi dengan penerbitan MEMO/DIR/003/0413 tanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut. Saat penyelenggaraan Raker tanggal 22 Nopember 2014, Dirut memberi pengarahannya dan meminta kepada Peserta Rapat khususnya semua kepala unit kerja agar seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2014 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/066/0714 tanggal 24 Juli 2014 sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2014 telah disampaikan kepada OJK melalui surat NO.OJK/DIR/020/0215 tanggal 26 Februari 2015.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI Periode Agustus 2011 s/d Juli 2014 oleh Sriyadi, Elly & Rekan Licence No.:140/KM.1/2012 telah disampaikan Kepada OJK melalui surat No.OJK/DIR/072/0914 tanggal 18 September 2014.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas



Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2014, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan risk awareness tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

Upaya meningkatkan budaya *antifraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan anti *fraud* dan anti *conflict of interest*. Pengendalian intern ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi *fraud*.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen,

dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2014 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Bank telah melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan terkait adanya Laporan yang mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali sehingga dikenakan denda oleh Otoritas, diharapkan kejadian sedemikian tidak terulang kembali.
- 2) Unit Kerja kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban



Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya". guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya. Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

- 3) Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lainnya, maka Unit Kerja Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- 4) Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh Unit Kerja Kepatuhan.
- 5) Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, dibahas dalam rapat tersendiri. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Unit Kerja Kepatuhan.
- 6) Untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan baru tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Unit Kerja Kepatuhan, dimana kemudian Unit Kerja Kepatuhan akan membuat catatan tentang hasil pemeriksaan peraturan baru tersebut pada formulir yang disebut *Quality Assurance Policy & Procedures Form (QA Policy & Procedures)*.
- 7) Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lain, diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2014, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali.

Dalam tahun 2014, Bank dikenakan denda oleh OJK sebesar Rp 41.100.000 yakni pada tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp 41.000.000 sebagai akibat Keterlambatan selama 41 hari Penyampaian kepada OJK atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Maret 2014 dan pada tanggal 4 November 2014 sebesar Rp 100.000 atas keterlambatan 1 hari penyampaian DHN oleh Kantor cabang Semarang.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2014 juga ada denda dikenakan oleh OJK sebesar Rp 5.200.000 namun hingga akhir tahun 2014 belum didebet oleh OJK.

Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

PENERAPAN CUSTOMER DUE DILIGENCE

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Perseroan berkomitmen penuh menerapkan anti TPPU, dimana dalam penerapannya, Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang pelaksanaannya diatur dalam SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Pada tanggal 27 Juni 2013, Bank telah menerbitkan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT yang terbaru yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari PBI tersebut di atas.

Dalam melakukan hubungan usaha dengan



pengguna jasa (Nasabah atau *Walk in Customer*) maka Bank melakukan Proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan Proses *Enhanced Due Diligence* (EDD). Melalui Proses CDD, Bank mengetahui kesesuaian profil nasabah atau *Walk in Customer* dan profil transaksi yang dilakukannya. Proses CDD bukan semata-mata proses pembacaan dan pencocokan data dokumen tetapi merupakan proses pengenalan Nasabah atau *Walk in Customer* secara lebih mendalam berdasarkan informasi yang tersurat dalam dokumen maupun yang tersirat yang hanya akan didapat dari proses analisa dan penggalan secara mendalam, dengan demikian kemungkinan terjadinya tindak pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dari transaksi atau aktivitas nasabah Bank dapat diketahui dan dimonitor. Bagi Calon Nasabah yang masuk dalam kriteria *High Risk*, harus terlebih dahulu melalui proses *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebelum menjalin hubungan usaha dengan Bank. Untuk itu Kantor Cabang akan menyampaikan pengajuan persetujuan penerimaan Nasabah *High Risk* kepada Direktur Kepatuhan, untuk itu Proses EDD dilakukan oleh unit kerja ACM dan selanjutnya hasil proses tersebut diajukan kepada Direktur Kepatuhan.

Selain *Teradata Banking System* (TBS) yang merupakan *Core Banking* yang dipergunakan Bank dalam pelaksanaan Program APU-PPT, Bank juga menggunakan Program Bantu dimana program dapat membantu untuk memantau nasabah, transaksi maupun data-data lain yang berkaitan dengan APU & PPT. Program ini disebut Aplikasi APU & PPT. Dengan adanya aplikasi ini maka Profil Risiko Nasabah Bank dapat lebih informatif dan teradministrasi lebih baik. Profil Risiko yang dihasilkan Aplikasi ini merupakan nilai akhir seluruh komponen maupun bobot yang telah di *set up* sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan Kategori Risiko Nasabah berupa *Low Risk*, *Medium Risk* atau *High Risk* untuk tiap-tiap Nasabah. Bagi Calon Nasabah atau Nasabah yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP atau *High Risk Business*, maka Aplikasi APU-PPT akan serta merta mengelompokkan yang bersangkutan sebagai Nasabah risiko tinggi (*High Risk*).

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan program APU & PPT, Bank secara rutin mengadakan training tentang Program APU & PPT kepada karyawan baru maupun *Refreshment* bagi karyawan yang sudah pernah

mengikuti pelatihan Program APU & PPT, disertai dengan evaluasi melalui soal-soal tertulis. Metode pelatihan dengan cara tatap muka secara interaktif dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dengan narasumber dari internal Bank. Unit kerja *Human Resources Development* (HRD) berkoordinasi dengan unit kerja *Account and Customer Monitoring* (ACM) dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dengan menyiapkan undangan, tempat, materi, sarana pelatihan dan akomodasi untuk peserta pelatihan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan.

Training APU& PPT

Periode	Peserta Training
Semester I/2014	45 Orang
Semester II/2014	69 Orang

Bank senantiasa melakukan Proses Pengkinian Data. Setiap Kantor Pemilik CIF setiap bulannya melakukan upaya pengkinian terhadap data Nasabah serta profilnya. Pengkinian data berpedoman pada Rencana Pengkinian Data yang telah dibuat masing-masing kantor, dimana CIF yang akan dikinikan diambil dari Laporan Profil Risiko yang dihasilkan oleh Aplikasi APU-PPT.

Sepanjang masa laporan, Unit kerja *Account Customer Monitoring* (ACM) secara berkala tetap melakukan pemeriksaan untuk mencari Nasabah yang diduga memiliki *Customer Identification File* (CIF) Ganda. Bilamana ditemukan ada nasabah yang diduga memiliki CIF Ganda, maka unit kerja ACM menginformasikannya kepada Kantor Cabang untuk memastikan apakah nasabah-nasabah yang memiliki kemiripan data-data tersebut adalah orang yang sama. Untuk Nasabah yang benar nyata memiliki CIF Ganda maka Kantor Cabang melakukan penggabungan CIF dan selanjutnya CIF yang sudah tidak berelasi dengan rekening segera dihapus.

Adapun tahapan kegiatan penggabungan CIF Ganda adalah sebagai berikut :

- 1) Pencarian Nasabah-nasabah yang diduga memiliki CIF Ganda.
- 2) Memastikan Nasabah yang memiliki CIF Ganda.
- 3) Penggabungan CIF untuk Nasabah yang memiliki CIF Ganda.



- 4) Penghapusan CIF yang tidak berelasi dengan Rekening (setelah penggabungan CIF ganda menjadi *single* CIF).

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/039/0912 Tanggal 05 September 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

- Ketua : Direktur Utama
Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan
Sekretaris : *Risk Management Group Head*
Anggota : - Direktur Operasional
- *Operational Support Group Head*
- *Accounting & Financial Planing Group Head*
- *Head of System & Procedures*
- *Head of Internal Audit*
- *Head of Compliance & APU-PPT*

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

KOMITE KREDIT

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0914 Tanggal 01 September 2014 Tentang Nama-nama Keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat

Tujuan Komite ini untuk penerapan pemberian kredit yang sehat yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, *four eyes principles* dan berpedoman pada kebijakan perkreditan Bank yang sehat.

No	Nama	Jabatan	Komite Kredit Kantor Pusat
1.	Edy Kuntardjo	Direktur Utama	Ketua
2.	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	Anggota Tetap
3.	Aristianto Soekamto	Commercial & Consumer Loan and Funding Group Head	Anggota Tetap
4.	Agustinus Listya S.P	Pemimpin Kantor Cabang Abdulmuis	Anggota Tidak Tetap
5.	Agus Prakoso	Pemimpin Kantor Cabang Pasar Minggu	Anggota Tidak Tetap
6.	Tonny Harsono	Pemimpin Kantor Cabang Surabaya	Anggota Tidak Tetap
7.	Hana Pranata	Pemimpin Kantor Cabang Bandung	Anggota Tidak Tetap
8.	Kristanto	Pemimpin Kantor Cabang Lumajang	Anggota Tidak Tetap
9.	Rosdiana	Pemimpin Kantor Cabang Yogyakarta	Anggota Tidak Tetap
10	Lindawati Hadinata	Pemimpin Kantor Cabang Solo	Anggota Tidak Tetap
11	Yohanes Harjanto	Pemimpin Kantor Cabang Semarang	Anggota Tidak Tetap



ALCO

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/033/0712
Tentang Penunjukan Keanggotaan *Assets & Liabilities Committee* (ALCO)

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota :
- Direktur Operasional
 - Direktur Kepatuhan
 - *Accounting & Financial Planning Group Head*
 - *Risk Management Group Head*
 - *Central Credit Group Head*
 - *Commercial & Consumer Loan & Funding Group Head*
 - *Head of Treasury*
 - *Head of Credit Program*
 - *Head of Branch Wilayah Jakarta*

Komite ini membantu Direksi dalam mengelola aktiva dan kewajiban-kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga agar Bank dapat memaksimalkan keuntungan dan terhindar dari risiko suku bunga, risiko pasar dan risiko likuiditas.

KOMITE IT STEERING

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/032/0712
Tanggal 4 Juli 2012 Tentang Penyempurnaan Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

- Ketua : Direktur Utama
- Sekretaris : *Head of IT*
- Anggota :
- Direktur Operasional
 - Direktur Kepatuhan
 - *Operational Support Group Head*
 - *Risk Management Group Head*
 - *Accounting & Financial Planning Group Head*
 - *Head of System & Procedures*

Komite *IT Steering* bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi

KOMITE STRATEGI PLANNING & BUDGETING

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/026/1109

Tentang Komite Perencanaan Strategis dan Anggaran

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : *Credit & Marketing Director*
- Sekretaris : *Accounting & System Group Head*
- Anggota :
- Direktur Kepatuhan
 - *Business Group Head*
 - *Operational Support Group Head*
 - *Risk Management Group Head*

Membantu Direksi dalam menyusun Rencana Strategis Bank dan Anggaran Perusahaan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/035/0712
Tanggal 4 Juli 2012 Tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia (*Human Resources Committee*)

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota :
- Direktur Operasional
 - Direktur Kepatuhan
 - *Head of Human Resources*

Komite bertanggung jawab memastikan keselarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan Bank dan dilaksanakan secara seksama, membantu merumuskan strategi dan kebijakan SDM dan memastikan konsistensi pelaksanaannya

AUDIT EKSTERNAL

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk, tahun buku 2013, Bank menunjuk KAP Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny yang terdaftar di Bank Indonesia dengan No 167, *Business License* No. 1219/KM.1/2011. KAP telah menyampaikan "*Laporan Final Audit Report dan Management Letter*" kepada OJK secara tepat waktu melalui surat No.461/IV/2014/GA/YW/MSSL tanggal 29 April 2014 perihal Penyampaian Laporan *Final Audit Report dan Management Letter*. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang



berlaku.

Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta No 9 tanggal 5 Mei 2014 dan atas rekomendasi Komite Audit maka untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2014, PT Bank Ina Perdana Tbk masih menunjuk KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny untuk melaksanakannya, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 2013, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki tanggungjawab utama untuk memelihara citra baik dan melindungi kepentingan INA melalui mekanisme komunikasi dan hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mendukung penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Kedudukan dan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan kedudukan setingkat Kepala Departemen.

Saat ini pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan BINA dijabat oleh Wardoyo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/010/0813 tertanggal 30 Juli 2013.

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain sbb. :

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan.

- b) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya secara tepat waktu.
 - c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
 - e) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Menjaga kerahasiaan dokumen, dan dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - f. Senantiasa menjaga integritas dengan tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan.
 - g. Mengatur pelaksanaan *corporate action* terkait dengan aspek hukum seperti ; perubahan pengurus, perubahan akta/ anggaran dasar/ anggaran rumah tangga;
 - h. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - i. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan susunan pengurus Bank (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris);
 - j. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan Pemegang Saham, Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor.
- Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2014 antara lain meliputi:
1. Menyeleenggarakan RUPS Tahunan 2014.
 2. Melaksanakan *Public Expose* Tahunan
 3. Dalam rangka transparansi dan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator, selama tahun 2014 telah dilaporkan kepada regulator laporan-laporan baik yang bersifat laporan berkala (seperti : laporan keuangan, laporan



tahunan, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan bulanan registrasi pemegang efek), maupun laporan-laporan yang bersifat insidental.(seperti: Laporan perubahan komite audit, laporan keterbukaan informasi yang perlu diketahui *public* terkait transaksi penjualan saham, laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu).

4. Mengikuti sosialisasi ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh regulator (seperti BI, OJK-Bapepam, OJK-Perbankan, Idx, KSEI).
5. Melalui koordinasi dengan unit kerja Internal terkait, melakukan *self assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester I dan Semester II tahun 2014.
6. Melaporkan kepada regulator Pelaksanaan GCG tahun 2014.
7. Melalui koordinasi dengan unit kerja internal terkait, melaksanakan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta para Pimpinan Cabang, Kepala Group dan Kepala Departemen Kantor Pusat.
8. Melalui koordinasi dengan unit kerja internal terkait, dan kerjasama dengan BPR Para Sahabat dan Dana Mandiri Sejahtera melaksanakan kewajiban program santunan berupa pemberian alat pertanian kepada para petani wanita di Desa Cisarua sebagai bentuk Tanggung Jawab Social Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG (Tata Kelola Perusahaan).

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Ina Perdana dipimpin oleh seorang kepala SKAI yaitu sdr. Rony Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/010/0612 tanggal 27 Juni 2012 dimana kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Dierktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja di lembaga keuangan baik sekuritas maupun perbankan. Karir diperbankan diawali pada tahun 1995 di bank Utama sebagai Internal Auditor, pada tahun 1999 bekerja di perusahaan sekuritas PT. Jasabanda sebagai *Accounting Head*, pernah sebagai Pemeriksa Bank (non-organik) di Bank Indonesia dari tahun 2001 - 2004, selain itu juga pernah berkarir sebagai *Internal Audit Head* di Hana Bank.

Berbagai kursus dan pendidikan yang menunjang pekerjaan telah diikuti antara lain Forensik akunting & audit investigasi, Audit Berbasis Risiko, *IT Audit* menggunakan COBIT, dan telah lulus sertifikasi Manajemen Risiko level 3, sedangkan saat ini sedang menempuh pendidikan *Magister Management*. Selain itu pada saat bekerja pada perusahaan sekuritas telah lulus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek, dan memperoleh Izin Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Perantara-Pedagang Efek dari Bapepam No.KEP 530/PM/IP/PPE/2000; tanggal 1 Desember 2000.

Kepala SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, sedangkan untuk mendukung independensi serta menjamin kelancaran tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan SKAI, maka kepala SKAI bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit diatur dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank sesuai ketentuan regulator, antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui *on site* dan *off site* audit.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tahun 2014, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan dengan cakupan kegiatan audit diarahkan untuk mendukung pencapaian target bisnis 2014, yang meliputi :

- a. Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Bank maupun ketentuan otoritas;
- b. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas fungsional, meliputi: pemeriksaan cabang – cabang termasuk cabang luar kota maupun pemeriksaan kerjasama perusahaan



multifinance, Kerjasama dengan Koperasi, Kerjasama dengan perusahaan pembiayaan lainnya, aktivitas perkreditan termasuk pemeriksaan seluruh file jaminan kredit, pemeriksaan APU dan PPT, pemeriksaan GA, pemeriksaan IT, dan Operasional dan jasa.

Oleh karena itu, *Internal Audit* merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian intern dalam menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal visi dan misi bank. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *internal control*, risk management dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. System Pengendalian Intern Perseroan, mencakup bagan organisasi, rumusan kebijakan manajemen tertulis, dan pengarahan instruktif manajemen kepada karyawan yang memperhatikan system "*check and balances*" dalam operasional secara menyeluruh untuk menjaga, melindungi kepentingan bank, masyarakat, penyimpan dana, pengguna jasa, dan *stakeholders* pada umumnya. Pengendalian Intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan maupun kewajiban bank, menyakini kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan secara disiplin.

Direksi bertanggung jawab menyelenggarakan struktur pengendalian intern secara efektif melalui fungsi Audit Intern. Pada setiap kegiatan unit kerja dari tingkatan manajemen dan supervisi harus memastikan bahwa temuan-temuan Audit Intern ada tanggapan substansial dan memperoleh wujud tindakan korektif memadai. Wewenang dan tanggung jawab akhir atas fungsi pengawasan berada pada Dewan komisaris. Melalui evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan audit intern, Dewan komisaris menugaskan dan memantau Direksi

dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit intern.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelaksanaan Pencatatan PT. Bank Ina Perdana Tbk di Bursa, diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 bertempat di Main Hall PT. Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai GF Jl. Jend. Sudirman Kav, 52 – 53. Jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham biasa dimana nilai nominal saham Rp 100 (seratus rupiah) per lembar dengan harga penawaran Rp 240 (dua ratus empat puluh rupiah) per lembar saham. Nilai Emisi yang diperoleh pada saat Listing sebesar Rp 124.800.000.000 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah). Setelah dikurangi biaya emisi saham, hasil penjualan bersih sebesar Rp 117.492.210.501 (seratus tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah) dibukukan Bank sebagai Modal Disetor sebesar Rp 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar rupiah) dan Agio Saham sebesar Rp 65. 492. 210. 501 (enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah). Dengan adanya penambahan ini, Modal Disetor Bank menjadi sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dimana sebelumnya Modal Disetor Bank sebesar Rp 158.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).



Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2014 sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) dari Biro Administrasi Efek (BAE) adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	84.030.000	Rp 8.403.000.000	4,00%
2	OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C	790.000.000	Rp 79.000.000.000	37,62%
3	PT Philadel Terra Lestari	420.000.000	Rp 42.000.000.000	20,00%
4	Masyarakat dalam penitipan kolektif PT KSEI	520.000.000	Rp 52.000.000.000	38,38%
	Total	2.100.000.000	Rp 210.000.000.000	100,00%

Di dalam komposisi Pemegang Saham Masyarakat di atas, sebagian dimiliki oleh Karyawan Bank Ina melalui Program *Employee Stock Allocation (ESA)*.

Sepanjang tahun 2014, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada memiliki saham Bank Ina, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB*)	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Edy Kuntardjo	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	0%	0%	0%	0%

Catatan :

*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua,



menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2014, disajikan sebagai berikut :

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura *)	3	1.162	3	2.737
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	3	1.162	3	2.737

Catatan :

*) Diterima secara tunai

SHARE OPTION

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2014, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Ina. Adapun kepemilikan saham ini melalui *Program Employee Stock Allocation* (ESA) dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli Saham Bank Ina pada saat pelaksanaan Penawaran Umum

Perdana Saham. Adapun tujuan Program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Sepanjang tahun 2014, tidak ada *share option* bagi Komisaris dan Direksi.

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	97.500	37.500	0	240/lbr	Lock Up 1 tahun
Total		0	0	0	N.A	N.A



RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 22,22 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,56 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,20 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,50 x

PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Prinsip *Know Your Employee* (KYE) yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya *fraud* telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip Prinsip *Know Your Employee* (KYE) yang telah

diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya *fraud* telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. Dalam tahun 2014 terjadi Penyimpangan Internal namun nilainya tidak *significant* dan berkat deteksi dini yang telah dilakukan oleh Bank, penyimpangan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kerugian secara material dan kerugian yang terjadi dapat diperoleh kembali.

Fraud yang terjadi dilakukan oleh 2 (dua) orang staff karyawan, masing-masing dengan modus :

1. Kecurangan dalam aktivitas transaksi pembelian barang.
2. Penggunaan informasi palsu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman

Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0



PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2014 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan periode yang lalu bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp 1. 419. 039. 389. yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2014 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkah antisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2015. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat dicover sepenuhnya.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pengurus Bank terdiri dari :

- Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.
- Direksi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan

dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara Training Strategi anti *Fraud* setiap peserta/ karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi Anti *Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”.

Dalam upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dalam kegiatan Penjualan Asset Bank berupa 14 (empat belas) mobil inventaris yang sudah berumur di atas 4 (empat) tahun dan rata-rata mayoritas nilai bukunya sudah habis, maka Direksi menerbitkan Surat Keputusan No. SK/DIR/014/1014 tertanggal 29 Oktober 2014, Perihal Penunjukan Panitia yang Menangani Penjualan Asset Perusahaan Berupa Kendaraan Bermotor. Panitia Lelang yang ditunjuk dapat bekerja sesuai amanat dari Direksi, dan dapat melaksanakan Kegiatan Penjualan Asset tersebut sebagaimana yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2014, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku



BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Sepanjang tahun 2014 tidak ada *buy back shares* dan sampai sejauh ini Bank ini belum pernah menerbitkan Obligasi.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2014 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah.	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Pihak Terkait	13	51.389
2	Debitur Inti	15	337.260

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut :

a) Strategi Perusahaan

- Pertumbuhan kredit berkualitas

pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.

- Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen resiko dan prosedur operasional.
- Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*.

b) Kebijakan dan strategi manajemen

- Perspektif keuangan
 - Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan *cost of fund ideal*.
 - Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).
 - Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2 %.
 - Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12 % - 14 %.
- Perspektif Pelanggan
 - Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55 % dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20 % dari total kredit.
 - Perluasan *customer base funding*, khususnya potensi di kalangan sekolah/ universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5 % - 10 %.
 - Menjalin kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan *wholesale banking* yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.
 - Meningkatkan kualitas layanan cabang



(*service excellence*).

- Perspektif Proses Bisnis Internal
 - Penguatan implementasi *Good Corporate Governance dan Risk Management*, produktivitas karyawan dan budaya anti *fraud*.
 - Perbaikan *business process*, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan *product development process*.
- Perspektif Pengembangan
 - Program pendidikan – *Officer Development Program (ODP)*.
 - Pembinaan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi assessment dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan system informasi.

Rencana Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Menengah (*business plan*)

Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 – 2016 yang diterbitkan tanggal 29 Nopember 2013.

Target Jangka Pendek (Tahun 2014)

Mempertimbangkan kinerja Bank Tahun 2013 dengan fundamental aspek prudential yang tetap baik serta diperolehnya tambahan dana dari hasil IPO, maka kegiatan usaha tahun 2014 dengan pertumbuhan bisnis lebih agresif namun tetap berpedoman pada tema “*sustainable & quality growth*” serta kesadaran penuh adanya persaingan yang semakin tajam pada penghimpunan dana maupun timbulnya kredit bermasalah sebagai dampak perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan bisnis yang dilakukan tetap berpedoman pada kecukupan infrastruktur yang didukung oleh pelaksanaan prinsip kehati-hatian, implementasi manajemen risiko dan pelaksanaan *good corporate governance*.

a) Target Finansial

- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 338,63 miliar menjadi Rp 1,54 triliun pada akhir Desember 2014, tumbuh 28% dibanding posisi akhir Desember 2013.
- Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 216,90 miliar menjadi Rp 1,32

triliun, tumbuh tumbuh 20% dari posisi proyeksi akhir Desember 2013, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) termasuk kredit kepada sektor UMKM diperkirakan mencapai 50% dari total portfolio kredit.

- Pertumbuhan total asset sebesar Rp 354,42 miliar menjadi Rp 1,85 triliun di Desember 2014.
- Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 15,64 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 74,32 miliar.
- Terbuka untuk dilakukan penambahan modal melalui *right issue* pada tahun 2014 untuk memenuhi besaran modal inti sesuai jaringan kantor yang dimiliki.

b) Target Non Finansial

- Target Bisnis
 - Pemberian kredit untuk tahun 2014 fokus ke sektor komersial dengan target 50% dari portfolio kredit, khususnya untuk pencapaian target Bank Indonesia yaitu portfolio kredit produktif Bank skala BUKU 1 sebesar 55% dari total portfolio kredit, termasuk 20% UMKM. Untuk bisnis penyeimbang berupa layanan kepada institusi atau lembaga keuangan lain yang disebut *wholesale banking* yang ditargetkan sebesar 40%. Bisnis *wholesale banking* yang sudah berjalan dan terus dikembangkan adalah kerjasama dengan Multifinance, BPR, Koperasi, dan perusahaan ventura dalam kaitan pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro produktif. Kredit untuk sektor konsumsi seperti kredit KTA, KPR, KKB, dan Kredit Multiguna ditargetkan 10%.
 - Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan modal edukasi.
 - Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank
 - Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.



- Operasional
 - Pencapaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan secara berkelanjutan pada kebijakan dan prosedurnya.
 - Memperkuat *risk control system* dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
 - Menyempurnakan kebijakan-kebijakan di bidang operasional, perkreditan, dan kepatuhan yang merupakan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka.
 - Sumber Daya Manusia
 - Melanjutkan penyelenggaraan *Officer Development Program* (ODP) untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan yang akan datang.
 - Meneruskan *updating job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
 - Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan *size* bisnisnya agar mampu mengantisipasi risiko operasional maupun risiko kredit.
 - Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi assesment, dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, segi administrasi, dan sistem informasi.
 - Lain-lain
 - Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris, dan Direksi melalui mekanisme komite-komite penunjang yang dibentuk.
 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan *system scoring* penilaian audit.
 - Melakukan relokasi kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi bisnis yang lebih baik.
 - Melakukan penambahan mesin EDC dan *signature verification* di counter, yang belum dapat direalisasi pada tahun 2013.
 - Menambah mesin-mesin ATM eksklusif pada sekolah/ universitas sebagai penunjang layanan modul edukasi.
- Target Jangka Menengah (tahun 2015 – 2016)**
- Target jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan tetap diarahkan pada perwujudan visi dan misi Bank dengan sasaran bisnis jangka panjang penyaluran kredit ke segment komersial produktif yang diimbangi segmen *wholesale banking*, dan *consumer banking*.
- Target Finansial dan Non Finansial**
- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 1,86 triliun di tahun 2015 dan menjadi Rp 2,24 triliun di tahun 2016.
 - Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp 1,58 triliun di tahun 2015, dan menjadi Rp 1,91 triliun di tahun 2016.
 - Total asset ditargetkan ditahun 2015 sebesar Rp 2,19 triliun, dan ditahun 2016 sebesar Rp 2,61 triliun.
 - Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2015, dan 2016 masing-masing diperkirakan sebesar Rp 23,61 miliar, dan Rp 31,10 miliar.
 - Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank minimal PK 2 (Sehat).
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
 - Memperluas pengenalan *corporate brand image*.
- Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik tercermin dengan upaya memperkuat struktur permodalan Bank melalui pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada Kamis tanggal 16 Januari 2014. Seiring PT Bank Ina Perdana Tbk telah tercatat di Bursa, ditahun 2014 ada beberapa kali perubahan komposisi kepemilikan Bank dan yang terakhir pada tanggal 1 Oktober 2014 dimana PT Kharisma Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi yang merupakan Pemegang Saham Pendiri telah menjual seluruh saham yang dimilikinya. Per posisi akhir Desember 2014 untuk sementara Bp. Oki Widjaja masih tercatat sebagai PSPT Bank meskipun komposisi kepemilikan



sahamnya hanya 4%, dan PT Philadel Terra Lestari walau dengan komposisi sebesar 20% sedang dimintakan persetujuan OJK untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan PSPT Bp. Pieter Tanuri. Sampai dengan Laporan ini dibuat pengajuan Permohonan PT Philadel Terra Lestari Sebagai Pemegang Saham Pengendali Baru Bank dengan Bp. Pieter Tanuri sebagai PSPT, masih dalam proses pengajuan ke OJK.

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui *Homepage* Bank serta melalui Surat Kabar Media Indonesia dan Harian Pelita.

Pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 bertempat di Gedung BEJ, PT Bank Ina Perdana Tbk telah menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan. *Public Expose* Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi kinerja Perusahaan Tercatat kepada masyarakat.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, maka pada tanggal 3 Desember 2014 Bank Ina bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Sejahtera dan BPR Dana Mandiri Bogor mengadakan kegiatan sosial di Desa Sukatani, Ciawi - Jawa Barat dengan Tema acara "Peningkatan Produktifitas Pengusaha Mikro Wanita Indonesia Melalui Pembiayaan Yang Sehat". Dalam acara tersebut, Bank memberikan bingkisan bantuan berupa 15 (lima belas) unit Alat Semprot Pembasmi Hama Merk Tasco kepada 15 (lima belas) orang Petani Sayur Mayur, dimana mereka ini merupakan kaum wanita yang tergolong pengusaha mikro wanita dan memiliki

reputasi baik sebagai nasabah BPR Dana Mandiri Bogor. Dengan adanya pemberian alat semprot tersebut, diharapkan Petani penerima bingkisan dapat meningkatkan produktifitasnya di waktu yang akan datang.

UPAYA MEMPERKUAT GCG

Media Penyebaran Informasi

Pemberian informasi yang akurat kepada *stakeholders* menjadi hal penting yang menjadi perhatian Perseroan, dan merupakan bagian penting untuk menerapkan prinsip transparansi.

Sebagai pemenuhan terhadap prinsip transparansi perusahaan terbuka, sesuai keputusan Ketua Bapepam no.63 tahun 1996 dan Keputusan Direksi BEJ no.339 tahun 2001, Perseroan telah membentuk *corporate secretary* yang memiliki peranan dan fungsi diantaranya sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat. *Corporate Secretary* berperan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan stake holder serta menjamin tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholder*, selain itu bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi yang bersifat materiil yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Penyampaian informasi disampaikan kepada otoritas melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK dan juga melalui sistem IDX.net yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.

Informasi mengenai perusahaan, dapat juga diperoleh melalui :

- **Website: www.bankina.co.id**
- **Media komunikasi antara perseroan dengan pegawai melalui berbagai fasilitas yang disediakan.**

Atau komunikasi melalui email maupun telephone sebagai berikut :

Kantor Pusat

Wisma BSG Jl. Abdul Muis No.40

Jakarta Pusat, 10160 – Indonesia

Telepon : (+62-21) 385 9050

Faksimili : (+62-21) 385 9041

Situs : www.bankina.co.id

email : corp_sec@bankina.co.id



Nilai-nilai Perusahaan

Kode Etik Perseroan merupakan salah satu wujud komitmen Insan Perseroan dalam menerapkan Budaya Perusahaan. Etika dan Perilaku mengacu pada nilai-nilai moral berdasarkan budaya perusahaan dan semangat *Good Corporate Governance*. Melalui hal itu diharapkan dapat membawa Perseroan menjadi Perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang semakin baik dan menjunjung tinggi komitmen terhadap semua pihak yang terkait.

Upaya yang dilakukan tersebut tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang *capable* dan kompeten, sehingga menjadikan Perusahaan ini mampu mewujudkan apa yang menjadi Visi dan Misi Perseroan. Kode Etik Perusahaan, Peraturan, dan Perundang-Undangan yang berlaku harus dimengerti, dipahami, disadari, dan dipatuhi sebagai wujud tanggungjawab untuk menjamin dan menjaga kesinambungan usaha.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pelaksanaan *whistle blowing* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem anti fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan pengaduan. Mekanisme penerapan *whistle blowing* dituangkan dalam kebijakan dan prosedur yang telah disosialisasikan kepada setiap pegawai sehingga secara efektif dapat memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat perusahaan untuk melaporkan terjadinya indikasi *fraud*. Pokok-pokok kebijakan dan prosedur *whistle blowing* meliputi :

1. Penyampaian Laporan. Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *whistle blower*).
2. Perlindungan bagi pelapor. Kepada karyawan atau orang yang bertindak atas nama karyawan, yang melakukan pelaporan tidak akan diberikan tindakan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi, maupun terminasi. Bank akan memberikan perlindungan penuh, baik terhadap identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor.
3. Penanganan pengaduan. Pengaduan *fraud* yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada Direktur Utama melalui

Internal Audit Group, sedangkan pengaduan *fraud* yang diduga dilakukan oleh Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris Bank melalui Internal Audit Group. Pengaduan *fraud* sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, website Bank atau sejenisnya dan email.

4. Organisasi strategi *whistle blowing*

- *Risk Management* Group bertanggung jawab atas sosialisasi pelaksanaan *whistle blowing*.
- Internal Audit Group bertanggung jawab atas pelaksanaan *Whistle Blower* yang meliputi :
 1. Membuka jalur pengaduan khusus (*hotline service*) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak internal bank (*whistle blower*)
 2. Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun *mail-box* untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi *fraud* dari pihak ekstern bank (*customer*)
 3. Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan dari *whistle blower*.
 4. Melakukan analisa dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.
- Melakukan koordinasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan adanya kejadian *fraud* dengan unit kerja lain diantaranya *Legal Corporate*, *Risk Management* Group dan Bagian Sumber Daya Manusia.
- Menyusun rencana, metodologi dan pelaksanaan surprise audit yang diadakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau minimum satu kali dalam setahun.

LAPORAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Laporan Sistem Teknologi Informasi

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) pada industri perbankan sangat diperlukan untuk mendukung proses bisnis dan operasi. Oleh karena itu, sistem teknologi informasi terus menerus



ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan bisnis dan operasional sehingga dapat mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selain itu tujuan pengembangan TI juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan peraturan baru yang diberlakukan regulator.

Melalui pengembangan yang dilakukan diharapkan kesinambungan bisnis Bank bisa terus dijaga dan dibangun. Pasalnya, selain mempermudah proses bisnis, TI yang andal juga bisa meningkatkan kepuasan pelayanan bagi para nasabah.

Pengembangan sistem TI akan dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi dan kebutuhan bagi proses bisnis.

Adapun pengembangan yang dilakukan adalah dalam bentuk penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap arsitektur aplikasi dan infrastruktur yang digunakan, sehingga *performance* dalam bertransaksi dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Dengan TI yang solid diharapkan dapat mendukung perkembangan bisnis melalui inovasi produk yang berbasis teknologi. Dengan adanya berbagai pengembangan yang telah dan akan dilakukan diharapkan mampu meningkatkan manfaat, baik bagi para pemegang saham dan kemajuan usaha Bank maupun segenap *stakeholders*.

Pengembangan Teknologi Informasi

Untuk membangun layanan dan infrastruktur TI yang dapat diandalkan, pengembangan TI senantiasa mengedepankan efisiensi biaya, serta penggunaan teknologi tepat guna, sehingga investasi atas biaya-biaya TI lebih terkontrol dan dapat memberikan kontribusi efektif kepada bisnis Bank agar semakin berkembang. Upaya pengembangan layanan yang dilakukan antara lain :

- Memperbanyak fitur pelayanan di *delivery channel* ATM untuk kemudahan nasabah, seperti penambahan fitur pembayaran tagihan kartu kredit dari beberapa bank besar dan pembelian pulsa isi ulang dari beberapa operator seluler.
- Meningkatkan *performance* jaringan agar dapat mendukung pertumbuhan volume transaksi dan mendukung produk-produk

Bank. Penyediaan cadangan jaringan sudah mulai dilakukan di tahun 2014 dan akan terus dilengkapi di tahun 2015 sebagai bentuk realisasi untuk menjaga kualitas jaringan.

- Terus melakukan evaluasi dan pengujian berkala terhadap server cadangan dalam rangka menjaga kualitas *Disaster Recovery Center* (DRC). Sistem backup pada *data center* menggunakan metode "*Hot Backup*" di mana redundansi yang dimiliki sistem DRC yang berjalan di belakang sistem *data center* (DC) secara *real time* direplikasi sehingga terdapat suatu waktu di mana sistem DC dan sistem DRC memiliki data yang identik. Pengelolaan DRC dilakukan secara langsung oleh pihak Bank.
- Senantiasa *comply* terhadap aturan-aturan regulator seperti penyempurnaan form pelaporan LBU Basel, penerapan NSICCS (*ATM Chip Card*), pengembangan SKN-Gen 2 dan RTGS-Gen 2.

Pengembangan TI diharapkan dapat menyempurnakan proses-proses yang mendukung kemudahan dan ketepatan dalam bertransaksi, proses pelaporan yang cepat, tepat dan akurat serta pengambilan keputusan yang efisien. Mendasari tujuan tersebut adalah kebutuhan untuk memastikan adanya sistem kontrol yang memadai serta sistem pengawasan risiko dan langkah mitigasi risiko yang cukup untuk menjaga integritas dan sistem TI Bank.

PROSPEK & PENGEMBANGAN USAHA 2015

Ketidakpastian masih menghadang perekonomian Indonesia tahun 2015, industri perbankan pada umumnya cenderung berhati-hati khususnya dalam menyalurkan kredit pada semester I/2015 sambil mengamati perkembangan ekonomi, kestabilan politik pemerintahan, maupun realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I/2015. Bank Indonesia sebagai pengendali di bidang moneter akan mempertahankan kebijakan bias ketat sekalipun *The Federal Reserve* mengisyaratkan pelonggaran moneter akan berlangsung lebih lama. Penurunan bunga acuan (*BI rate*) pada tanggal 17 Februari 2015 sebesar 25 basis poin menjadi 7,5% diprediksi oleh beberapa pengamat akan sulit diturunkan lagi di tengah tantangan tingginya *BI rate* yang menghambat pertumbuhan



ekonomi. Beberapa upaya oleh pemerintah dan Bank Indonesia, antara lain disebutkan : (1) Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan diakselerasi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif ; (2) BI menargetkan *real interest rate* atau selisih antara suku bunga dengan inflasi tahun 2015 sebesar 1,5%. Jika inflasi mendekati 6% diproyeksikan BI rate tetap berkisar pada level 7,5% ; (3) Proyeksi defisit transaksi berjalan tahun 2015 sebesar 3% atau masih jauh dari level sehat 2,5% ; (4) Ada dorongan langkah reformasi oleh pemerintah yaitu di bidang manajemen subsidi dengan menetapkan *fixed subsidy*, penghapusan subsidi premium dan persetujuan APBNP – 2015.

Oleh karena itu, pengembangan usaha perseroan tahun 2015 dilakukan dengan hati-hati dengan tingkat pertumbuhan penyaluran kredit sangat konservatif sebesar 10%. Pada tahun 2015

sebagai tahun dimulainya proses transformasi, lebih memfokuskan pada pembenahan/pemataan infrastruktur secara berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang, terutama terkait dengan kecukupan kuantitatif dan kualitas SDM, pelayanan berbasis IT yang kuat, serta peningkatan penerapan GCG, manajemen risiko dan prosedur operasional. Hasil kinerja Bank tahun 2015 tetap dalam koridor sesuai prinsip-prinsip *prudential banking*.



BAGIAN VI MANAJEMEN RISIKO

PENDAHULUAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PENGUNGKAPAN PERMODALAN DAN EKSPOSUR RISIKO



Pengelolaan risiko senantiasa memastikan Bank memiliki kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Alokasi modal ditempatkan pada segmen bisnis yang dapat menghasilkan *risk-return* optimal untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder*.

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi Bank Ina setelah berhasil melakukan penambahan modal melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 16 Januari 2014 yang diikuti pula dengan penjualan saham pendiri kepada investor baru. Perubahan tersebut akan mengubah Pemegang Saham Pengendali Bank (PSP) yang sampai saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan status sebagai perusahaan terbuka Bank dituntut untuk dapat lebih meningkatkan tata kelola yang lebih baik terutama dalam penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu pengelolaan risiko melalui permodalan akan diselaraskan dengan rencana strategi jangka panjang serta alokasi pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal agar dapat memenuhi ekspektasi *stakeholder*.

Sebagai perusahaan publik, Bank Ina telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Keberhasilan Bank Ina menjadi perusahaan publik pada tahun 2014 juga tak luput dari keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dan

efektivitas manajemen risiko Bank.

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Bank Ina mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP yang telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP, dimana pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis Bank. Penerapan Manajemen Risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian Intern yang menyeluruh.

a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank Ina. Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan serta melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif dan mengembangkan budaya manajemen risiko. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b) Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank



Ina dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kerangka kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Setiap tahun kebijakan pengelolaan risiko dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM dan *risk appetite* yang akan diambil. Kebijakan tersebut telah dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal serta memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan terutama pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

c) Proses Identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya terhadap Bank. Sementara itu pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio transaksi maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

Pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh *Risk Management Group*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d) Sistem Pengendalian Intern

Proses penerapan Manajemen Risiko dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Setiap aktivitas operasional di Bank Ina berpedoman pada standar kebijakan dan prosedur yang didalamnya telah melekat sistem pengendalian internal yang memadai.

Seluruh Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Pendukung serta *Internal Audit Group* bertanggungjawab terhadap terselenggarakannya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif. Efektivitas pengendalian internal unit kerja dikaji ulang secara berkala oleh *Internal Audit Group*.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi 8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko dilakukan oleh Unit Kerja *Risk Management* yang independen terhadap Unit Kerja Operasional maupun Unit Kerja Audit Intern. Sedangkan setiap Unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas yang dilakukannya.

Gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi Bank diperoleh dari proses Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap jenis risiko, yang pelaksanaan penilaiannya telah mengikuti standar yang berlaku.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Bank Ina, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar Bank, serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Sampai dengan saat ini sumber utama pendapatan Bank Ina masih bersumber pada pendapatan dari



aktivitas penyaluran kredit.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah. Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Bank dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat di-*recovery* secara optimum sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan.

Proses analisa permohonan kredit dilakukan oleh Unit Kerja *Credit Reviewer* yang independen terhadap Unit Bisnis. Pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota Komite Kredit yang dapat memutuskan sendiri suatu permohonan kredit. Selain menatausahakan dokumen perkreditan, Unit Kerja Administrasi Kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan *covenant* yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Proses pencairan dilakukan Unit Kerja Operasional atas instruksi dari Unit Kerja Administrasi Kredit setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang bekerja secara fokus dan independen. Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing segmen kredit dan penguasaan bank atas segmen yang dimasuki. Segmentasi ini berpengaruh pada kebijakan Bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit dan kewenangan memutuskan kredit. Perumusan kebijakan dalam bidang perkreditan dibahas dalam Komite Kebijakan Perkreditan Bank.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi

derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditi. Penerapan Manajemen Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit Kerja *Treasury* dan Komite ALCO. Sedangkan kebijakan dan penetapan limit risiko dilakukan oleh *Risk Management Group* sebagai unit kerja yang independen.

Sebagai Bank non devisa dan memiliki portofolio *trading book* yang relatif kecil, Bank Ina Perdana tidak terekspos risiko pasar secara signifikan. Risiko Pasar lebih bersumber pada risiko suku bunga pada portofolio *Banking Book*, yang menjadi fokus untuk dikendalikan. Kepemilikan eksposur *Trading Book* hanya ditujukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas jangka pendek dan tidak ditujukan untuk pembentukan pasar dengan instrumen keuangan berupa Obligasi yang likuid di pasar. Proses *mark to market* terhadap eksposur *trading book* dilakukan secara harian yang dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengendalian risiko suku bunga pada *Banking Book* dilakukan dengan mengendalikan *gap repricing asset-liabilities Bank* pada tiap skala waktu. Pengaturan *gap repricing* ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada rapat bulanan ALCO. Tujuannya adalah agar *gap-repricing* ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar. Unit kerja *Treasury* bertanggungjawab atas pengaturan *gap repricing* dengan memperhatikan *gap limit* yang dikeluarkan oleh *Risk Management Group*. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit kerja *Treasury*.

Sementara itu risiko nilai tukar hanya terjadi pada aktivitas *money changer* dengan jumlah yang tidak signifikan.



Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Penerapan manajemen risiko likuiditas Bank bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan *gap maturity* pada tiap skala waktu, yang direview pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Bank serta upaya meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh Unit Kerja *Treasury*, dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas secara *bank wide* dilakukan oleh *Risk Management Group*, termasuk didalamnya pembuatan kebijakan dan penetapan limit risiko likuiditas.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Pengendalian risiko operasional di Bank Ina diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (*accountability*) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena Bank menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh human, proses, sistem dan kejadian eksternal. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Bank akan semakin tidak rentan terhadap guncangan akibat risiko operasional.

Pengendalian *human error* pada pelaksanaan operasional Bank, dilakukan dengan menerapkan *daily control function check list*, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang melibatkan seluruh karyawan. Pelaksanaan strategi anti *fraud* tersebut mengacu kepada kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review dan penyempurnaan SOP, peningkatan internal kontrol dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala.

Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas *Data Center* (DC) termasuk kualitas *Disaster Recovery Center* (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas *software* aplikasi pada *Core Banking System*. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja, juga untuk



meningkatkan kualitas *built in control* pada proses operasional. Perkembangan produk dan jasa Bank dengan fitur berbasis teknologi Informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Bank untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai.

Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Bank.

Pengelolaan risiko operasional merupakan tanggungjawab seluruh unit kerja dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional secara *bank wide* dilakukan oleh *Risk Management Group*.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Bank, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengendalikan risiko strategik, Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Bank serta mempertimbangkan kemampuan sumberdaya, baik sumberdaya financial, infrastruktur dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat *review* pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko strategik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja bank yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana

bisnis Bank. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen Bank.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktifitas Bank yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Bank senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (melalui *training* dan pengeluaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun *compliance charter* sebagai *guidance* bagi semua pihak dalam organisasi Bank Ina dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu telah dilakukan *Quality Assurance Policy and Procedure* yaitu proses *assesment* terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah dikeluarkan. Dengan demikian



setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Selanjutnya Agar perilaku organisasi tidak menyimpang dari standar, telah dibuat *code of conduct* yang berisi etika yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Selain itu untuk memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan dalam transaksi nominal besar, maka setiap pemberian fasilitas kredit di atas jumlah tertentu wajib melalui proses uji kepatuhan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan *review* secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses *enforceability* untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat. Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia. Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Bank, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi. Unit kerja *Corporate Legal* bertanggungjawab

terhadap pengelolaan risiko hukum Bank.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Persepsi negatif terhadap Bank dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tata kelola dan budaya perusahaan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah/meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank antara lain melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, mengelola keterbukaan informasi, melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Bank berupaya menanggapi dan menindaklanjuti secara cepat melalui unit kerja di kantor pusat maupun cabang-cabang yang telah difungsikan untuk mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Dalam rangka menjaga reputasi, Bank juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Sebagai perusahaan terbuka Bank menerapkan prinsip keterbukaan informasi dengan menyampaikan informasi yang bersifat signifikan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary*.

Profil Risiko Tahun 2014

Profil Risiko yang merupakan gambaran dari



risiko yang melekat pada aktivitas bank dan penilaian kualitas kontrol dari hasil *self assessment* untuk posisi Triwulan IV 2014 disajikan sebagai berikut :

Profil Risiko	Penilaian Posisi Triwulan IV 2014			Penilaian Posisi Triwulan III 2014		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Stratejik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

Analisa Profil Risiko

Peringkat Risiko Komposit Bank di Triwulan IV-2014 dinilai dalam Peringkat 2 atau “*Low to Moderate*”. Secara agregate tingkat risiko Bank relatif stabil. Keberhasilan pelaksanaan IPO telah memberikan dampak positif terhadap membaiknya reputasi Bank serta penguatan struktur permodalan. Kesuksesan proses IPO juga membuktikan bahwa Bank dalam kondisi sehat yang tercermin dari hasil *due diligence* oleh Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai pihak independen terhadap tiga aspek yakni

aspek keuangan, aspek transparansi dan aspek hukum selama proses IPO berlangsung. Hasil *due diligence* tersebut selanjutnya dikonfirmasi oleh otoritas terkait. Kepercayaan masyarakat bahwa Bank dalam kondisi yang baik, tercermin dari pembentukan harga saham perdana Bank yang mencapai 240% dari harga nominal. Selama periode laporan saham BINA aktif diperdagangkan di bursa dengan harga saham tertinggi sebesar Rp 283 dan terendah sebesar Rp 220 per lembar saham dan pada periode akhir laporan ditutup pada harga Rp 250 per lembar saham.



Pada 1 Oktober 2014 terjadi transaksi penjualan saham oleh pemilik saham pendiri yang menyebabkan komposisi pemegang saham berubah menjadi PT Philadel Terra Lestari 420.000.000 lembar saham (20%), Bp. Oki Widjaja 84.030.000 lembar saham (4%), OCBC Securities PTE LTD – Client A/C 790.000.000 lembar saham (37,62%) serta masyarakat sebanyak 805.970.000 lembar saham (38,38%). Penjualan saham pendiri menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali yang sampai dengan saat ini masih menunggu penetapan dari OJK.

Risiko kredit inheren terkonsentrasi pada penyaluran dana dalam bentuk Kredit yang Diberikan. Penyediaan dana dalam bentuk lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan dana antar Bank dan surat berharga dilakukan lebih sebagai pemanfaatan *excess fund* dan relatif tidak mengekspose risiko kredit Bank secara signifikan. Pengendalian Risiko Kredit masih tetap terjaga meskipun terdapat sedikit kenaikan dengan rasio kredit bermasalah sebesar 0,78%. Proses penyelesaian kredit bermasalah terus dilakukan tercermin dari tingkat *recovery* kredit bermasalah yang cukup baik, dan sepanjang tahun 2014 tidak terdapat lagi pengambilalihan AYDA.

Risiko pasar relatif tetap rendah dan cenderung stabil, dengan eksposur *trading book* yang relatif kecil. Namun demikian eksposur risiko suku bunga pada *banking book* dengan *gap time band* (0-3) bulan cenderung meningkat menyebabkan penurunan rasio NIM Bank akibat kondisi suku bunga antar Bank dan penempatan pada BI yang cenderung menurun. Ketepatan timing dalam melakukan *repricing asset – liabilities* akan sangat mempengaruhi NIM Bank.

Risiko likuiditas Bank relatif terjaga tercermin dari rasio aset likuid primer & sekunder terhadap total aset yang cenderung meningkat dan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas Bank jangka pendek dan menengah, selain itu sebagian dana pihak ketiga bank bersumber dari nasabah-nasabah loyal yang mempunyai ikatan emosional dengan Bank dan telah menempatkan dananya

dalam kurun waktu yang lama dengan jumlah yang cenderung meningkat.

Dari sisi risiko operasional, kinerja operasional dan kualitas kontrol meningkat sehubungan dengan perbaikan infrastruktur IT yang telah berhasil diimplementasikan pada bulan Mei 2013. Secara umum tingkat gangguan IT dapat diturunkan sehingga lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan pemindahan *Data Center*. Proses operasional menjadi lebih baik dan terkontrol. Selain itu, infrastruktur IT khususnya infrastruktur *Data Center* yang digunakan Bank merupakan salah satu yang terbaik yang digunakan di Bank sekelas. Untuk mencegah terjadinya *fraud* telah dilakukan upaya meningkatkan budaya *antifraud* secara konsisten melalui program sosialisasi pada berbagai kesempatan dan dengan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*.

Risiko strategik secara komposit dinilai *low to moderate*, meskipun beberapa parameter pencapaian RBB sedikit di bawah target yang ditetapkan terutama pencapaian kredit yang sebesar 94,87% dari target yang ditetapkan. Tingkat efisiensi yang merupakan salah satu parameter dalam perhitungan risiko strategik tercermin dari rasio BOPO sebesar 89,45%, masih belum mampu mendorong Bank untuk menghasilkan laba operasional sesuai dengan target yang ditetapkan dengan pencapaian 95,05%. Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia tentang kegiatan usaha berdasarkan modal inti, juga berpengaruh terhadap rencana strategik Bank ke depan. Melihat semakin terbukanya Perseroan untuk meningkatkan dan memperkuat permodalan Bank, maka hal tersebut memberikan peluang untuk memenuhi struktur permodalan Bank yang dikaitkan dengan jaringan kantor. Sebagai Bank yang masih tergolong kategori Bank BUKU 1, tentu hal ini masih akan berdampak pada kegiatan usaha menjadi lebih terbatas, khususnya dalam perluasan jaringan dan pelaksanaan aktivitas tertentu. Hal ini tentu saja akan mengurangi daya saing Bank pada industri perbankan nasional. Dengan struktur permodalan



yang semakin kuat dari proses IPO maupun dari penambahan modal secara organik, dinilai akan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk meningkatkan keuntungan Bank.

Penilaian aspek hukum dilakukan melalui *due diligence* pada proses IPO. Hasil *due diligence* menunjukkan Bank tidak memiliki kelemahan hukum yang dapat mengekspose risiko hukum secara signifikan. Selain itu potensi kerugian dari kemungkinan litigasi dan biaya litigasi dinilai masih rendah.

Sepanjang periode Triwulan IV 2014 tidak terdapat ketidakpatuhan Bank yang dapat mengekspose risiko kepatuhan secara signifikan. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun *compliance charter* sebagai *guidance* bagi semua pihak dalam organisasi Bank Ina dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu telah dilakukan *Quality Assurance Policy and Procedur* yaitu proses *assesment* terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah dikeluarkan. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai "*Satisfactory*". Proses identifikasi secara proaktif dan pengukuran sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktu. Infrastruktur IT yang digunakan dalam rangka proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, masih terus dikembangkan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan proses

identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko tiap aktifitas perbankan yang lebih baik, antara lain dengan mengupayakan penggantian *core banking system* untuk dapat mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan layanan bisnis Bank. Dalam meningkatkan pelayanan konsumen, telah ditunjuk pejabat yang berfungsi dalam melayani penyelesaian pengaduan konsumen.

Dalam bidang perkreditan telah dilakukan *review* terhadap Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank. Sementara itu dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam transaksi nominal besar bidang perkreditan, maka setiap pemberian fasilitas kredit di atas Rp 5 miliar wajib melalui proses uji kepatuhan.

Bank telah melakukan perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

PENGUNGKAPAN PERMODALAN DAN EKSPOSUR RISIKO

A. Permodalan

a) Struktur permodalan

Struktur permodalan Bank Ina saat ini terdiri dari :

- i. Modal Inti yang bersumber dari Modal Disetor ditambah dengan Cadangan Tambahan Modal (*disclose reserved*) yang terdiri dari Agio Saham, Cadangan Umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, faktor pengurang berupa rugi tahun-tahun lalu, serta selisih kurang antara PPA yang wajib dibentuk dan cadangan kerugian. Sebagian besar modal inti Bank berasal dari modal disetor sebesar Rp 210 miliar. Penambahan modal disetor terakhir berasal dari dana hasil pelaksanaan



IPO. Pelaksanaan IPO menghasilkan dana bersih sebesar Rp 117,5 miliar, dan telah dibukukan sebagai modal disetor sebesar Rp 52 miliar dan agio saham sebesar Rp 65,5 miliar.

- ii. Modal Pelengkap yang terdiri dari modal *Upper Tier-2* yang berasal dari cadangan aset produktif.

Pertumbuhan modal Bank saat ini, mengandalkan pertumbuhan organik yang bersumber dari pemupukan laba usaha, serta penambahan modal baru dari pemegang saham atau investor melalui bursa efek.

b) Kecukupan permodalan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Modal Minimum Bank Umum, maka dengan Profil Risiko peringkat 2 (*Low To Moderate*) maka Bank wajib menyediakan modal minimum paling rendah sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% dari total ATMR. Dengan total Modal Bank sebesar Rp 295,58 miliar dan rasio sebesar 24,94% dari total ATMR, maka permodalan Bank dianggap cukup aman untuk mengantisipasi pergerakan profil risiko Bank, namun demikian dalam upaya pemenuhan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan modal inti, Bank masih berupaya untuk meningkatkan struktur permodalan Bank.

Struktur permodalan Bank selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1.

B. Pengungkapan Exposure Risiko

a) Risiko Kredit,

Risiko Kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Bank Ina, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar Bank, serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Sampai dengan saat ini sumber utama pendapatan Bank masih bersumber pada

pendapatan dari aktivitas penyaluran kredit.

1) Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Penerapan Manajemen Risiko Kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah. Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Bank dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat di-*recovery* secara optimum sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan.

Proses analisa permohonan kredit dilakukan oleh Unit Kerja *Credit Reviewer* yang independen terhadap Unit Bisnis. Pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota Komite Kredit yang dapat memutuskan sendiri suatu permohonan kredit. Selain menatausahakan dokumen perkreditan, Unit Kerja Administrasi Kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan *covenant* yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Proses pencairan dilakukan Unit Kerja Operasional atas instruksi dari Unit Kerja Administrasi Kredit setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang bekerja secara fokus dan independen. Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karakteristik



masing-masing segmen kredit dan penguasaan bank atas segmen yang dimasuki. Segmentasi ini berpengaruh pada kebijakan Bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit dan kewenangan memutus kredit. Perumusan kebijakan dalam bidang perkreditan dibahas dalam Komite Kebijakan Perkreditan Bank.

2) Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Bank mencatat kegagalan debitur/atau pihak lain dalam tagihan yang telah jatuh tempo yaitu tagihan yang mengalami penunggakan pembayaran baik pokok maupun bunga selama lebih dari 90 hari. Tagihan yang telah jatuh tempo dan berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bukti adanya penurunan nilai akan dilakukan proses *impairment*. Evaluasi penurunan nilai dilakukan secara individual dan kolektif. Untuk kredit yang bernilai signifikan proses *impairment* dilakukan secara individual. Namun jika kredit tidak signifikan maka proses *impairment* dilakukan secara kolektif. Tingkat signifikansi kredit yang di *impair* secara individual ditetapkan dalam kebijakan Bank dengan mengacu kepada ketentuan akuntansi yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang diobservasi dalam rangka evaluasi penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut :

a. Kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami penerbit atau peminjam dengan jumlah signifikan yang diketahui dari hasil kunjungan ke debitur sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atas pembayaran pokok atau Bunga. Hal ini dievaluasi dari data pembayaran sesuai jadwal pembayaran masing-masing debitur.

c. Kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi. Hal ini akan dievaluasi secara triwulanan, dengan mengacu kepada hasil kunjungan debitur sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah, untuk kredit dengan jumlah yang signifikan.

d. Kondisi ekonomi nasional/lokal atau kondisi industri yang berkorelasi dengan wanprestasi debitur atau memburuknya kualitas kredit dalam industri tersebut. Observasi dilakukan secara berkesinambungan dimulai pada awal tahun berjalan dan hasil observasi diaplikasikan ke seluruh debitur atau kelompok kredit dalam suatu industri atau kelompok kredit yang memiliki faktor risiko sejenis.

Untuk mengevaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai secara individual Bank membentuk CKPN Individual dengan menggunakan pendekatan *discounted cash flow* dan *fair value of collateral*. Penggunaan masing-masing teknik disesuaikan dengan kondisi yang berlaku, sebagai berikut :

a. Jika Bank mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi kredit, yakni pemberian konsesi khusus kepada debitur, dimana konsesi ini tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur, maka teknik evaluasi atas estimasi arus kas masa datang terhadap kredit yang mengalami



penurunan nilai menggunakan *discounted cash flow*.

- b. Kredit yang telah mengalami penurunan nilai akan dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku.
- c. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit, dimana :
 - Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga efektif awal akan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit.
 - Untuk kredit bersuku bunga mengambang, suku bunga yang akan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit adalah suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan.
- d. Setelah ditemukan bukti obyektif penurunan nilai, Bank melakukan kembali estimasi arus kas masa datang yang mungkin akan diperoleh. Estimasi arus kas masa datang yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan keuangan debitur. Setiap pembayaran debitur yang tidak sesuai dengan estimasi arus kas yang sudah ada, harus dibuatkan estimasi arus kas yang baru. Perubahan estimasi arus kas tidak melebihi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.
- e. Selisih kurang antara nilai tercatat kredit sebelum terdapat bukti obyektif penurunan nilai dan nilai

kini estimasi arus kas masa datang merupakan CKPN Individual yang harus dibentuk.

- f. Bila debitur telah membayar seluruh arus kasnya sesuai dengan estimasi, maka pada akhir penerimaan arus kas, Bank akan mencatat penghentian pengakuan kredit sebesar CKPN yang telah dibentuk
- g. Bank akan membentuk tambahan CKPN apabila terjadi perubahan estimasi arus kas masa datang pada saat evaluasi selanjutnya, dimana estimasi arus kas masa datang lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya.
- h. Apabila kredit diperkirakan akan dibayar penuh, termasuk denda bunga, maka nilai kini arus kas masa datang mungkin tidak akan berada di bawah nilai tercatat, sehingga Bank tidak perlu membentuk CKPN. Bank akan melakukan evaluasi secara periodik dan obyektif terhadap kemungkinan perubahan kemampuan debitur dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

Sedangkan penghitungan CKPN secara kolektif (*collective impairment*) dilakukan pada :

- a. Kredit yang tidak signifikan secara individu.

Kredit yang secara individu ditetapkan tidak signifikan dimana proses estimasi penurunan nilai dilakukan secara kolektif adalah seluruh jenis kredit dengan *plafond* sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah.
- b. Kelompok Kredit

Kredit-kredit yang tidak signifikan secara individu dan seluruh



kredit yang dalam proses evaluasi penurunan nilai tidak terdapat bukti adanya penurunan nilai dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok. Pengelompokan kredit ke dalam satu kelompok tertentu didasarkan pada kesamaan karakteristik risiko kredit yang sejenis, dengan mempertimbangkan tingkat *vulnerability* terhadap jenis debitur, jangka waktu, sumber pengembalian, kondisi pasar, industri dan perekonomian secara umum. Estimasi pembentukan CKPN Kolektif didasarkan atas estimasi kerugian (*Expected Loss*) yang dihitung dengan metode *Roll Rate Model*

Pengungkapan kuantitatif tagihan Bersih Bank dan CKPN adalah sebagai berikut :

- i. Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1
 - ii. Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.2;
 - iii. Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3;
 - iv. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.4;
 - v. Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.5; dan
 - vi. Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.6.
- 3) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar
- (a) Kebijakan perhitungan Aset

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Penghitungan ATMR Kredit – Pendekatan Standar mencakup eksposur aset dalam neraca dan kewajiban komitmen/kontijensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak termasuk eksposur dalam *trading book*. Penghitungan dengan pendekatan standar juga mencakup eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan dan eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan lebih dari 4 (empat) hari kerja.

Dalam perhitungan dengan pendekatan standar, Bank menggunakan peringkat terkini dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Jika terdapat debitur dalam suatu kelompok usaha maka peringkat satu perusahaan tidak digunakan untuk menetapkan bobot risiko perusahaan lain dalam kelompok tersebut. Ketentuan penggunaan peringkat terkini dan proses dokumentasinya diatur dalam pedoman dan prosedur internal Bank.

Penggunaan peringkat dalam penetapan bobot dilakukan pada kategori portofolio tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada Bank dan tagihan kepada korporasi, berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (b) Pengungkapan kuantitatif risiko kredit dengan pendekatan standar sebagai berikut :

- i. Tagihan Bersih Berdasarkan



Kategori Portofolio dan Skala Peringkat selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.1 dan

- ii. Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) tidak disajikan dalam tabel karena Bank tidak memiliki eksposur *Counterparty Credit Risk*.

4) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit, Bank mengakui keberadaan agunan, garansi dan penjaminan yang memenuhi syarat (*eligible*) yang disebut dengan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit). Bank hanya menggunakan teknik MRK apabila ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan teknik MRK. ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah sebesar nol. Agunan, Garansi dan Jaminan yang diakui sebagai teknik MRK tidak diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit, dan masa berlakunya pengikatan agunan, garansi dan/atau jaminan paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.

Untuk memitigasi risiko kredit, jaminan yang dapat digunakan untuk agunan kredit sesuai Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- (1) Jaminan Tanah/Bangunan dengan bukti kepemilikan yang sah, yang pengikatannya dilakukan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) secara notariil, atau pengikatan dapat juga dilakukan dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk jumlah-

jumlah yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Jaminan Kendaraan/Barang Bergerak/Stok Barang dengan bukti kepemilikan yang sah, dan pengikatannya dilakukan dengan Akte *Fiducia* secara notariil atau bawah tangan.
- (3) Jaminan Berupa Tagihan/Piutang dengan bukti kepemilikan yang sah, dan pengikatannya dilakukan dengan *Cessie* secara notariil atau bawah tangan.
- (4) Jaminan berupa Giro, Tabungan atau Deposito dengan bukti kepemilikan yang sah, dan pengikatannya dilakukan dengan Gadai secara Notariil atau bawah tangan.

Proses penilaian jaminan dilakukan sebelum persetujuan kredit dan dilakukan penilaian kembali secara berkala selama jangka waktu kredit. Proses penilaian dilakukan oleh *appraisal* internal dan/atau *appraisal* independen tergantung dari jumlah plafond kredit yang diberikan.

Pengungkapan kuantitatif mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sebagai berikut :

- i. Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit, selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.1 ;
- ii. Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit selengkapnya disajikan dalam Tabel 4.2.

5) Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset selama periode pelaporan.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan



Standar disajikan secara lengkap pada Tabel 6.1.1, Tabel 6.1.2, Tabel 6.1.3, Tabel 6.1.4, Tabel 6.1.5, Tabel 6.1.6 dan Tabel 6.1.7.

b) Risiko Pasar

(1) Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar

i. Penerapan manajemen risiko

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditi. Penerapan Manajemen Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit Kerja *Treasury* dan Komite ALCO. Sedangkan kebijakan dan penetapan limit risiko dilakukan oleh *Risk Management Group* sebagai unit kerja yang independen.

Sebagai Bank non devisa dan memiliki portofolio *trading book* yang relatif kecil, Bank Ina Perdana tidak terekspos risiko pasar secara signifikan. Risiko Pasar lebih bersumber pada risiko suku bunga pada portofolio *Banking Book*, yang menjadi fokus untuk dikendalikan. Kepemilikan eksposur *Trading Book* hanya ditujukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas jangka pendek dan tidak ditujukan untuk pembentukan pasar dengan instrumen keuangan berupa Obligasi yang likuid di pasar. Proses *mark to market* terhadap eksposur

trading book dilakukan secara harian yang dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengendalian risiko suku bunga pada *Banking Book* dilakukan dengan mengendalikan *gap repricing asset-liabilities* Bank pada tiap skala waktu. Pengaturan *gap repricing* ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada rapat bulanan ALCO. Tujuannya adalah agar *gap-repricing* ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar. Unit kerja *Treasury* bertanggungjawab atas pengaturan *gap repricing* dengan memperhatikan *gap limit* yang dikeluarkan oleh *Risk Management Group*. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit kerja *Treasury*.

Sementara itu risiko nilai tukar hanya terjadi pada aktivitas *money changer* dengan jumlah yang tidak signifikan.

ii. Pengungkapan kuantitatif

Penghitungan risiko pasar menggunakan metode standar selengkapnya disajikan dalam Tabel 7.1.

(2) Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan risiko pasar dengan pendekatan Model Internal

c) Risiko Operasional

(1) Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko



akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Pengendalian risiko operasional di Bank Ina diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (*accountability*) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena Bank menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh human, proses, sistem dan kejadian eksternal. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Bank akan semakin tidak rentan terhadap guncangan akibat risiko operasional.

Pengendalian *human error* pada pelaksanaan operasional Bank, dilakukan dengan menerapkan *daily control function check list*, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan menerapkan strategi

anti *fraud* yang melibatkan seluruh karyawan. Pelaksanaan strategi anti *fraud* tersebut mengacu kepada kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, *review* dan penyempurnaan SOP, peningkatan internal kontrol dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala.

Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas *Data Center* (DC) termasuk kualitas *Disaster Recovery Center* (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas *software* aplikasi pada *Core Banking System*. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja, juga untuk meningkatkan kualitas *built in control* pada proses operasional. Perkembangan produk dan jasa Bank dengan fitur berbasis teknologi Informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Bank untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai.

Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Bank.

Pengelolaan risiko operasional merupakan tanggungjawab seluruh unit kerja dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan



pengendalian risiko operasional secara *bank wide* dilakukan oleh *Risk Management Group*.

(2) Pengungkapan kuantitatif

Penghitungan risiko operasional dilakukan dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Hasil penghitungan risiko pasar selengkapnya disajikan dalam Tabel 8.1

d) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Penerapan manajemen risiko likuiditas Bank bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan *gap maturity* pada tiap skala waktu, yang di-*review* pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Bank serta upaya meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh Unit Kerja *Treasury*, dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas secara *bank wide* dilakukan oleh *Risk Management Group*, termasuk didalamnya pembuatan kebijakan dan penetapan limit risiko likuiditas.

Pengungkapan kuantitatif pengelolaan risiko likuiditas sebagai berikut :

(a) Profil Maturitas Rupiah selengkapnya disajikan dalam Tabel 9.1.

(b) Profil Maturitas Valas

Sebagai Bank non devisa, Bank tidak memiliki Aset dan Kewajiban dalam valuta asing.

e) Risiko Hukum,

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan *review* secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses *enforceability* untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat. Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia. Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Bank, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi. Unit kerja *Corporate Legal*



bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko hukum Bank.

f) Risiko Strategik,

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Bank, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengendalikan risiko strategik, Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Bank serta mempertimbangkan kemampuan sumberdaya, baik sumberdaya financial, infrastruktur dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat *review* pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko strategik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja bank yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Bank. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen Bank.

g) Risiko Kepatuhan,

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank

yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktifitas Bank yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Bank senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (melalui *training* dan pengeluaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun *compliance charter* sebagai *guidance* bagi semua pihak dalam organisasi Bank Ina dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu telah dilakukan *Quality Assurance Policy and Procedure* yaitu proses *assessment* terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan *intern* yang akan atau sudah dikeluarkan. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Selanjutnya untuk memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan dalam transaksi nominal besar, maka setiap



pemberian fasilitas kredit di atas jumlah tertentu wajib melalui proses uji kepatuhan.

Pengendalian risiko kepatuhan juga dilakukan dengan penyusunan *code of conduct* yang berisi etika yang harus dilakukan oleh setiap karyawan agar perilaku organisasi tidak menyimpang dari standar.

h) Risiko Reputasi,

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif

terhadap Bank. Persepsi negatif terhadap Bank dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tata kelola dan budaya perusahaan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah/meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank antara lain melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), mengelola keterbukaan informasi,

Tabel 1.1 Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

KOMPONEN MODAL			
(1)	(2)		
I. KOMPONEN MODAL			
A	Modal Inti		
	1 Modal disetor		
	2 Cadangan Tambahan Modal		
	3 Modal Inovatif		
	4 Faktor Pengurang Modal Inti		
	5 Kepentingan Non Pengendali		
	B	Modal Pelengkap	
		1 Level Atas (<i>Uper Tier 2</i>)	
		2 Level Bawah (<i>Lower Tier 2</i>) maksimum 50% modal awal	
	C	3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap	
		Faktor Pengurang Modal Inti Dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi	
	D	Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (<i>Tier 3</i>)	
	E	MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DI ALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR	
	II	Total Modal Inti Dan Modal Pelengkap (A + B - C)	
III	TOTAL MODAL INTI,MODAL PELENGKAP,,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)		
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT		
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL		
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR		
A	METODE STANDART		
	MODEL INTERNAL		
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT ,RISIKO OPERASIONAL,DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V +VI)]		



melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjaminan kualitas produk dan layanan, penjaminan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Bank berupaya menanggapi dan menindaklanjuti secara cepat dan tepat melalui unit kerja di kantor pusat maupun cabang-cabang yang telah difungsikan untuk mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Dalam rangka menjaga reputasi, Bank juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat

dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Sebagai perusahaan terbuka Bank menerapkan prinsip keterbukaan informasi dengan menyampaikan informasi yang bersifat signifikan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary*.

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
(3)	(4)	(5)	(6)
283,950	283,950	156,736	156,736
210,000	210,000	158,000	158,000
73,950	73,950	(1,264)	(1,264)
(12,485)	(12,485)		
11,634	11,634	9,361	9,361
11,634	11,634	9,361	9,361
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
295,584	295,584	166,097	166,097
295,584	295,584	166,097	166,097
1,054,693	1,054,693	865,240	865,240
109,200	109,200	103,736	103,736
21,074	21,074	22,802	22,802
		-	-
		-	-
24.94%	24.94%	16.75%	16.75%



Tabel 2.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jabar	Banten	DKI	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	624,335	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	14,655	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2,296	1,831	9,310	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	3,140	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	408	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	158,339	46,759	160,473	29,919
9	Tagihan kepada Korporasi	16,096	3,677	333,883	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	29,159	-
Total		177,140	52,268	1,174,955	29,919

Tabel 2.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		<=1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3thn s.d. 5 thn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	624,335	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	14,655	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	209	1,450	2,220
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,140	-	758
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	15	32	151
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	402,042	337,364	74,903
9	Tagihan kepada Korporasi	89,373	242,661	37,597
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
11	Aset Lainnya	29,159	-	-



(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya										
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah										
	Jateng	Jatim	Luar Jawa	Jabar	Banten	DKI	DIY	Jateng	Jatim	Luar Jawa
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	270,788	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	14,936	-	-	-	-
	1,090	1,856	-	2,408	1,443	8,749	-	1,102	259	-
	758	-	-	-	-	2,808	-	926	-	-
	31	-	-	1,051	-	-	-	293	-	-
	144,639	105,591	216,662	156,288	49,640	129,797	27,762	153,558	109,453	151,208
	8,404	7,570	-	15,322	5,867	212,886	-	24,011	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	154,923	115,017	216,662	175,069	56,950	639,964	27,762	179,890	109,712	151,208

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya								
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak								
> 5 thn	Non Contractual	Total	<=1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Contractual	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	624,335	270,788	-	-	-	-	270,788
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14,655	14,936	-	-	-	-	14,936
12,504	-	16,383	469	1,834	1,611	9,867	179	13,960
-	-	3,898	-	-	926	-	2,808	3,734
242	-	440	41	261	210	831	-	1,343
48,074	-	862,383	149,716	195,231	29,425	47,353	355,980	777,705
-	-	369,631	51,274	114,567	-	-	92,244	258,085
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29,159	-	-	-	-	-	-



Tabel 2.3 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Posisi Tanggal Laporan				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-
5	Konstruksi	-	-	-
6	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-
7	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	-	-	-
8	Transportasi Pergudangan dan komunikasi	-	-	-
9	Perantara Keuangan	-	-	-
10	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-
11	Jasa Pendidikan	-	-	-
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-
13	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-
14	Rumah Tangga	-	-	-
15	Bukan Lapangan Usaha	624,335	-	-
Total		624,335	-	-
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan			
2	Perikanan			
3	Pertambangan dan Penggalian			
4	Industri Pengolahan			
5	Konstruksi			
6	Perdagangan Besar dan Eceran			
7	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum			
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi			
9	Perantara Keuangan	270,788		
10	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan			
11	Jasa Pendidikan			
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			
13	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya			
14	Rumah tangga			
15	bukan lapangan usaha			
Total		270,788	-	-

Tabel 2.4 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan Wilayah				
		Jabar	Banten	DKI	DIY	Jateng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	177,140	52,268	1,145,796	29,919	154,923
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)					
	a. Belum jatuh tempo		-	-	-	-
	b. Sudah jatuh tempo	1,904	-	-	-	342
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Individual	1,096	-	-	-	-
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kolektif	870	59	103	53	210
5	Tagihan yang dihapus buku	-	-	4,722	-	-



(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	186	-	-	7,109	6,500		
-	-	-	11	-	-		
-	-	-	-	10,156	-		
-	-	-	-	30,317	-		
-	-	-	-	43,598	5,000		
-	-	3,140	-	113,200	15,937		
-	-	-	-	16,031	-		
-	-	-	-	221,958	-		
14,655	-	-	-	49,350	318,492		
-	-	758	-	61,770	23,702		
-	-	-	-	1,378	-		
-	-	-	-	12,175	-		
-	-	-	-	14,179	-		
-	16,197	-	428	281,163	-		
-	-	-	-	-	-		29,159
14,655	16,383	3,898	440	862,383	369,631	-	29,159
-	-	-	123	7,697	6,500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29	4,370	-	-	-
-	-	-	-	30,146	-	-	-
-	-	-	-	45,709	5,000	-	-
-	-	2,808	-	100,849	15,905	-	-
-	-	-	-	19,935	-	-	-
-	-	-	-	201,552	79	-	-
14,936	-	-	-	28,567	213,563	-	-
-	-	926	-	49,208	16,941	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	215	97	-	-
-	-	-	-	6,739	-	-	-
-	13,960	-	1,191	282,720	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,936	13,960	3,734	1,343	777,707	258,085	-	-

(dalam jutaan rupiah)

			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya							
			Wilayah							
Jatim	Luar Jawa	Total	Jabar	Banten	DKI	DIY	Jateng	Jatim	Luar Jawa	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
115,017	216,662	1,891,725	175,068	56,950	639,964	27,762	179,889	109,712	151,208	1,340,553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,480	-	4,726	2,900	-	19	-	-	950	-	3,869
786	-	1,882	140	-	-	-	-	560	-	700
283	122	1,700	314	10	45	3	20	30	23	445
-	-	4,722	-	-	4,703	-	-	-	-	4,703



Tabel 2.5 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Sektor Ekonomi	Tagihan	
(1)	(2)	
Posisi Tanggal Laporan		
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	13,795	
Perikanan	11	
Pertambangan dan Penggalian	10,156	
Industri Pengolahan	30,317	
Konstruksi	48,598	
Perdagangan besar & eceran	132,277	
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	16,031	
transportasi, pergudangan dan komunikasi	221,958	
perantara keuangan	382,497	
real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	86,230	
jasa pendidikan	1,378	
jasa kesehatan dan kegiatan sosial	12,175	
jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perseorangn lainnya	14,179	
Rumah Tangga	297,788	
Bukan Lapangan Usaha	624,335	
Total	1,891,725	
Posisi Tanggal Laporan Tahun sebelumnya		
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	14,320	
Perikanan	-	
Pertambangan dan Penggalian	4,399	
Industri Pengolahan	30,146	
Konstruksi	50,709	
Perdagangan besar & eceran	119,563	
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	19,935	
transportasi, pergudangan dan komunikasi	201,631	
perantara keuangan	257,066	
real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	67,075	
jasa pendidikan	-	
jasa kesehatan dan kegiatan sosial	312	
jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perseorangn lainnya	6,739	
Rumah Tangga	297,872	
Bukan Lapangan Usaha	270,788	
Total	1,340,555	

Tabel 2.6 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

No	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan	
		CKPN Individual	
(1)	(2)	(3)	
1	Saldo awal CKPN	660	
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada Periode berjalan (Net)		
	2.a. Pembentukan CKPN Pada Periode Berjalan		
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	1,786	
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(564)	
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan		
	Saldo akhir CKPN	1,882	



(dalam jutaan rupiah)

Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	14	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1	-
-	1,663	772	247	-
-	-	-	5	-
1,565	90	-	171	-
-	-	-	2	-
-	-	-	25	-
-	-	-	37	-
-	-	-	10	-
-	-	-	0	-
-	-	-	1	-
-	-	481	1	-
1,355	53	565	146	4,722
2,920	1,806	1,818	658	4,722
-	-	-	1	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,786	-	560	264	-
-	-	-	5	-
-	-	-	12	-
-	-	-	2	-
-	-	-	47	-
-	-	-	24	-
-	-	-	7	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1	-
55	2,027	140	81	4,703
1,841	2,027	700	444	4,703

(dalam jutaan rupiah)

CKPN Kolektif	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(4)	(5)	(6)
341	728	1,110
	602	
1,379		(769)
(20)	(670)	
1,700	660	341



Tabel 3.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio Dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat					
	Standart and Pour's	AAA	AA+s.d AA-	A+s.d A-	BBB+s.d BBB-	
	Fitch Rating	AAA	AA+s.d AA-	A+s.d A-	BBB+s.d BBB-	
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	Aa1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
	PT.ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+s.d [idr]AA-	[idr]A+s.d [idr]A-	[idr]BBB+s.d [idr]BBB-	
	PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+s.d idAA-	idA+s.d idA-	id BBB+s.d id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	-	0	0	
2 Tagihan Kepada Sektor Publik	0	0	0	0	0	
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	
4 Tagihan kepada Bank	0	0	14,655	0	0	
5 Kredit Beraguna Rumah Tinggal	0	0	0	0	0	
6 Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0	0	0	
7 Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0	0	0	
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	0	0	0	0	
9 Tagihan Kepada Korporasi	0	10,175	9,275	5,000	0	
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	
11 Aset Lainnya	0	0	0	0	0	
Total	0	10,175	23,930	5,000		

Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat					
	Standart and Pour's	AAA	AA+s.d AA-	A+s.d A-	BBB+s.d BBB-	
	Fitch Rating	AAA	AA+s.d AA-	A+s.d A-	BBB+s.d BBB-	
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	Aa1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
	PT.ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+s.d [idr]AA-	[idr]A+s.d [idr]A-	[idr]BBB+s.d [idr]BBB-	
	PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+s.d idAA-	idA+s.d idA-	id BBB+s.d id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0	0	0	
2 Tagihan Kepada Sektor Publik	0	0	10,045	0	0	
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	
4 Tagihan kepada Bank	0	0	274	0	0	
5 Kredit Beraguna Rumah Tinggal	0	0	0	0	0	
6 Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0	0	0	
7 Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0	0	0	
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	0	0	0	0	
9 Tagihan Kepada Korporasi	0	0	10,336	0	0	
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	
11 Aset Lainnya	0	0	0	0	0	
Total	0	0	20,655	0		



(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan															
Tagihan Bersih			Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total				
BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang Dari A-3	F1+s.d F1	F2	F3			Kurang Dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang Dari P-3	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F2(idn)	Kurang Dari F3(idn)		
[idr]BB+ s.d [idr]BB-	[idr]B+ s.d [idr]B-	Kurang dari [idr]B-	[idr]A1+ s.d [idr]A1	[idr]A2+ s.d [idr]A2	[idr]A3+ s.d [idr]A3	Kurang Dari [idr]A3	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari id B-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang Dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,335	624,335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	14,655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,383	16,383
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898	3,898
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,383	862,383
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,181	369,631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,159	29,159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,779	1,920,884

Posisi Tanggal Laporan															
Tagihan Bersih			Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total				
BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang Dari A-3	F1+s.d F1	F2	F3			Kurang Dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang Dari P-3	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F2(idn)	Kurang Dari F3(idn)		
[idr]BB+ s.d [idr]BB-	[idr]B+ s.d [idr]B-	Kurang dari [idr]B-	[idr]A1+ s.d [idr]A1	[idr]A2+ s.d [idr]A2	[idr]A3+ s.d [idr]A3	Kurang Dari [idr]A3	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari id B-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang Dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,788	270,788
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,936	14,936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,284	13,284
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715	3,715
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352	1,352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,329	505,329
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,227	558,227
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,604	30,604
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,235	1,398,235



Tabel 4.1. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan									
		Tagihan Bersih Setelah Mempertimbangkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A	Eksposur Neraca										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	624,335	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	14,655	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beraguna Rumah Tinggal	-	-	10,268	4,588	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	3,914	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	442	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	562,150	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	24,627	-	-	-	-	-	598,099	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	624,335	39,282	10,268	4,588	-	442	562,150	602,013	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	10,869	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	10,869	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Tabel 4.2. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	
		Agunan	
(1)	(2)	(3)	(4)
A	<i>Eksposur Neraca</i>		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	624,335	-
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	14,655	-
5	Kredit Beraguna Rumah Tinggal	14,856	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	3,914	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	442	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	570,353	8,203
9	Tagihan Kepada Korporasi	692,767	70,041
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-
11	Aset Lainnya	29,159	-
	Total Eksposur Neraca	1,950,481	78,244
B	<i>Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif</i>		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	10,869	10,869
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-
11	Aset Lainnya	-	-
	Total Eksposur TRA	10,869	10,869
C	<i>Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</i>		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
11	Aset Lainnya	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-



Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6	Kredit Beragun Properti Komersial
7	Kredit Kepada Pegawai/Pensiunan
8	Kredit Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9	Tagihan Kepada Korporasi
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
Total	

Tabel 6.1.2 Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal
6	Kredit Beragun Properti Komersial
7	Kredit Kepada Pegawai/Pensiunan
8	Kredit Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
9	Tagihan Kepada Korporasi
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11	Aset Lainnya
Total	



(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	624,335	-	-	270,788	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	14,655	2,931	2,931	14,936	2,987	2,987
	14,856	5,429	5,429	13,284	4,831	4,831
	3,914	3,914	3,914	3,715	3,715	3,715
	442	221	221	1,352	676	676
	570,353	427,765	421,613	505,329	378,997	374,180
	692,767	673,065	603,024	558,227	537,631	462,213
	-	-	-	-	-	-
	29,159	-	17,561	30,604	-	16,623
	1,950,481	1,113,325	1,054,693	1,398,235	928,837	865,225

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	50	38	15
	10,869	10,869	-	4,534	4,534	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	10,869	10,869	-	4,584	4,572	15



Tabel 6.1.3 Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan

No	Kategori Portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Kredit Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
Total	

Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen
(*settlement risk*)

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1	Delivery versus payment
	a. Beban Modal 8% (5 -15 hari)
	b. Beban Modal 50% (16 - 30 hari)
	c. Beban Modal 75% (31 - 45 hari)
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
2	Non delivery versus payment
Total	



(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi
(1)	(2)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi Persyaratan
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi Persyaratan
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Prinsip kehati-hatian dalam umum
Total	

Tabel 6.1.6 Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah
Bank tidak menjalankan usaha syariah

Tabel 6.1.7 Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL



	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
	(3)	(4)	(5)	(6)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
aktivitas sekuritisasi aset bagi bank	0	0	0	0
	0	0	0	0

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
	1,054,693	865,240
	-	0



Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan menggunakan Metode Standar

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan		
		Bank		Konsolidasi *)
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Risiko Suku Bunga	1,686	21,074	-
	a. Risiko Spesifik	1,420	17,749	-
	b. Risiko Umum	266	3,325	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-
3	Risiko Equitas	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-
				-
	Total	1,686	21,074	-

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	
		(1)	(2)	(3)
1	Pendekatan Indikator Dasar	58,240	8,736	
	Total	58,240	8,736	

Tabel 8.1.b Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	
		(1)	(2)	(3)
1	Pendekatan Indikator Dasar	-	-	
	Total			



		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi	
	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	1,484	18,550	-	-
	-	340	4,250	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	1,824	22,800	-	-

		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	
(5)	(6)	(7)	(8)	
109,200	55,326	8,299	103,736	
109,200	55,326	8,299	103,736	

		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	
(5)	(6)	(7)	(8)	
-	-	-	-	



Tabel 9.1 Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individu

No	Pos - Pos	Saldo	Posisi Tanggal Laporan Jatuh Tempo*)		
			<= 1 Bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. NERACA					
A. Aset					
1. Kas		11,598	5,799	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia		604,380	24,909	76,537	6,346
3. Penempatan pada bank lain		114	-	-	-
4. Surat Berharga		68,278	-	48,428	19,850
5. Kredit Yang Diberikan		1,252,929	21,348	45,864	107,395
6. Tagihan lainnya		8,045	8,045	-	-
7. Lain-lain		10,004	10,004	-	-
Total Aset		1,945,344	60,101	170,829	133,591
B. Kewajiban					
1. Dana Pihak Ketiga		1,626,441	525,224	190,595	62,871
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia		-	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain		8,603	-	-	1,250
4. Surat Berharga yang Diterbitkan		-	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima		-	-	-	-
6. Kewajiban lainnya		11,989	11,989	-	-
7. Lain-lain		1,721	1,721	-	-
Total Kewajiban		1,648,754	538,934	190,595	64,121
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		296,590	(478,833)	(19,766)	69,470
II. REKENING ADMINISTRATIF					
A. Tagihan Rekening Administratif					
1. Komitmen					
2. Kontijensi					
Total Tagihan Rekening Administratif					
B. Kewajiban Rekening Administratif					
1. Komitmen		62,913	6,291	18,874	31,457
2. Kontijensi					
Total Kewajiban Rekening Administratif		62,913	6,291	18,874	31,457
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(62,913)	(6,291)	(18,874)	(31,457)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		233,677	(485,124)	(38,640)	38,013
Selisih Kumulatif			(646,183)	(684,823)	(646,810)



(dalam jutaan rupiah)

		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
		Saldo	Jatuh Tempo*					
> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan		<= 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
-	-	13,981	6,991	-	-	-	-	
28,720	-	251,434	-	19,843	19,546	-	-	
-	-	496	-	-	-	-	-	
-	-	68,631	-	9,435	59,196	-	-	
296,739	772,103	1,052,069	18,097	46,687	80,749	294,035	601,302	
-	-	5,851	5,851	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
325,459	772,103	1,392,462	30,939	75,965	159,491	294,035	601,302	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
98,047	113,401	1,183,151	433,060	261,603	40,860	68,877	79,257	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1,936	-	39,730	21,008	100	1,450	1,500	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5,188	5,188	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
99,983	113,401	1,228,069	459,256	261,703	42,310	70,377	79,257	
225,476	658,702	164,393	(428,317)	(185,378)	117,181	223,658	522,045	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	44,382	4,438	13,315	22,191	-	-	
-	-	44,382	4,438	13,315	22,191	-	-	
-	-	(44,382)	(4,438)	(13,315)	(22,191)	-	-	
225,476	658,702	120,011	(432,755)	(199,053)	(94,990)	(223,658)	522,045	
(421,334)	237,368		(521,629)	(720,681)	(625,692)	(402,034)	(120,011)	





BAGIAN VII SUMBER DAYA MANUSIA



“Sumber daya manusia merupakan aset yang paling bernilai, oleh karenanya pengembangan SDM selalu menjadi salah satu prioritas utama kami”.

Strategi Sumber Daya Manusia (SDM) ditujukan untuk membangun kapabilitas SDM yang berintegritas agar dapat menunjang perkembangan bisnis bank berkelanjutan sekaligus mendorong keterlibatan setiap karyawan memberikan kontribusi mengatur efisiensi biaya yang optimal. Bank Ina Perdana terus melakukan penyempurnaan dalam kebijakan SDM yang diselaraskan dengan strategi bisnis jangka panjang.

Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dimulai pada saat perekrutan dan seleksi untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas untuk selanjutnya dilengkapi dengan prose-proses pengembangan, pendidikan, dan pelatihan. Komitmen ini tercermin dari realisasi biaya pelatihan tahun 2014 sebesar 8,57% dari biaya tenaga kerja. Tahun 2014 Bank telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sebanyak 70 program yang diikuti sebanyak 1.159 peserta baik yang diadakan secara *in house*

program maupun secara *external program*.

Pada proses transformasi ini, Bank Ina Perdana perlu membangun SDM demi mendukung peralihan di masa depan melalui berbagai program pengembangan SDM

Jumlah Karyawan dan Tingkat Pendidikan

Jumlah karyawan tetap Bank Ina Perdana tahun 2014 sebanyak 235 orang dan dibanding tahun 2013 sebanyak 231 orang, tidak ada perubahan yang signifikan. Adapun tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat strata 1 (S1) sebanyak 166 karyawan, pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 29 karyawan, pendidikan diploma 3 sebanyak 23 karyawan, dan strata 2 (S2) sebanyak 8 karyawan. Kelompok Usia terbanyak antara 25 s/d 34 tahun.



NAMA PROGRAM	JUMLAH PROGRAM	2014
<i>In House Programs</i>	39	1117
<i>External Programs</i>	31	42

KARYAWAN OUTSOURCE

<i>Outsource Security</i>	27
<i>Outsource Driver</i>	13
<i>Outsource OB</i>	18
<i>Outsource Call Center</i>	1
TOTAL	59

KELOMPOK USIA :

20 - 24 tahun	22
25 - 29 tahun	59
30 - 34 tahun	57
35 - 39 tahun	23
40 - 44 tahun	20
45 - 49 tahun	27
50 - 54 tahun	15
> 55 tahun	12
TOTAL	235

JENJANG PENDIDIKAN :

SD	5
SMP	2
SMA	29
D1	2
D3	23
S1	166
S2	8
TOTAL	235





BAGIAN VIII CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



“Program-program CSR dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan difokuskan pada pendidikan sebagai pengembangan manusia dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat “

Sebagai pelaku bisnis, Bank Ina Perdana tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang memberikan manfaat bagi para nasabahnya maupun pemegang saham, namun Bank Ina Perdana selalu peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Hal ini terwujud kepada komitmen Bank Ina Perdana untuk secara berkesinambungan melaksanakan program sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dengan demikian Bank Ina Perdana akan selalu berupaya dalam membangun serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan kegiatan tersebut maka keberadaan Bank Ina Perdana akan mampu memberikan suatu nilai tambah yang bermanfaat bagi para *Stakeholders* maupun masyarakat luas.

Program kegiatan CSR di Bank Ina Perdana, difokuskan dalam bentuk penyaluran bantuan pendidikan bagi para siswa selokah (beasiswa) maupun kegiatan sosial yang bersifat membantu dan mendukung para masyarakat usaha

mikro untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan demikian kontribusi yang diberikan akan sangat berdampak positif bagi peningkatan masyarakat kecil khususnya dan meningkatkan mutu generasi muda yang mampu mengangkat kemajuan bangsa Indonesia dan bersaing positif dimasa depan. Untuk itu Bank Ina Perdana akan berkomitmen kuat untuk terus menumbuh kembangkan kegiatan CSR ini dan memberikan kontribusi serta sumbangsuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Bentuk kegiatan CSR yang dilakukan sepanjang tahun 2014 adalah :

1. Kegiatan Sosial

Tanggal 3 Desember 2014, telah di selenggarakan kegiatan CSR yang bertemakan “Peningkatan Produktifitas Pengusaha Mikro Wanita Indonesia Melalui Pembiayaan yang Sehat” yang berlokasi di Cisarua Bogor, Jawa Barat, Bank Ina Perdana melakukan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kepedulian kepada masyarakat usaha mikro yang memiliki potensi berkembang di bidang



Agriculture. Dalam kegiatan tersebut, Bank Ina Perdana bekerjasama dengan mitranya yaitu, PT. Dana Mandiri Sejahtera dan BPR Parasahabat Bogor. Pada kesempatan ini, Bank Ina Perdana yang diwakili oleh Edy Kuntardjo selaku Direktur Utama telah membagikan paket bingkisan berupa alat pertanian penyemprot hama kepada para *End User* binaan dari mitra-mitra tersebut yang akan dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka. Kedepannya Bank Ina Perdana akan menggiatkan kegiatan-kegiatan sejenis.

2. Pemberian Dana Beasiswa

Sebagai bentuk kepedulian dalam dunia pendidikan nasional, Bank Ina Perdana secara terus menerus telah menjalin kerjasama dengan Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) dalam bentuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa UKRIDA melalui program "*Clement Suleeman Scholarship Fund*".

Penandatanganan kerjasama ini diwakili oleh pihak manajemen Bank Ina yaitu : Hari Sugiharto selaku Komisaris dan Edy Kuntardjo selaku Direktur Utama Bank, sedangkan pihak

UKRIDA diwakili oleh Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, B.A., M. Th. selaku Rektor Ukrida. Penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2014.

Pemberian beasiswa tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini, dan pemberian beasiswa tersebut telah dilakukan setiap tahunnya kepada mahasiswa UKRIDA, baik yang berstatus mahasiswa baru atau lama yang memiliki prestasi akademis yang gemilang.



PT BANK INA PERDANA Tbk

Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Halaman

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

LAPORAN KEUANGAN - untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Laporan Posisi Keuangan	5
Laporan Laba Rugi Komprehensif	7
Laporan Perubahan Ekuitas	8
Laporan Arus Kas	9
Catatan atas Laporan Keuangan	10

Registered Public Accountants
Business License No.1219/KM.1/2011
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T : 62-21-570 8111
F : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 02111215SA

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Ina Perdana Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

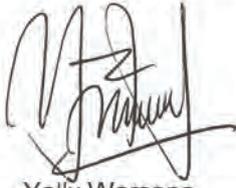
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

26 Februari 2015

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

PT BANK INA PERDANA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Edy Kuntardjo |
| Alamat Kantor | : Wisma BSG, Lantai 1,
Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP | : Taman Alfa Indah B3/20 RT. 008 RW. 007
Joglo – Kembangan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon | : 021 – 385 9050 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Kiung Hui Ngo |
| Alamat Kantor | : Wisma BSG, Lantai 1,
Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP | : Cluster Navarra NV 1/21, Modernland
Tangerang |
| Nomor Telepon | : 021 – 385 9050 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2015

		
<u>Edy Kuntardjo</u> Direktur Utama		<u>Kiung Hui Ngo</u> Direktur

PT BANK INA PERDANA TBK

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ASET			
Kas	2,18,33	11.598	13.981
Giro pada Bank Indonesia	2,4,18	126.736	88.865
Giro pada bank lain - Pihak ketiga	2,5,18	113	496
Penempatan pada Bank Indonesia	2,6,18	331.147	123.180
Efek-efek - Pihak ketiga	2,7,18	214.775	108.019
Kredit yang diberikan	2,8,18		
Pihak berelasi	30	51.389	45.688
Pihak ketiga		<u>1.201.361</u>	<u>1.006.380</u>
Kredit yang diberikan		1.252.750	1.052.068
Dikurangi-cadangan			
kerugian penurunan nilai		<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah kredit- bersih		1.249.168	1.051.067
Pendapatan bunga akrual	2,9,18,30	8.045	5.850
Biaya dibayar dimuka	2,10,30	7.090	5.448
Aset tetap	2,11		
Biaya perolehan		10.152	13.611
Akumulasi penyusutan		<u>(9.131)</u>	<u>(11.839)</u>
Jumlah - bersih		<u>1.021</u>	<u>1.772</u>
Aset pajak tangguhan	2,28	489	450
Aset lain-lain - bersih	2,12,18	<u>1.405</u>	<u>3.043</u>
JUMLAH ASET		<u><u>1.951.587</u></u>	<u><u>1.402.171</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK INA PERDANA TBK

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2,13,18	1.162	1.324
Simpanan	2,14,18		
Pihak berelasi	30	185.107	68.398
Pihak ketiga		<u>1.441.334</u>	<u>1.114.703</u>
Jumlah		1.626.441	1.183.101
Simpanan dari bank lain	2,15,18	8.603	39.729
Utang pajak	2,16,28	3.686	2.418
Beban bunga akrual	2,17,18,30	6.820	3.467
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,27	322	165
Liabilitas lain-lain	2	<u>1.722</u>	<u>1.716</u>
Jumlah Liabilitas		<u>1.648.756</u>	<u>1.231.920</u>
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Modal dasar - 6.320.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Modal ditempatkan dan disetor - 2.100.000.000 saham dan 1.580.000.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	19	210.000	158.000
Tambahan modal disetor - bersih	20	65.492	-
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	2,7	(1.821)	(1.567)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	21	4.300	2.735
Tidak ditentukan penggunaannya		<u>24.860</u>	<u>11.083</u>
Jumlah Ekuitas		<u>302.831</u>	<u>170.251</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.951.587</u>	<u>1.402.171</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK INA PERDANA TBK
 Laporan Laba Rugi Komprehensif
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	2		
Pendapatan bunga	22,30	182.446	143.443
Beban bunga	23,30	(110.507)	(86.590)
PENDAPATAN BUNGA BERSIH		<u>71.939</u>	<u>56.853</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2		
Keuntungan penjualan aset tetap	11	2.405	63
Pendapatan administrasi		1.692	2.005
Pendapatan provisi dan komisi lainnya		1.041	1.329
Laba dari kenaikan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	7	65	-
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif	5,7,8	-	514
Keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek - bersih	7	-	80
Selisih kurs		-	49
Pendapatan lain-lain		444	496
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>5.647</u>	<u>4.536</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	2		
Beban umum dan administrasi	25,30	28.247	27.192
Beban karyawan	24	25.241	22.279
Penyisihan kerugian aset produktif	5,7,8	3.165	-
Rugi dari penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	7	-	575
Rugi penjualan agunan yang diambil alih		-	77
Beban lainnya		291	246
Jumlah Beban Operasional		<u>56.944</u>	<u>50.369</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>20.642</u>	<u>11.020</u>
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	2,28		
Pajak kini		5.339	3.234
Pajak tangguhan		(39)	(38)
		<u>5.300</u>	<u>3.196</u>
LABA BERSIH		<u>15.342</u>	<u>7.824</u>
RUGI KOMPREHENSIF LAIN			
Kerugian yang belum di realisasi atas penurunan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - bersih	2,7	(254)	(1.548)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>15.088</u>	<u>6.276</u>
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	2,26	<u>7,14</u>	<u>5,28</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK INA PERDANA TBK
 Laporan Perubahan Ekuitas
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahhan Modal Disetor	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Penurunan Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
					Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013		128.000	-	(19)	1.920	4.074	133.975
Pembentukan cadangan umum	21	-	-	-	815	(815)	-
Setoran modal	19	30.000	-	-	-	-	30.000
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	(1.548)	-	7.824	6.276
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013		158.000	-	(1.567)	2.735	11.083	170.251
Penerimaan dari penerbitan saham melalui penawaran umum perdana	19	52.000	65.492	-	-	-	117.492
Pembentukan cadangan umum	21	-	-	-	1.565	(1.565)	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	(254)	-	15.342	15.088
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014		210.000	65.492	(1.821)	4.300	24.860	302.831

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK INA PERDANA TBK

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	180.253	143.176
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	3.176	3.830
Pembayaran bunga	(107.154)	(86.988)
Pembayaran beban operasional lainnya	(27.091)	(25.042)
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(25.241)	(22.279)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.257)	(3.034)
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	18.686	9.663
Perubahan aset dan liabilitas yang digunakan untuk operasi:		
Efek-efek	(106.945)	(43.546)
Kredit yang diberikan	(201.266)	30.813
Pendapatan yang masih harus diterima		
Biaya dibayar di muka	(1.641)	149
Aset lain-lain	1.502	(1.293)
Agunan yang diambil alih	-	75
Liabilitas segera	(162)	676
Simpanan	443.340	(144.710)
Simpanan pada bank lain	(31.126)	(985)
Utang pajak	1.186	(1.246)
Liabilitas lain-lain	5	144
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>123.579</u>	<u>(150.260)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(421)	(389)
Hasil penjualan aset tetap	2.422	66
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>2.001</u>	<u>(323)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penerbitan modal saham melalui penawaran umum perdana	117.492	-
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	30.000
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>117.492</u>	<u>30.000</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	243.072	(120.583)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	226.522	347.056
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	49
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>469.594</u>	<u>226.522</u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari :		
Kas	11.598	13.981
Giro pada Bank Indonesia	126.736	88.865
Giro pada bank lain	113	496
Penempatan pada Bank Indonesia	331.147	123.180
Jumlah	<u>469.594</u>	<u>226.522</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Ina Perdana Tbk ("Perusahaan") didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1990 berdasarkan Akta No. 32 tanggal 9 Februari 1990 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1990.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 31 tanggal 9 September 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai:

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perusahaan (*Initial Public Offering*) dan untuk mengubah status Perusahaan dari "Perusahaan Tertutup" menjadi "Perusahaan Terbuka".
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan.
3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 400.000 menjadi sebesar Rp 632.000.
4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham, berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas Saham ("Penawaran Umum"), dari semula Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham.
5. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perusahaan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 790.000.000 lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum perdana saham kepada masyarakat dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut.
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk:
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat;
 - Menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
8. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
9. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan antara lain guna menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 September 2013 serta telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No BI/DIR/121/0913 tanggal 12 September 2013.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma BSG, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta. Perusahaan memiliki 8 kantor cabang, 9 kantor cabang pembantu dan 5 kantor kas yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Lumajang, Jogjakarta, dan Solo.

Perusahaan telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 524/KMK.13/1991 tanggal 3 Juni 1991, selanjutnya Perusahaan melakukan operasi komersial pada bulan Juli 1991.

Pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) Perusahaan adalah Oki Widjaja dan Pieter Tanuri melalui PT Philadel Terra Lestari. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, PT Philadel Terra Lestari masih dalam proses persetujuan di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-484/D.04/2013 untuk penawaran umum perdana atas 520.000.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham (dalam Rupiah penuh) pada harga penawaran Rp 240 per saham (dalam Rupiah penuh). Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar 99% atau sebanyak 2.079.000.000 saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

c. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 105 tanggal 27 November 2013, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen	:	Birawa Natapradja, S.H.
Komisaris Independen	:	Hari Sugiharto
Komisaris	:	Winadewi Hanantha

Direksi:

Direktur Utama	:	Drs. Edy Kuntardjo
Direktur Kepatuhan	:	Wardoyo
Direktur	:	Kiung Hui Ngo

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan keanggotaan komite-komite yang dimiliki Perusahaan yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Komite Audit		
Ketua	: Birawa Natapradja	Birawa Natapradja
Anggota	: Dr. Timotius Edy Sukarno Hari Sugiharto	Dr. Timotius Edy Sukarno Hari Sugiharto Winadewi Hanantha
Komite Remunerasi dan Nominasi		
Ketua	: Hari Sugiharto	Hari Sugiharto
Anggota	: Birawa Natapradja Winadewi Hanantha Wenijati	Birawa Natapradja Winadewi Hanantha Wenijati
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	: Hari Sugiharto	Hari Sugiharto
Anggota	: Dr. Timotius Edy Sukarno Birawa Natapradja Winadewi Hanantha	Dr. Timotius Edy Sukarno Birawa Natapradja Winadewi Hanantha

Ketua Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rony Hermawan.

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris, Direksi, *Group Head*, dan Pimpinan Cabang.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 235 karyawan dan 231 karyawan tahun 2013.

Laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 26 Februari 2015. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-347/ BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan efek-efek dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak dijamin serta yang tidak dibatasi pencairannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan menjabarkan transaksi dalam mata uang asing ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16:00 WIB. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2014 (dalam Rupiah penuh)	2013 (dalam Rupiah penuh)
Euro	15.053,35	16.759,31
Dolar Amerika Serikat	12.385,00	12.170,00
Dolar Australia	10.148,27	10.855,65
Dolar Singapura	9.376,18	9.622,08
Dolar Hong Kong	1.596,97	1.569,54
Yen Jepang	103,56	115,75

c. Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - c. personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b. aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan mengklasifikasikan efek-efek berupa obligasi korporasi dalam kategori ini.

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan mengklasifikasikan kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, kredit yang diberikan, pendapatan bunga akrual serta aset lain-lain dalam kategori ini.

3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan mengklasifikasikan efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dalam kategori ini.

4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain - "Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual", sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi laba atau rugi direklasifikasi ke komponen laba rugi dan dikeluarkan dari akun "Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual".

Perusahaan mengklasifikasikan mencakup investasi efek-efek dalam bentuk obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi dalam kategori ini.

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mempunyai liabilitas keuangan dalam kategori ini.

2. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas segera, simpanan, simpanan dari bank lain, beban bunga akrual dan liabilitas lain-lain dalam kategori ini.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan, atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perusahaan telah memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Perusahaan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Penurunan Nilai Dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, kesulitan keuangan, restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan Perusahaan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi debitur atau penerbit dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Ketika aset keuangan tidak tertagih, aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

3. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam komponen laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui komponen laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui komponen laba rugi.

g. Giro Wajib Minimum (GWM)

Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan No.12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 dan terakhir diubah dengan PBI No. 15/15/PBI/2013 yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Desember 2013. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM terdiri dari GWM Rupiah dan GWM mata uang asing. GWM Rupiah terdiri dari GWM Utama, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih LDR yang dimiliki oleh bank dan target LDR yang wajib dipenuhi oleh bank.

	%
Rupiah	
GWM Primer	8,00
GWM Sekunder	4,00
GWM LDR	0,01

h. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk *deposit facility* dikategorikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

i. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari SBI, SDBI, obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi.

SBI dan SDBI diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, obligasi Pemerintah diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, sedangkan obligasi korporasi diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Pada pengukuran awal, SBI, SDBI dan Obligasi Pemerintah dan korporasi disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk obligasi korporasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi diakui secara langsung sebagai laba/rugi.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi adalah pinjaman yang diberikan dan piutang.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo kredit, maka akun kredit yang diberikan bersama dengan akun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), jika ada, akan dikeluarkan dari laporan posisi keuangan.

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui sebagai laba/rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Batasan suatu aset dinyatakan tidak dapat ditagih adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit telah mengalami penurunan nilai;
2. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil; dan
3. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih oleh Perusahaan.

Pengambilalihan agunan akan diakui sebagai penyelesaian atau pelunasan kredit berdasarkan kesepakatan debitur dan Perusahaan.

Kredit dihapusbukukan dengan mendebit akun cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai pada saat diterima kembali. Jika jumlah yang diterima kembali lebih besar daripada nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

k. Kontrak Jaminan Keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengakuan awal jaminan keuangan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar pada saat jaminan diberikan. Nilai wajar jaminan keuangan pada saat berlakunya transaksi pada umumnya sama dengan premi yang diterima karena diberikan dengan syarat dan kondisi normal dan nilai wajar awal diamortisasi sepanjang umur jaminan keuangan.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara biaya perolehan diamortisasi dengan nilai kini pembayaran yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi besar kemungkinan terjadinya), dan selisihnya dibebankan sebagai beban operasional lainnya pada laporan laba rugi komprehensif.

i. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (revisi 2011) "Aset Tetap".

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Perabotan dan peralatan	4
Kendaraan bermotor	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

m. Transaksi Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) "Sewa".

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbaharui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
2. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
3. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
4. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario 1, 3 atau 4 dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario 2.

Sewa Operasi

Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif dengan dasar garis lurus (*straight-line*) selama masa sewa.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 (2009) "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "Rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas Perusahaan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

q. Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan merupakan liabilitas kepada nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis, tetapi menggunakan formulir penarikan tersendiri yang hanya berlaku di bank yang bersangkutan dan/atau menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan nasabah pada saat penempatannya, dimana nasabah akan dikenakan penalti apabila melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh temponya.

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro dan deposito berjangka dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian masing-masing.

r. Pengakuan Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif secara akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan dalam kategori investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitungan penurunan nilai.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Provisi dan Komisi Terkait Instrumen Keuangan

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang terkait dengan perolehan instrumen keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual, atau terkait jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dicatat sebagai bagian dari nilai wajar aset atau liabilitas keuangan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Provisi dan Komisi Lainnya

Provisi dan komisi lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan perolehan instrumen keuangan dan jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Sedangkan, pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya yang tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya, meliputi pendapatan yang tidak terkait dengan kredit, seperti pendapatan terkait dengan penerbitan bank garansi, dan pendapatan yang diakui pada saat jasa diberikan.

t. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat terjadinya.

Beban operasional lainnya diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

u. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010) "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas pajak dicatat ketika surat tagihan pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat hasil banding telah ditetapkan.

v. Laba per Saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011) "Laba Per Saham".

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan laba per saham dasar disesuaikan secara retrospektif sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan sebagai akibat dari pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) di tahun 2013 (Catatan 26).

w. Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) "Imbalan Kerja".

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial (Jamsostek). Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

Program pensiun manfaat pasti

Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk sebagian karyawan tetap dimana Perusahaan membayar iuran kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun).

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan manfaat pasti yang dibentuk dengan pendanaan khusus melalui program dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, hasil yang diharapkan dari aset program, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (*vested*).

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan bersih sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti setelah memperhitungkan keuntungan atau kerugian aktuarial yang tidak diakui, beban jasa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aset program.

x. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

PSAK No. 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi" mensyaratkan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing produk, yang mana serupa dengan segmen usaha yang dilaporkan pada periode-periode terdahulu.

y. Provisi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima dan jumlah penggantian dapat diukur dengan andal.

z. Biaya Emisi Penerbitan Saham

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK (atau sekarang OJK) No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor", dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2e.

b. **Aset Keuangan yang Tidak Memiliki Kuotasi Harga di Pasar yang Aktif**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan di pasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

c. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukkan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman diberikan dan piutang Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diungkapkan sebagai berikut:

	Nilai Tercatat	
	2014	2013
Aset Keuangan		
<i>Dimiliki hingga jatuh tempo</i>		
Efek-efek	146.497	39.389
<i>Pinjaman diberikan dan piutang</i>		
Kas	11.598	13.981
Giro pada Bank Indonesia	126.736	88.865
Giro pada bank lain	113	496
Penempatan pada Bank Indonesia	331.147	123.180
Kredit yang diberikan - bersih	1.249.168	1.051.067
Pendapatan bunga akrual	8.045	5.850
Aset lain-lain - bersih	643	1.294
Jumlah	1.873.947	1.324.122

d. Komitmen sewa operasi – Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan dan kendaraan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual

Perusahaan berpedoman pada PSAK No. 55 (Revisi 2011) untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas investasi tersedia untuk dijual. Penentuan tersebut mensyaratkan pertimbangan yang signifikan. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Perusahaan mengevaluasi, antara lain, lamanya dan sejauh mana nilai wajar investasi tersebut berada di bawah biaya perolehannya; tingkat kesehatan keuangan serta gambaran bisnis jangka pendek dari *investee*, termasuk faktor-faktor seperti kinerja industri dan sektor industri, perubahan teknologi serta arus kas operasi serta pendanaan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 18.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap. Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 21.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diungkapkan pada Catatan 11.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 27 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 27.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset non-keuangan berupa aset tetap diungkapkan pada Catatan 11.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 28.

4. Giro pada Bank Indonesia

Merupakan rekening giro dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan pada Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Giro Wajib Minimum (GWM) Perusahaan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama masing-masing adalah sebesar Rp 124.333 dan Rp 88.263, serta untuk GWM sekunder masing-masing adalah sebesar Rp 62.167 dan Rp 44.131.

Rasio GWM Perusahaan untuk mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	%	%
GWM yang telah dibentuk		
GWM Primer	8,15	8,05
GWM Sekunder	31,05	19,63
GWM LDR	0,12	0,01

5. Giro pada Bank Lain

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	104	403
PT Bank Central Asia Tbk	3	63
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2	27
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2	3
PT Bank Permata Tbk	2	-
Jumlah	<u>113</u>	<u>496</u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah dalam Rupiah.

Kolektibilitas dari giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dikelompokkan Lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir.

Suku bunga rata-rata pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 0,26% dan 0,16% per tahun.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Saldo awal	1
Pemulihan tahun berjalan	<u>(1)</u>
Saldo akhir	<u><u>-</u></u>

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, karena manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain dapat ditagih.

6. Penempatan pada Bank Indonesia

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Penempatan pada Bank Indonesia		
<i>Deposit facility</i>		
Nilai Nominal	331.200	123.200
Bunga yang belum diamortisasi	<u>(53)</u>	<u>(20)</u>
Jumlah	<u><u>331.147</u></u>	<u><u>123.180</u></u>

Perusahaan memiliki penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan.

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Lancar.

Suku bunga rata-rata per tahun penempatan pada Bank Indonesia pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebesar 5,75%.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat saldo penempatan pada Bank Indonesia yang dijaminan.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. Efek-efek

a. Jenis dan tujuan investasi efek-efek adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	85.000	-
Sertifikat Bank Indonesia	63.958	40.000
Bunga diterima dimuka yang belum diamortisasi	(2.461)	(611)
Nilai bersih	146.497	39.389
Tersedia untuk dijual		
Obligasi Pemerintah SBSN RI IFR-0064		
Nilai wajar	19.850	19.250
Obligasi korporasi		
PLN XII 2010 seri B	10.175	10.585
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II 2012	9.803	9.409
Mayora Indah IV TH 2012	9.275	9.829
Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014	5.000	-
Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II 2012 Seri B	4.675	4.967
Astra Sedaya XI 2010 seri F	-	5.155
Nilai wajar	38.928	39.945
Jumlah tersedia untuk dijual	58.778	59.195
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi korporasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III 2013 Seri B	9.500	9.435
Efek-efek - bersih	214.775	108.019

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun.

c. Suku bunga rata-rata per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:

	2014	2013
	%	%
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	6,49	-
Sertifikat Bank Indonesia	6,59	5,73
Obligasi Pemerintah	6,12	6,12
Obligasi korporasi	9,55	9,28

d. Nilai wajar dari efek-efek (termasuk obligasi Pemerintah) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 214.775 dan Rp 108.019.

e. Rincian peringkat obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) atau Fitch seperti yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

	2014	2013
PLN XII th 2010 seri B	idAAA	idAAA
Subordinasi Berkelanjutan I		
Bank Permata Tahap II 2012	idAA+	idAA
Mayora Indah IV 2012	idAA-	idAA-
Agung Podomoro Land		
Tahap III Tahun 2014	idA	-
Berkelanjutan I Bank		
BTPN Tahap II 2012 Seri B	AA (idn)	AA-(idn)
Berkelanjutan I Bank BTPN		
Tahap III 2013 Seri B	AA (idn)	AA-(idn)
Astra Sedaya XI 2010 seri F	-	idAA+

f. Kolektibilitas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Lancar.

g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	2013
	%
Saldo awal	272
Pemulihan tahun berjalan	(272)
Saldo akhir	-

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 karena manajemen berpendapat bahwa seluruh efek-efek dapat ditagih.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. Kredit yang Diberikan

a. Jenis Kredit

	2014	2013
Pihak berelasi (Catatan 30)		
Modal kerja	40.841	44.713
Investasi	9.900	-
Konsumsi	648	975
Jumlah	<u>51.389</u>	<u>45.688</u>
Pihak ketiga		
Modal kerja	590.402	427.043
Investasi	313.818	135.094
Konsumsi	297.141	444.243
Jumlah	<u>1.201.361</u>	<u>1.006.380</u>
Jumlah	<u>1.252.750</u>	<u>1.052.068</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582)	(1.001)
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

b. Sektor Ekonomi

	2014	2013
Perantara keuangan	367.842	241.396
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	288.986	291.748
Transportasi pergudangan dan komunikasi	221.957	200.696
Perdagangan besar dan eceran	132.277	119.453
Real estat usaha persewaan dan jasa	86.230	68.268
Konstruksi	48.598	50.665
Industri pengolahan	30.317	30.001
Penyediaan akomodasi dan makan minum	16.031	19.822
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	14.179	5.028
Pertanian	13.796	14.284
Pertambangan	10.156	4.341
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	12.190	312
Kegiatan yang belum jelas batasannya	8.802	6.018
Jasa pendidikan	1.378	-
Perikanan	11	-
Listrik	-	36
Jumlah Kredit	<u>1.252.750</u>	<u>1.052.068</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Jangka Waktu

Klasifikasi kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan periode perjanjian kredit

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jangka waktu		
Hingga 1 tahun	409.984	383.660
1-2 tahun	104.433	90.717
2-5 tahun	666.021	505.713
Lebih dari 5 tahun	<u>72.312</u>	<u>71.978</u>
Jumlah	1.252.750	1.052.068
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

2. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jangka waktu		
Telah jatuh tempo	1.846	1.630
Hingga 1 tahun	479.622	449.377
1-2 tahun	231.011	189.383
2-5 tahun	480.217	351.727
Lebih dari 5 tahun	<u>60.054</u>	<u>59.951</u>
Jumlah	1.252.750	1.052.068
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

d. Saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lancar	1.182.005	1.013.992
Dalam perhatian khusus	60.956	34.207
Kurang lancar	1.648	-
Diragukan	3.415	-
Macet	<u>4.726</u>	<u>3.869</u>
Jumlah	1.252.750	1.052.068
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo kredit berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Individual	572.990	576.475
Kolektif	<u>679.760</u>	<u>475.593</u>
Jumlah	1.252.750	1.052.068
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.582)</u>	<u>(1.001)</u>
Jumlah	<u><u>1.249.168</u></u>	<u><u>1.051.067</u></u>

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Saldo awal		
Individual	660	728
Kolektif	341	1.110
Pencadangan (pemulihan)		
Individual	1.786	602
Kolektif	1.379	(769)
Penghapusan		
Individual	(564)	(670)
Kolektif	<u>(20)</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u><u>3.582</u></u>	<u><u>1.001</u></u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut.

- g. Suku bunga rata-rata per tahun

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Konsumsi	14,50%	18,46%
Modal kerja	12,48%	12,04%
Investasi	17,15%	12,81%
Direksi dan karyawan	7,89%	6,00%

- h. Perusahaan mengadakan kerja sama pembiayaan (*Joint financing* dan *channeling*) dengan beberapa perusahaan pembiayaan (Catatan 36) untuk kendaraan bermotor dan barang elektronik. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo kredit yang disalurkan melalui sistem pembiayaan bersama sebesar Rp 439.581 dan Rp 401.288.

- i. Kredit karyawan merupakan kredit untuk keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada karyawan dibebani bunga rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar 7,89% dan 6,00%.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- j. Rasio kredit bermasalah - bersih pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 0,61% dan 0,29%. Rasio kredit bermasalah - kotor pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 0,80% dan 0,38%.

- k. Rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Jasa	3.380	-
Industri pengolahan	1.663	1.787
Angkutan	1.648	-
Perumahan	1.442	1.966
Kegiatan yang belum jelas batasannya	1	55
Perdagangan, restoran dan hotel	1.655	61
Jumlah	<u>9.789</u>	<u>3.869</u>

- l. Kredit dijamin antara lain dengan deposito, jaminan hipotik, mesin-mesin, kendaraan, piutang usaha dan persediaan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai masing-masing sebesar Rp 78.196 dan Rp 91.620.

- m. Mutasi kredit yang dihapuskan adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Saldo awal	500	500
Mutasi selama tahun berjalan		
Penghapusan	584	670
Hapus tagih	(564)	(670)
Saldo akhir	<u>520</u>	<u>500</u>

- n. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo kredit yang direstruktur masing-masing sebesar Rp 772 dan Rp 894 dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 772 dan Rp 520.

- o. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat penyediaan dana Perusahaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melanggar ataupun melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Pendapatan Bunga AkruaI

Rincian pendapatan bunga akrual adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Kredit	7.362	5.168
Efek-efek	683	682
Jumlah	<u>8.045</u>	<u>5.850</u>

Pendapatan bunga akrual dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 126 dan Rp 80 (Catatan 30).

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. Biaya Dibayar Dimuka

	2014	2013
Sewa	5.496	3.910
Pemeliharaan aset tak berwujud	435	447
Jasa pengolahan data	262	262
Lain-lain	897	829
Jumlah	7.090	5.448

Biaya dibayar dimuka dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp 285 dan nihil (Catatan 30).

11. Aset Tetap

	1 Januari 2014	Perubahan selama tahun 2014			31 Desember 2014
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya perolehan:					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Perabotan dan peralatan	9.482	421	(180)	(8)	9.715
Kendaraan bermotor	4.129	-	(3.692)	-	437
Jumlah	13.611	421	(3.872)	(8)	10.152
Akumulasi penyusutan:					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Perabotan dan peralatan	8.117	776	(180)	(8)	8.705
Kendaraan bermotor	3.722	379	(3.675)	-	426
Jumlah	11.839	1.155	(3.855)	(8)	9.131
Nilai Tercatat	1.772				1.021
	1 Januari 2013	Perubahan selama tahun 2013		31 Desember 2013	
		Penambahan	Pengurangan		
Biaya perolehan:					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Perabotan dan peralatan	10.563	377	(1.458)	9.482	
Kendaraan bermotor	4.401	12	(284)	4.129	
Jumlah	14.964	389	(1.742)	13.611	
Akumulasi penyusutan:					
<u>Pemilikan Langsung</u>					
Perabotan dan peralatan	8.298	1.274	(1.455)	8.117	
Kendaraan bermotor	3.034	972	(284)	3.722	
Jumlah	11.332	2.246	(1.739)	11.839	
Nilai Tercatat	3.632			1.772	

Jumlah beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.155 dan Rp 2.246 (Catatan 25).

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap Perusahaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, huru-hara, pencurian dan risiko lainnya sebesar Rp 3.107 pada tanggal 31 Desember 2014 pada PT Asuransi Wahana Tata, serta sebesar Rp 3.933 pada tanggal 31 Desember 2013 pada PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Lippo General Insurance Tbk. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Selama tahun 2014 dan 2013, Perusahaan menjual aset tetapnya dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 17 dan Rp 3 pada harga jual masing-masing sebesar Rp 2.422 dan Rp 66. Keuntungan bersih penjualan aset tetap tersebut dibukukan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap tersebut masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak ada aset tetap Perusahaan yang ditempatkan sebagai jaminan.

12. Aset Lain-lain - bersih

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Barang cetakan dan materai	384	343
Tagihan ATM bersama	357	1.008
Aset tak berwujud - bersih	350	374
Setoran jaminan	286	286
Lain-lain	28	1.032
Jumlah	<u>1.405</u>	<u>3.043</u>

13. Liabilitas Segera

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bunga deposito jatuh tempo	627	285
Tarikan dana ATM Bersama	438	939
Kiriman uang	61	72
Listrik dan telepon	36	27
Lain-lain	-	1
Jumlah	<u>1.162</u>	<u>1.324</u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. Simpanan

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Giro	115.562	63.806
Tabungan	167.941	134.337
Deposito	<u>1.342.938</u>	<u>984.958</u>
Jumlah	<u><u>1.626.441</u></u>	<u><u>1.183.101</u></u>

a. Giro terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak berelasi (Catatan 30)	4.838	2.121
Pihak ketiga	<u>110.724</u>	<u>61.685</u>
Jumlah	<u><u>115.562</u></u>	<u><u>63.806</u></u>

Suku bunga per tahun atas giro untuk tahun 2014 dan 2013 berkisar antara 1,00% - 3,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat saldo giro yang dijaminan sebagai jaminan Bank Garansi (Catatan 29).

b. Tabungan terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak berelasi (Catatan 30)		
Tabina Eksekutif	10.943	5.691
Tabungan Perdana	3.308	3.406
Tabungan Tabina	1.698	4.175
Tabungan Pinter	8	77
Jumlah	<u>15.957</u>	<u>13.349</u>
Pihak ketiga		
Tabungan Tabina	90.084	56.198
Tabungan Perdana	44.286	45.168
Tabina Mahasiswa	11.689	11.739
Tabina Eksekutif	3.189	4.926
Tabungan Pinter	1.501	1.976
Tabunganku	973	821
Tabungan Pasti	262	160
Jumlah	<u>151.984</u>	<u>120.988</u>
Jumlah	<u><u>167.941</u></u>	<u><u>134.337</u></u>

Suku bunga per tahun atas tabungan untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar 0,00% - 5,00%.

Tidak terdapat tabungan yang dijaminan sebagai jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Deposito terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>Deposito on call</i> - pihak ketiga	5.267	17.230
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 30)	164.312	52.928
Pihak ketiga	1.173.359	914.800
Jumlah	<u>1.337.671</u>	<u>967.728</u>
Jumlah	<u><u>1.342.938</u></u>	<u><u>984.958</u></u>

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu:

Berdasarkan periode deposito:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1 bulan atau kurang	1.112.497	842.149
3 bulan	168.722	87.883
6 bulan	31.207	26.126
12 bulan	<u>30.512</u>	<u>28.800</u>
Jumlah	<u><u>1.342.938</u></u>	<u><u>984.958</u></u>

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	1.147.351	872.013
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	162.245	86.372
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	20.346	14.853
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	<u>12.996</u>	<u>11.720</u>
Jumlah	<u><u>1.342.938</u></u>	<u><u>984.958</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp 100.784 dan Rp 90.120, sedangkan saldo deposito yang dijadikan jaminan atas bank garansi masing-masing sebesar Rp 1.395 dan Rp 537 (Catatan 29).

Suku bunga per tahun atas deposito untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing berkisar antara 3,50% - 11,00% dan 4,00% - 10,50%.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain dalam Rupiah seluruhnya merupakan transaksi dengan pihak ketiga, terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Giro	5.014	7.671
Deposito	<u>3.589</u>	<u>32.058</u>
Jumlah	<u><u>8.603</u></u>	<u><u>39.729</u></u>

a. Giro

Suku bunga per tahun atas giro dari bank lain untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing berkisar antara 0,00% - 1,00% dan 1,00% - 1,50%.

b. Deposito

Terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Deposito berjangka	3.589	29.058
<i>Deposito on call</i>	<u>-</u>	<u>3.000</u>
Jumlah	<u><u>3.589</u></u>	<u><u>32.058</u></u>

Berdasarkan periode deposito:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kurang dari 1 bulan	403	3.000
1 bulan	-	26.008
3 bulan	-	300
12 bulan	<u>3.186</u>	<u>2.750</u>
Jumlah	<u><u>3.589</u></u>	<u><u>32.058</u></u>

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kurang dari 1 bulan	403	28.758
1 bulan	-	350
3 bulan	-	1.450
12 bulan	<u>3.186</u>	<u>1.500</u>
Jumlah	<u><u>3.589</u></u>	<u><u>32.058</u></u>

Suku bunga per tahun atas deposito dari bank lain untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing berkisar antara 6,00% - 9,50%.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. Utang Pajak

	2014	2013
Pajak kini (Catatan 28)	487	683
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2) dan 23	2.440	1.440
Pasal 21	295	109
Pasal 25	464	186
Jumlah pajak penghasilan	<u>3.199</u>	<u>1.735</u>
Jumlah	<u><u>3.686</u></u>	<u><u>2.418</u></u>

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun (dari sebelumnya 10 tahun) setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

17. Beban Bunga Akrua

	2014	2013
Deposito berjangka	6.754	3.332
Deposito - simpanan dari bank lain	7	103
Giro KMK	59	32
Jumlah	<u><u>6.820</u></u>	<u><u>3.467</u></u>

Jumlah beban bunga akrual kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.085 dan Rp 159 (Catatan 30).

18. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah nilai tercatat aset keuangan dan estimasi nilai wajar Perusahaan dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<i>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</i>				
Efek-efek	9.500	9.500	9.435	9.435
<i>Dimiliki hingga jatuh tempo</i>				
Efek-efek	146.497	146.497	39.389	39.389
<i>Tersedia untuk dijual</i>				
Efek-efek	58.778	58.778	59.195	59.195
<i>Pinjaman diberikan dan piutang</i>				
Kas	11.598	11.598	13.981	13.981
Giro pada Bank Indonesia	126.736	126.736	88.865	88.865
Giro pada bank lain	113	113	496	496
Penempatan pada Bank Indonesia	331.147	331.147	123.180	123.180
Kredit yang diberikan - bersih	1.249.168	1.249.168	1.051.067	1.051.067
Pendapatan bunga akrual	8.045	8.045	5.850	5.850
Aset lain-lain	643	643	1.294	1.294
Jumlah Aset Keuangan	1.942.225	1.942.225	1.392.752	1.392.752
Liabilitas Keuangan				
<i>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</i>				
Liabilitas segera	1.162	1.162	1.324	1.324
Simpanan	1.626.441	1.626.441	1.183.101	1.183.101
Simpanan dari bank lain	8.603	8.603	39.729	39.729
Beban bunga akrual	6.820	6.820	3.467	3.467
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.643.026	1.643.026	1.227.621	1.227.621

Hirarki Nilai Wajar

Tabel berikut mengungkapkan hirarki nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014			2013		
	Tingkat 1	Tingkat 2	Jumlah	Tingkat 1	Tingkat 2	Jumlah
Aset Keuangan						
<i>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</i>						
Efek-efek	9.500	-	9.500	9.435	-	9.435
<i>Tersedia untuk dijual</i>						
Efek-efek	58.778	-	58.778	59.195	-	59.195
Jumlah Aset Keuangan	68.278	-	68.278	68.630	-	68.630

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam obligasi (termasuk obligasi Pemerintah) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan adalah kuotasi harga pasar atau kuotasi harga penjual untuk instrumen sejenis.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

- Nilai wajar efek-efek, kecuali Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, adalah berdasarkan harga pasar. Nilai wajar Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, adalah mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai wajar kredit yang diberikan adalah berdasarkan metode arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.
- Nilai wajar aset keuangan selain efek-efek dan kredit yang diberikan adalah mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik sewaktu-waktu, atau jatuh tempo dalam jangka pendek adalah sama dengan yang terutang pada saat penarikan yakni sebesar nilai tercatatnya.

19. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat PT Adimitra Transferindo, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2014		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
PT Philadel Terra Lestari	420.000.000	20,00	42.000
OCBC Securities PTE, LTD - Client A/C ^{*)}	790.000.000	37,62	79.000
Oki Widjaja	84.030.000	4,00	8.403
Masyarakat (Kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	805.970.000	38,38	80.597
Jumlah	2.100.000.000	100,00	210.000

^{*)} OCBC Securities PTE, LTD – Client A/C merupakan pemegang saham bukan pemegang saham pengendali Perusahaan melalui pasar modal.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pemegang Saham	2013		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
PT Kharisma Prima Karya	1.267.200.000	80	126.720
PT Aji Lebur Seketi	228.770.000	15	22.877
Oki Widjaja	84.030.000	5	8.403
Jumlah	<u>1.580.000.000</u>	<u>100</u>	<u>158.000</u>

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013 yang didokumentasikan dalam Akta No. 02 tanggal 1 Mei 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 128.000 menjadi sebesar Rp 158.000 untuk diambil bagian dengan uang tunai oleh PT Aji Lebur Seketi sebesar Rp 22.877 dan Oki Widjaja sebesar Rp 7.123. Perubahan ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 15/22/DPB1/PB1-7 tanggal 6 September 2013.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 9 September 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan mengubah seluruh Anggaran Dasar, termasuk struktur permodalan Perusahaan, yaitu meningkatkan modal dasar dari Rp 400.000 menjadi sebesar Rp 632.000 dan mengubah nilai saham nominal saham dari Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham, serta menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perusahaan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat, sebanyak 790.000.000 lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) yang ditawarkan dengan harga penawaran. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 September 2013 serta telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No. BI/DIR/121/0913 tanggal 12 September 2013.

Hasil penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan telah diterima seluruhnya oleh Perusahaan pada bulan Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah mencatatkan 99% atau sebanyak 2.079.000.000 saham pada Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan telah disetor penuh.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan dalam jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah Saham</u> (Lembar)
Jumlah saham pada tanggal 1 Januari 2013	128.000.000
1 Mei 2013	
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pemegang saham	30.000.000
9 September 2013	
Penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham	<u>1.422.000.000</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013	<u>1.580.000.000</u>
16 Januari 2014	
Peningkatan modal sehubungan dengan penerbitan saham melalui penawaran umum perdana	<u>520.000.000</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	<u><u>2.100.000.000</u></u>

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang periode yang disajikan.

Rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
I. Komponen Modal		
A. Modal Inti	283.950	155.725
B. Modal Pelengkap	<u>11.634</u>	<u>9.906</u>
II. Jumlah modal	<u>295.584</u>	<u>165.631</u>
III. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
Risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	1.054.693	864.838
Risiko pasar	21.074	22.802
Risiko operasional	<u>109.200</u>	<u>103.736</u>
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar dan operasional	1.184.967	991.376

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014	2013
IV Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tersedia		
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit	28,03%	19,15%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	27,48%	18,66%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	25,40%	17,10%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional dan pasar	24,94%	16,71%
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%

20. Tambahan Modal Disetor - Bersih

Akun ini merupakan tambahan modal disetor sehubungan dengan penerbitan saham.

	Saldo (Rp)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014	-
Tambahan modal disetor dari penawaran umum perdana	72.800
Jumlah	72.800
Biaya emisi saham	(7.308)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	65.492

21. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 09 tanggal 5 Mei 2014 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba tahun 2013 sebesar Rp 1.565.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 64 tanggal 30 April 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba tahun 2012 sebesar Rp 815 untuk cadangan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo laba yang ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum masing-masing adalah sebesar Rp 4.300 dan Rp 2.735.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. Pendapatan Bunga

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kredit yang diberikan	162.325	128.779
Efek-efek	9.194	7.412
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.276	6.599
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	<u>651</u>	<u>653</u>
Jumlah	<u><u>182.446</u></u>	<u><u>143.443</u></u>

Pendapatan bunga yang diterima dari pihak berelasi untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 392 dan Rp 2.307 atau masing-masing sebesar 0,21% dan 1,61% dari jumlah pendapatan bunga (Catatan 30).

23. Beban Bunga

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Simpanan		
Deposito	100.188	76.943
Tabungan	4.118	3.889
Giro	<u>2.674</u>	<u>1.770</u>
Jumlah	106.980	82.602
Simpanan dari bank lain		
Deposito	751	1.160
Giro	<u>372</u>	<u>348</u>
Jumlah	1.123	1.508
Premi penjaminan Pemerintah (Catatan 32)	<u>2.404</u>	<u>2.480</u>
Jumlah	<u><u>110.507</u></u>	<u><u>86.590</u></u>

Beban bunga yang dibayarkan kepada pihak berelasi untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.420 dan Rp 3.530 atau masing-masing sebesar 1,28% dan 4,08% dari jumlah beban bunga (Catatan 30).

24. Beban Karyawan

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Gaji pegawai	24.047	19.962
Lain-lain	<u>1.194</u>	<u>2.317</u>
Jumlah	<u><u>25.241</u></u>	<u><u>22.279</u></u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

25. Beban Umum dan Administrasi

	2014	2013
Sewa (Catatan 30)	9.733	8.431
Barang dan jasa	9.148	8.637
Promosi	2.582	2.312
Pendidikan dan pelatihan	2.367	1.313
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 27)	2.131	1.412
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	1.155	2.246
Pemeliharaan dan perbaikan	614	786
Asuransi	250	244
Amortisasi aset tidak berwujud	135	142
Pajak	113	1.640
Lain-lain	19	29
Jumlah	<u>28.247</u>	<u>27.192</u>

Beban umum dan administrasi yang dibayarkan kepada pihak berelasi untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 742 dan Rp 668 atau masing-masing 2,64% dan 2,13% dari beban umum dan administrasi (Catatan 30).

26. Laba per Saham

	2014	2013
Laba bersih	15.342	7.824
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar	2.147.890.411	1.481.369.863
Laba bersih per saham (angka penuh)	7,14	5,28

27. Imbalan Pasca-Kerja

Besarnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Untuk pendanaan imbalan kerja jangka panjang tersebut, Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Imbalan tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun.

Perusahaan telah menunjuk PT Asuransi Allianz untuk mengelola program pensiun tersebut melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1723/1990 tanggal 20 Januari 2006. Pendanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz seluruhnya berasal dari kontribusi pemberi kerja.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Selain program dana pensiun, Perusahaan juga membukukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan khusus.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuarial Indonesia, aktuaris independen, tertanggal 24 Februari 2015.

Jumlah karyawan yang berhak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebanyak 229 dan 224 karyawan.

Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang (yang didanai dan tidak didanai oleh Dana Pensiun) pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang	9.652	8.990	9.133	8.160	5.258
Nilai wajar aset program	(9.330)	(8.579)	(7.217)	(5.353)	(4.618)
Status pendanaan	322	411	1.916	2.807	640
Biaya jasa lalu yang belum diamortisasi	-	(37)	(51)	(66)	(80)
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	-	(209)	(1.709)	(1.496)	113
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	<u>322</u>	<u>165</u>	<u>156</u>	<u>1.245</u>	<u>673</u>

Aset program terdiri dari instrumen pasar uang yang diperdagangkan di bursa dengan nilai wajar berdasarkan laporan keuangan dana pensiun yang telah diaudit adalah sebesar Rp 9.330 dan Rp 8.579 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Rincian beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Beban jasa kini	1.603	1.500
Biaya bunga	764	594
Amortisasi biaya jasa lalu	37	14
Hasil yang diharapkan dari aset program	(729)	(613)
Keuntungan kurtailmen	456	(83)
Jumlah beban imbalan kerja jangka panjang (Catatan 25)	<u>2.131</u>	<u>1.412</u>

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal	165	156
Beban imbalan kerja tahun berjalan luran yang dibayarkan	2.131	1.412
	<u>(1.974)</u>	<u>(1.403)</u>
Saldo akhir	<u>322</u>	<u>165</u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	8,50% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Usia pensiun	56 tahun
luran kematian	10% dari TMI - 2011

28. Pajak Penghasilan

a. Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2014	2013
Pajak kini	5.339	3.234
Pajak tangguhan	(39)	(38)
Jumlah	5.300	3.196

b. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Laba sebelum pajak penghasilan	20.642	11.020
Beda temporer		
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	157	9
Pemulihan kerugian agunan yang diambil alih	-	(75)
Liabilitas lain-lain	-	215
Jumlah	157	149
Beda tetap		
Beban umum dan administrasi	517	205
Sumbangan dan hadiah	40	26
SKPKB	-	1.459
Penyusutan kendaraan	-	76
Jumlah	557	1.766
Laba kena pajak	21.356	12.935
Beban pajak penghasilan	5.339	3.234
Dikurangi :		
Pajak penghasilan pasal 25	(4.852)	(2.551)
Kurang bayar pajak penghasilan (Catatan 16)	487	683

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laba kena pajak tahun 2013 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada bulan Februari 2013, Perusahaan menerima SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas pajak penghasilan pasal 21 dan 23 serta SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pemeriksaan pajak tahun 2011. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas kewajiban pajak tersebut sebesar Rp 1.965 pada bulan Februari 2013 dan telah dibukukan dalam akun beban pajak dalam laporan laba rugi komprehensif.

c. Pajak Tangguhan

	1 Januari 2013	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2013	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2014
Aset pajak tangguhan:					
Liabilitas lain-lain	355	53	408	-	408
Imbalan kerja jangka panjang	39	3	42	39	81
Cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih	18	(18)	-	-	-
Jumlah - bersih	<u>412</u>	<u>38</u>	<u>450</u>	<u>39</u>	<u>489</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>20.642</u>	<u>11.020</u>
Beban pajak atas dasar tarif pajak yang berlaku	<u>5.160</u>	<u>2.755</u>
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap		
Beban umum dan administrasi	130	51
Sumbangan dan hadiah	10	6
SKPKB	-	365
Penyusutan kendaraan	-	19
Jumlah	<u>140</u>	<u>441</u>
Jumlah beban pajak	<u>5.300</u>	<u>3.196</u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

29. Komitmen dan Kontinjensi

Perusahaan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rangka ekspor-impor, pemberian garansi dan pemberian kredit kepada nasabah dengan rincian sebagai berikut:

	2014	2013
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen:		
Fasilitas kredit yang belum ditarik		
Pihak berelasi (Catatan 30)	1.159	558
Pihak ketiga	61.754	43.824
Jumlah	<u>62.913</u>	<u>44.382</u>
Lainnya	<u>1.466</u>	<u>174</u>
Jumlah liabilitas komitmen	<u>64.379</u>	<u>44.556</u>
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi:		
Bunga dalam penyelesaian		
Pihak ketiga	1.045	376
Aset dihapuskan		
Kredit hapus buku - pihak ketiga	<u>520</u>	<u>500</u>
Jumlah Tagihan Kontinjensi	<u>1.565</u>	<u>876</u>
Liabilitas Kontinjensi :		
Bank garansi		
Pihak ketiga	<u>10.869</u>	<u>4.584</u>
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	<u>10.869</u>	<u>4.584</u>
Kontinjensi - bersih	<u>(9.304)</u>	<u>(3.708)</u>

Saldo bank garansi yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 1.395 dan Rp 537 (Catatan 14).

30. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Selain karyawan kunci, pihak berelasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham pengendali Perusahaan pada tahun 2014 adalah Oki Widjaja dan Pieter Tanuri melalui PT Philadel Terra Lestari. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, PT Philadel Terra Lestari masih dalam proses persetujuan di Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang saham Perusahaan pada tahun 2013 adalah PT Kharisma Prima Karya, Hadi Surya dan Oki Widjaja. Pada tanggal 1 Oktober 2014, seluruh saham Perusahaan yang dimiliki oleh PT Kharisma Prima Karya dan Hadi Surya telah dijual sehingga PT Kharisma Prima Karya dan Hadi Surya sejak saat itu bukan lagi merupakan pihak berelasi Perusahaan.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perusahaan.

PT Surya Indonesia Sejati, PT Surya Indonesia Sehati, PT Jisawi Finas, PT Elsiscom Prima Karya, PT Jala Mas Putra Rezeki dan PT Terra Zone Indonesia.

- b. Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang meliputi antara lain:

- a. Transaksi aset dan liabilitas dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2014		2013	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas	Jumlah	Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas
Aset				
Kredit				
PT Elsiscom Prima Karya	13.937	0,71%	13.905	0,99%
PT Terrazone Indonesia	9.900	0,51%	-	-
PT Surya Indonesia Sejati	8.500	0,44%	8.569	0,61%
PT Surya Indonesia Sehati	8.500	0,44%	8.500	0,61%
PT Jala Mas Putra Rezeki	3.905	0,20%	-	-
PT Jisawi Finas	3.000	0,15%	3.024	0,22%
Okie Widjaja	2.999	0,15%	8.099	0,58%
Twin Valentino	182	0,01%	-	-
Rudy Susanto	179	0,01%	-	-
Iwan Kaslim	119	0,01%	-	-
Bahari Hutapea	92	0,00%	-	-
Andy Purwandi	42	0,00%	-	-
Polmatua Sinaga	34	0,00%	-	-
PT Alas Watu Utama	-	-	1.828	0,13%
Lain-lain	-	-	1.763	0,12%
Jumlah	51.389	2,63%	45.688	3,26%
Pendapatan bunga akrual	126	0,01%	80	0,01%
Biaya dibayar dimuka	285	0,01%	-	-
Jumlah Aset	51.800	2,65%	45.768	3,27%

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014		2013	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas	Jumlah	Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas
Liabilitas				
Simpanan				
Giro	4.838	0,29%	2.121	0,17%
Tabungan	15.957	0,97%	13.349	1,08%
Deposito	164.312	9,97%	52.928	4,30%
Jumlah	185.107	11,23%	68.398	5,55%
Beban bunga akrual Deposito	1.085	0,06%	159	0,01%
Jumlah Liabilitas	186.192	11,29%	68.557	5,56%

- b. Pendapatan bunga yang diterima dari pihak berelasi untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 392 dan Rp 2.307 atau masing-masing 0,21% dan 1,61% dari jumlah pendapatan bunga (Catatan 22).
- c. Beban bunga yang dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.420 dan Rp 3.530 atau masing-masing sebesar 1,28% dan 4,08% dari jumlah beban bunga (Catatan 23).
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kendaraan dengan PT Kharisma Prima Karya untuk beberapa kendaraan operasional Perusahaan. Masa sewa kendaraan adalah 2 - 3 tahun dengan jatuh tempo sewa terakhir 10 Januari 2016. Beban sewa yang dibayarkan untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 457 dan Rp 443 (Catatan 25).
- e. Perusahaan menandatangani perjanjian sewa gedung dengan PT Galva untuk sewa gedung Jl. Hayam Wuruk No. 27, Jakarta Pusat dengan masa sewa 2 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Beban sewa yang dibayarkan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 285 dan Rp 225 (Catatan 25).
- f. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut:

	2014							
	Direksi		Dewan Komisaris		Personil manajemen kunci lainnya		Jumlah	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	100	2.737	100	1.162	62	4.141	76	8.040
Imbalan pasca-kerja	-	-	-	-	38	2.562	24	2.562
Jumlah	100	2.737	100	1.162	100	6.703	100	10.602

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013							
	Direksi		Dewan Komisaris		Personil manajemen kunci lainnya		Jumlah	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	100	2.175	100	1.040	60	3.669	74	6.884
Imbalan pasca-kerja	-	-	-	-	40	2.427	26	2.427
Jumlah	100	2.175	100	1.040	100	6.096	100	9.311

- g. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai eksposur transaksi komitmen dan kontinjensi (berupa fasilitas kredit yang belum ditarik) dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 1.159 dan Rp 558 (Catatan 29).

31. Kontinjensi

Perusahaan menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Perusahaan bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

32. Informasi Lainnya

- Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 0,20% dan 0,08%.
- Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 0,54% dan 0,30 %.
- Rasio kredit terhadap jumlah simpanan (*Loan to deposit ratio* – LDR) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing- masing sebesar 75,07% dan 87,17%.
- Perusahaan menerima surat dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (“PPA”) No. S.073/PAK-PAKP/1007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pelunasan Kewajiban Debitur dengan jumlah USD 172.599,73. Tagihan PPA kepada Perusahaan tersebut terkait dengan fasilitas L/C jatuh tempo yang berasal dari pengalihan tagihan PT Bank Umum Nasional (“BUN”) (Bank Beku Kegiatan Operasi) yang dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). Perusahaan telah menanggapi hal tersebut melalui surat No. BIP/DIR/065/X/07 tanggal 29 Oktober 2007 yang menjelaskan bahwa tagihan tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan dan Perusahaan tidak memiliki tunggakan kewajiban kepada BUN. Pada tanggal 23 Januari 2013, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI melalui suratnya No. PJPN-005/PUPNC.10.03/2013 telah mengirimkan Penetapan Jumlah Piutang Negara kepada Perusahaan dimana jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi Perusahaan adalah sebesar USD 189.859,70. Perusahaan melalui Law Office Musa Sinambela & Partners, telah mengirimkan surat No. 010/P/LO-MSP/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk meninjau kembali Surat Keputusan PUPN di atas.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan ataupun jawaban dari KPKNL atas penyelesaian tagihan tersebut. Sebagai tanda itikad baik, Perusahaan telah melakukan setoran kepada PPA sebesar Rp 250 pada tanggal 9 September 2008.

e. **Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum**

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin liabilitas bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito *on-call*, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, *letters of credit*, akseptasi, swap mata uang dan liabilitas kontinjen lainnya seperti bank garansi, *standby letters of credits*, *performances bonds* dan liabilitas sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti pinjaman subordinasi dan liabilitas kepada direktur, komisaris dan pihak terkait dengan bank.

Berdasarkan Surat Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) No. S235/UP3/III/2005 pada tanggal 17 Maret 2005 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 18 April 2005, liabilitas pembayaran bank yang dijamin hanya meliputi simpanan dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank. Selanjutnya program penjaminan Pemerintah tersebut akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2005. Ketentuan mengenai pengurangan dan pengakhiran program penjaminan ini merupakan penegasan dari ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004.

33. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki eksposur aset dalam mata uang asing hanya dalam akun kas dengan rincian sebagai berikut :

	2014		2013	
	Mata uang asal (Dalam angka penuh)	Ekuivalen (Rp)	Mata uang asal (Dalam angka penuh)	Ekuivalen (Rp)
Dolar Amerika Serikat	17.004	211	19.143	232
Dolar Singapura	4.694	44	6.061	58
Dolar Australia	-	-	2.500	27
Yen Jepang	20.000	2	6.700	8
Dolar Hongkong	3.000	5	6.000	10
Euro Eropa	375	6	75	1
Jumlah		268		336

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. Informasi Segmen

a. Segmen Usaha

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni pemasaran dan kredit, treasuri, dan *trade finance*. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan, sebagai berikut:

	2014			Jumlah
	Pemasaran dan Kredit	Treasuri	Trade Finance	
Pendapatan				
Pendapatan bunga	162.325	20.121	-	182.446
Pendapatan operasional lainnya	1.028	65	13	1.106
Jumlah pendapatan	<u>163.353</u>	<u>20.186</u>	<u>13</u>	<u>183.552</u>
Beban				
Beban bunga	109.384	1.123	-	110.507
Beban operasional lainnya	3.165	-	-	3.165
Jumlah beban	<u>112.549</u>	<u>1.123</u>	<u>-</u>	<u>113.672</u>
Pendapatan segmen - bersih				<u>69.880</u>
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan				4.540
Beban yang tidak dapat dialokasikan				<u>53.778</u>
Laba sebelum pajak				20.642
Beban pajak				<u>5.300</u>
Laba bersih				<u>15.342</u>

	2013			Jumlah
	Pemasaran dan Kredit	Treasuri	Trade Finance	
Pendapatan				
Pendapatan bunga	128.779	14.664	-	143.443
Pendapatan operasional lainnya	1.837	80	6	1.923
Jumlah pendapatan	<u>130.616</u>	<u>14.744</u>	<u>6</u>	<u>145.366</u>
Beban				
Beban bunga	85.082	1.508	-	86.590
Beban operasional lainnya	77	575	-	652
Jumlah beban	<u>85.159</u>	<u>2.083</u>	<u>-</u>	<u>87.242</u>
Pendapatan segmen - bersih				<u>58.124</u>
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan				2.613
Beban yang tidak dapat dialokasikan				<u>49.717</u>
Laba sebelum pajak				11.020
Beban pajak				<u>3.196</u>
Laba bersih				<u>7.824</u>

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2014		
	Pemasaran dan Kredit	Treasuri	Jumlah
Aset			
Aset segmen	1.256.530	673.454	1.929.984
Aset yang tidak dapat dialokasikan			21.603
Jumlah aset			1.951.587
Liabilitas			
Liabilitas segmen	1.633.254	8.610	1.641.864
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			6.892
Jumlah liabilitas			1.648.756

	2013		
	Pemasaran dan Kredit	Treasuri	Jumlah
Aset			
Aset segmen	1.056.235	321.242	1.377.477
Aset yang tidak dapat dialokasikan			24.694
Jumlah aset			1.402.171
Liabilitas			
Liabilitas segmen	1.186.465	39.832	1.226.297
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			5.623
Jumlah liabilitas			1.231.920

b. Segmen Geografis

Pendapatan bunga berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Jabodetabek	143.985	112.643
Pulau Jawa (diluar Jabodetabek)	38.461	30.800
Jumlah	182.446	143.443

Nilai tercatat aset segmen berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset tersebut adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Jabodetabek	1.664.552	1.080.114
Pulau Jawa (diluar Jabodetabek)	287.035	297.363
Jumlah	1.951.587	1.377.477

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai perolehan atas aset tetap berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset tersebut adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Jabodetabek	7.478	8.398
Pulau Jawa (diluar Jabodetabek)	2.674	5.213
Jumlah	<u>10.152</u>	<u>13.611</u>

35. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*). Sebagai tanggapan Perusahaan terhadap kondisi tersebut, Perusahaan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/2003 yang telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 5/21/DPNP yang telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP, dimana pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis Bank. Penerapan manajemen risiko yang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh, telah dituangkan dalam pedoman pelaksanaan internal. Lingkup penerapan manajemen risiko Perusahaan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi dimana proses identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap Unit Kerja Operasional maupun Unit Kerja Audit Intern. Sedangkan tiap-tiap Unit Kerja bertanggung jawab atas pengelolaan risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas yang dilakukannya.

Gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi Perusahaan diperoleh dari proses Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pada tiap-tiap jenis risiko, dimana pelaksanaan penilaian telah mengikuti standar yang berlaku.

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Perusahaan bekerja secara independen dari unit bisnis dan audit internal. SKMR bertugas untuk menunjang pengelolaan risiko yang lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Tugas dan tanggung jawab SKMR mencakup:

- a. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Melakukan telaah risiko dan memberikan pendapat terhadap seluruh jenis risiko yang melekat sebelum suatu transaksi diputuskan atau dilaksanakan yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.
- c. Mempersiapkan konsep dan metode pengukuran terhadap risiko komposit dari seluruh jenis risiko sesuai dengan pedoman standar Bank Indonesia dan kebijakan manajemen risiko yang telah dibuat.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Risiko kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Perusahaan, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis terkait dengan kegiatan perkreditan yang antara lain mengatur prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan dan pengawasan kredit, dan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji secara berkala untuk disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah. Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Perusahaan, dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat dipulihkan secara optimal sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan. Antisipasi terhadap kerugian kredit bermasalah dilakukan pula oleh Perusahaan dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas risiko audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses analisa permohonan kredit dilakukan oleh unit kerja analis kredit yang independen terhadap Unit Bisnis. Dalam limit tertentu, pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota komite kredit yang dapat memutus sendiri suatu permohonan kredit. Selain menatausahakan dokumen perkreditan, unit kerja Administrasi Kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan *covenant* yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Proses pencairan dilakukan unit kerja Operasional atas instruksi dari unit kerja Administrasi Kredit setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang berkerja secara fokus dan independen. Perusahaan mengelola risiko konsentrasi kredit dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing kredit dan penguasaan Perusahaan atas segmen yang dimasuki. Segmentasi ini mempengaruhi perlakuan dan kebijakan Perusahaan dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit dan *covenant* yang dipersyaratkan.

Perusahaan mengukur dan memantau risiko untuk setiap debitur baik secara individual, sektor ekonomi maupun seluruh portofolio kredit dengan menerapkan *four - eyes principle* secara konsisten. Perusahaan juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Perusahaan yang memungkinkan Perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu (*Early Warning*) apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah eksposur maksimum laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014		2013	
	Jumlah Bruto	Jumlah Neto	Jumlah Bruto	Jumlah Neto
Laporan Posisi Keuangan				
<i>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</i>				
Efek-efek	9.500	9.500	9.435	9.435
<i>Tersedia untuk dijual</i>				
Efek-efek	38.928	38.928	39.945	39.945
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>				
Giro pada bank lain	113	113	496	496
Kredit yang diberikan	1.252.750	1.249.168	1.052.068	1.051.067
Pendapatan bunga akrual	8.045	8.045	5.850	5.850
Aset lain-lain - bersih	643	643	1.294	1.294
Jumlah	1.309.979	1.306.397	1.109.088	1.108.087
Komitmen dan kontinjensi				
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik				
Bank garansi	62.913	62.913	44.382	44.382
Jumlah	73.782	73.782	48.966	48.966

Berikut adalah eksposur risiko kredit atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014				Jumlah
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Belum jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	
Giro pada bank lain	113	-	-	-	113
Efek-efek	48.428	-	-	-	48.428
Kredit yang diberikan	1.242.922	39	7.982	1.807	1.252.750
Pendapatan bunga akrual	8.045	-	-	-	8.045
Aset lain-lain	643	-	-	-	643
Jumlah	1.300.151	39	7.982	1.807	1.309.979
	2013				Jumlah
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Belum jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	
Giro pada bank lain	496	-	-	-	496
Efek-efek	49.380	-	-	-	49.380
Kredit yang diberikan	1.050.438	236	2.475	1.394	1.054.543
Pendapatan bunga akrual	5.850	-	-	-	5.850
Aset lain-lain	1.294	-	-	-	1.294
Jumlah	1.107.458	236	2.475	1.394	1.111.563

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan portofolio yang dimiliki Perusahaan. Risiko pasar yang dimaksud terdiri dari risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Penerapan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan.

a. Risiko Suku Bunga

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perusahaan terekspos pada risiko suku bunga yang terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara harian, yang antara lain dilakukan terhadap posisi surat berharga kategori *available for sale* (AFS) dan *trading book* (TB). Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan baik dalam *trading book* maupun *banking book*.

Risiko suku bunga dalam *trading book* dihitung dengan metode standar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, yaitu meliputi risiko spesifik (menggunakan Metode Jatuh Tempo) dan risiko umum. Sedangkan risiko suku bunga dalam *banking book* dikelola dengan melakukan analisa *repricing gap* antara *Risk Sensitive Asset* (RSA) dan *Risk Sensitive Liabilities* (RSL). Analisa *repricing gap* dilakukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga (naik/turun) pada *banking book* tersebut terhadap pendapatan bunga bersih (*Net Increase Income* atau NII). Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan. Risiko suku bunga dalam *Banking Book* (IRBB) pada tanggal 31 Desember 2014 dinilai sedang yang tercermin dari *gap asset - liabilities* kumulatif pada skala waktu 0 – 3 bulan yang masih cukup besar cenderung meningkat diakhir tahun. Untuk memitigasi risiko IRBB ini, Perusahaan secara konsisten menerapkan penguasaan suku bunga mengambang (*floating rate*) hampir di semua produk *funding* dan *lending*, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyesuaian apabila risiko IRBB ini berpotensi mempengaruhi NII secara signifikan. Perusahaan juga terus memperbaiki struktur pendapatan dari *fee based income*, agar pengaturan suku bunga dapat lebih fleksibel dan memiliki daya saing.

Pengaturan *gap repricing* ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada setiap rapat bulanan *Asset Liability Committee* (ALCO). Tujuannya adalah agar *gap - repricing* ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar. Unit kerja treasuri bertanggungjawab atas pengaturan *gap repricing* dengan memperhatikan *gap limit* yang terjadi.

Tabel berikut adalah atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga berdasarkan jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014					Jumlah
	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 1 tahun	> 1 tahun s.d 2 tahun	> 2 tahun	
Aset						
Bunga Mengambang						
Giro pada bank lain	113	-	-	-	-	113
Kredit yang diberikan	31.657	45.862	403.949	231.011	540.271	1.252.750
Liabilitas						
Bunga Mengambang						
Simpanan	283.503	-	-	-	-	283.503
Simpanan dari bank lain	5.014	-	-	-	-	5.014

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2013					Jumlah
	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 1 tahun	> 1 tahun s.d 2 tahun	> 2 tahun	
Aset						
Bunga Mengambang						496
Giro pada bank lain	496	-	-	-	-	496
Kredit yang diberikan	20.982	46.669	383.356	189.383	411.678	1.052.068
Liabilitas						
Bunga Mengambang						198.143
Simpanan	198.143	-	-	-	-	198.143
Simpanan dari bank lain	7.671	-	-	-	-	7.671

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan transaksi operasional pada aktivitas *money changer*. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap risiko nilai tukar dikarenakan Perusahaan hanya memiliki eksposur kas dalam mata uang asing yang tidak signifikan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko likuiditas Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Perusahaan dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu, yang direviu pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Perusahaan serta upaya meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan.

Pemantauan terhadap likuiditas Perusahaan dilakukan secara harian dan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Manajemen. Pemantauan antara lain dilakukan terhadap komposisi posisi keuangan Perusahaan, aktivitas dana keluar dan dana masuk yang tercermin dari transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)* dan SKN, aktivitas *money market*, posisi aset likuid baik primer maupun sekunder, serta rasio-rasio likuiditas seperti rasio kecukupan aset likuid dan *Loan to Deposit Ratio*. Pemantauan terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik primer maupun sekunder dilakukan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu menjaga GWM sesuai yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

PT BANK INA PERDANA TBK**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013***(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)*

Pengelolaan likuiditas Perusahaan juga dilakukan dengan mempelajari pola pergerakan dana dan atau perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga, khususnya dana nasabah inti dan nasabah yang memiliki tingkat volatilitas cukup tinggi. Dengan mempelajari perilaku nasabah, maka Perusahaan dapat menjaga kecukupan likuiditas yang diperlukan secara tepat untuk menutup kebutuhan tersebut. Perusahaan menjaga kecukupan *secondary reserves* pada level yang aman dengan besaran kecukupan disesuaikan dengan kondisi likuiditas Perusahaan secara spesifik maupun kondisi likuiditas di pasar.

Core fund atau dana yang tidak ditarik oleh nasabah dan dinilai stabil berada dalam besaran yang cukup baik. Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap posisi *core fund* dan berupaya untuk secara berkesinambungan meningkatkan persentase terhadap jumlah dana yang dimiliki. *Core fund* menjadi bagian yang sangat penting bagi Perusahaan dalam menjalankan fungsi intermediasi berupa penyediaan dana jangka panjang. Hal ini mengingat portofolio dana pihak ketiga yang dimiliki Perusahaan sebagian besar berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dana mengendap antara lain diciptakan program-program yang mengharuskan dana nasabah ditahan dan tidak dapat ditarik sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program.

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Perusahaan. ALCO bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Perusahaan sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku. ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Perusahaan. Pada dasarnya, risiko likuiditas dikelola sesuai dengan kerangka kebijakan, pengawasan, dan batasan yang memastikan bahwa konsentrasi pendanaan bersifat minimal, sumber dan jangka waktu pendanaan telah terdiversifikasi.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014					Jumlah	Biaya transaksi	Nilai Tercatat
	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 1 tahun s.d. 2 tahun			
<u>Liabilitas</u>								
Liabilitas segera	1.162	-	-	-	-	1.162	-	1.162
Simpanan	1.430.854	162.245	20.346	12.996	-	1.626.441	-	1.626.441
Simpanan dari bank lain	5.417	-	-	3.186	-	8.603	-	8.603
Beban bunga akrual	6.820	-	-	-	-	6.820	-	6.820
Jumlah Liabilitas	<u>1.444.253</u>	<u>162.245</u>	<u>20.346</u>	<u>16.182</u>	<u>-</u>	<u>1.643.026</u>	<u>-</u>	<u>1.643.026</u>

	2013					Jumlah	Biaya transaksi	Nilai Tercatat
	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 1 tahun s.d. 2 tahun			
<u>Liabilitas</u>								
Liabilitas segera	1.324	-	-	-	-	1.324	-	1.324
Simpanan	1.070.156	86.372	14.853	11.720	-	1.183.101	-	1.183.101
Simpanan dari bank lain	36.429	350	1.450	1.500	-	39.729	-	39.729
Beban bunga akrual	3.467	-	-	-	-	3.467	-	3.467
Jumlah Liabilitas	<u>1.111.376</u>	<u>86.722</u>	<u>16.303</u>	<u>13.220</u>	<u>-</u>	<u>1.227.621</u>	<u>-</u>	<u>1.227.621</u>

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagian besar liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 bulan, namun berdasarkan pengalaman Perusahaan sebagian besar dari liabilitas tersebut pada saat jatuh tempo akan diperpanjang (*roll over*). Upaya yang dilakukan Perusahaan agar nasabah tetap mempertahankan dananya pada Perusahaan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penawaran suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, Perusahaan juga mengharapkan dapat menarik nasabah baru untuk menempatkan dananya pada Perusahaan. Perusahaan juga melakukan upaya lain untuk memitigasi adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dimana Perusahaan juga memantau depositan inti, khususnya 25 depositan inti terbesar, dengan cara mengevaluasi profil dan perilaku dari depositan-depositan tersebut sehingga Perusahaan dapat melakukan antisipasi terhadap penarikan dana besar yang akan dilakukan depositan. Sampai dengan saat ini, Perusahaan tidak pernah mengalami kesulitan likuiditas maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan. Apabila terdapat potensi risiko, Perusahaan memiliki sejumlah upaya antisipasi seperti ketersediaan Giro Wajib Minimum, Cadangan Sekunder, serta penetrasi yang baik terhadap pasar antar Bank.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

Pengendalian risiko operasional Perusahaan diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (*accountability*) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena Perusahaan menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Perusahaan akan semakin tidak rentan terhadap guncangan akibat risiko operasional.

Pengendalian *human error* pada pelaksanaan operasi Perusahaan, dilakukan dengan menerapkan *daily control check list*, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang melibatkan seluruh karyawan. Pelaksanaan strategi *anti fraud* tersebut mengacu kepada Kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, *review* dan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP), peningkatan pengendalian intern dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala.

Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas *Data Center* (DC) termasuk kualitas *Disaster Recovery Center* (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas aplikasi perangkat lunak pada *Core Banking System*. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja, juga untuk meningkatkan kualitas *built in control* pada proses operasional. Perkembangan produk dan jasa Perusahaan dengan fitur berbasis teknologi informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Perusahaan untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai.

PT BANK INA PERDANA TBK

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Perusahaan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Perusahaan senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (melalui training dan edaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun *compliance charter* sebagai *guidance* bagi semua pihak dalam organisasi Perusahaan dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Perusahaan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan telah melakukan *Quality Assurance Policy and Procedure* yaitu proses penilaian terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah keluaran. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Agar perilaku organisasi tidak menyimpang dari standar, telah dibuat *code of conduct* yang berisi etika yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Sedangkan untuk meminimalkan risiko kepatuhan, Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif (KAP), Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan juga telah melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan, yaitu :

- Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan eksternal maupun internal.
- Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perusahaan.
- Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perusahaan.
- Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan (*compliance analysis*) atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan reviu secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat. Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia. Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Perusahaan, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi.

Untuk meminimalkan risiko hukum, Perusahaan selalu melakukan pemantauan terhadap potensi munculnya litigasi/tuntutan hukum kepada Perusahaan. Dalam setiap aktivitas, baik perkreditan, operasional maupun treasury, Perusahaan juga selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan aktivitas perikatan perjanjian dengan nasabah/debitur dan kelengkapan dokumen legalitas.

Terkait dengan penerapan manajemen risiko hukum, satuan kerja manajemen risiko juga melakukan kajian-kajian terkait dengan aktivitas Perusahaan yang dapat meningkatkan eksposur risiko hukum serta memberikan rekomendasi dalam rangka memitigasi risiko tersebut.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Persepsi negatif terhadap Perusahaan dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tatakelola dan budaya Perusahaan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah/meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Perusahaan antar lain melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Perusahaan berupaya menanggapi dan menindaklanjuti secara cepat. Dalam rangka menjaga reputasi, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Perusahaan, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengendalikan risiko strategik, Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Perusahaan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya, baik sumber daya keuangan, infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat *review* pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko strategik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja Perusahaan yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Perusahaan. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen, yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen Perusahaan.

Penilaian Profil Risiko

Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian risiko terhadap kedelapan risiko di atas sebagaimana telah diatur oleh Bank Indonesia. Penilaian risiko dilakukan melalui proses penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari risiko inheren yaitu risiko yang melekat pada aktivitas Perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu pengendalian terhadap risiko inheren.

Hasil penilaian profil Perusahaan telah disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara triwulanan. Untuk profil risiko Perusahaan posisi 31 Desember 2014 secara keseluruhan dinilai pada peringkat 2 atau "*Low To Moderate*" dan stabil bila dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Hasil penilaian profil tersebut dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko maupun Komite Pemantau Risiko.

36. Perjanjian-perjanjian Penting

- a. Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama *Channeling* pembiayaan konsumen dalam rangka pembelian kendaraan bermotor dengan PT Maxima Inti Finance, PT Bintang Mandiri Finance, PT Arjuna Finance, PT Financia Multifinance, PT Pro Mitra Finance dan PT Reksa Finance dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 300.000 dan suku bunga antara 12,00% - 14,50% per tahun. Jangka waktu pembiayaan *channeling* 1 – 3 tahun. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku agen kerjasama, agen jaminan dan kustodi.
- b. Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama kepada nasabah melalui pemberian kredit pembelian kendaraan bermotor dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, PT Bima Multifinance, PT Sumber Artha Mas Finance, PT Armada Finance dan PT Sejahtera Pertama Multifinance dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 50.000 dan suku bunga antara 10,50% - 14,50% per tahun. Porsi pembiayaan Perusahaan dalam perjanjian-perjanjian ini adalah antara 95,00% - 99,00% dari jumlah pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan bersama antara 1 – 3 tahun. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku agen kerjasama, agen jaminan dan kustodi.

PT BANK INA PERDANA TBK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja pendukung dengan PT Karunia Adi Sentosa sebagai penyedia karyawan temporer guna mendukung jasa-jasa perbankan. Perjanjian kerjasama ini mengalami beberapa kali perpanjangan dengan perpanjangan terakhir sampai dengan 31 Juli 2015.
- d. Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa ruangan untuk kantor-kantor operasional Perusahaan dengan pihak ketiga.

37. Pengungkapan Tambahan Transaksi Bukan Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	2014	2013
Penghapusbukuan kredit	584	670
Pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi ke aset tak berwujud (aset lain-lain)	8	-

38. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) revisi yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2015 sebagai berikut:

PSAK

1. PSAK No. 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK No. 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
3. PSAK No. 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura bersama
4. PSAK No. 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerjja
5. PSAK No. 46 (Revisi 2014), Pajak Penghasilan
6. PSAK No. 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset
7. PSAK No. 50 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian
8. PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
9. PSAK No. 60 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
10. PSAK No. 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
11. PSAK No. 66, Peraturan Bersama
12. PSAK No. 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
13. PSAK No. 68, Pengukuran Nilai Wajar

ISAK

ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Kembali Derivatif Melekat

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Bank Ina Perdana Tbk
Wisma BSG
Jl. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat
P. (021) 385 9050
F. (021) 385 9041
www.bankina.co.id
Call Center : (021) 348 31766